



RENCANA KERJA

(RENJA) TAHUN 2021

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI BANTEN**

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas ridho-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja - Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kegiatan Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021.

Rencana Kerja adalah penjabaran dari Rencana Strategis Dinas yang memuat evaluasi tahun yang lalu serta kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya dengan mempertimbangkan isu dan masalah mendesak yang sedang berkembang serta menjadi acuan dan kerangka dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku Renja DLHK Provinsi Banten Tahun 2021 ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan selanjutnya. Harapan kami agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Serang, Oktober 2020

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI BANTEN**



Ir. H. M. Husni Hasan, CES
NIP. 19621222 199003 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLHK TAHUN 2019.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DLHK Tahun Lalu dan Capaian Renstra DLHK.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DLHK Provinsi Banten	53
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLHK	56
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	57
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Pemangku Kepentingan)	71
BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	84
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional.....	84
3.2 Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten 2021	87
3.3 Tujuan dan Sasaran Renja DLHK	90
3.4 Program dan Kegiatan	91
BAB. IV P E N U T U P	120

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2019	9
Tabel 2.2. Realisasi Anggaran berdasarkan kegiatan dan sub kegiatan	13
Tabel 2.3. Pengukuran Kinerja Essolon II DLHK Tahun 2019	21
Tabel 2.4. Pengukuran Kinerja Essolon III DLHK Tahun 2019	21
Tabel 2.5. Pengukuran Kinerja Essolon IV DLHK Tahun 2019	21
Tabel 2.6. Review terhadap rancangan awal RKPDTahun 2021.....	58
Tabel 2.7. Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan Tahun 2021	72
Tabel 3.1. Sinkronisasi Prioritas, Sasaran dengan Program Pembangunan Tahun 2021	89
Tabel 3.2. Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja DLHK Tahun 2021 (Setelah Pemetaan Permendagri No 90 Tahun 2019	93
Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2021 Dan Prakiraan Maju Tahun 2022.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah

Adanya penyempurnaan peraturan perundang-undangan tentang sistem perencanaan dan penganggaran baik proses dan mekanismenya maupun tahapan musyawarah diberbagai tingkatan serta terkait dengan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah maka perlu dibuat sebuah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup dan kehutanan yang bersifat taktis untuk setiap tahunnya dan disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD).

Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten merupakan penjabaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten yang mengacu pada RPJMD Provinsi Banten. Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam satu tahun anggaran.

Di dalam dokumen Renja diuraikan mengenai evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan perencanaan pada tahun kedepan, visi dan misi bagi penyelenggara pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, sehingga memenuhi fungsi pelayanan, pembangunan dan pengaturan. Selain itu juga menguraikan berbagai tujuan, sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan penekanan aspek ekonomis dan ekologis.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
13. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2021.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021.
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten;
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;

23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Banten 2017-2022;
24. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.
25. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan tatakerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
26. Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2021 yakni tersedianya suatu dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran untuk tahun 2021 yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dengan demikian Dokumen Renja dimaksud dapat dijadikan acuan dan pegangan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dan seluruh jajarannya selama periode tahun 2021 dalam melaksanakan pembangunan urusan lingkungan hidup secara efektif dan efisien.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2021 adalah :

1. Menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan daerah Provinsi Banten pada tahun 2021 di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
3. Sebagai acuan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2021 disusun dengan sistematika penyajian dan garis besar isi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2021.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019

Memuat rangkaian Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten pada tahun-tahun sebelumnya berikut Capaian Renstra yang telah dilaksanakan, kemudian digambarkan Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten hingga akhirnya dapat disusun Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dan Review terhadap Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian ini dikemukakan telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan kebijakan Provinsi, Tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2021 yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Selanjutnya disusun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2021.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DLHK Tahun Lalu dan Capaian Renstra DLHK

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja DLHK tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra DLHK ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan DLHK dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra DLHK, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja DLHK terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, yang meliputi 3 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 1 (satu) urusan wajib yaitu Urusan Wajib Lingkungan Hidup dan urusan pilihan yaitu Urusan Pilihan Kehutanan.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja DLHK tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra DLHK, dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah) tahun berjalan yang baru disahkan.

A. Rekapitulasi Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2019

Pada Tahun 2019 Dukungan anggaran kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sebelum Perubahan (APBD MURNI) adalah Rp. 59.534.000.000,- dengan pagu Belanja Tidak Langsung Rp. 35.000.000.000,- dan Belanja Langsung dari 3 (Tiga) Program dan 52 (Lima puluh dua) kegiatan Rp. 24.534.000.000,-, serta Target Pendapatan dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium Lingkungan) sebesar Rp. 150.000.000,-

Dalam APBD Perubahan Tahun 2019 total Pagu anggaran adalah Rp 68.885.813.000,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 39.581.000.000,- dan Belanja Langsung dari 3 (Tiga) Program dan 52 (Lima puluh dua) kegiatan, Rp. 29.304.813.000,-.

Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran, yaitu tanggal 31 Desember 2019, Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung Rp.37.072.723.189,- atau 93,66% dan Belanja Langsung Rp. 28.338.152.832 atau 96,70%, Total Realisasi keuangan Rp.65.410.876.021 atau 94,96 % serta realisasi fisik sebesar 99,92% serta realisasi pendapatan dari Target sebesar Rp. 150.000.000,- sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 realisasi penerimaan retribusi daerah telah mencapai 150.188.000,- atau mencapai 100,13 %.

Realisasi keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun anggaran 2019 selengkapnya dapat di lihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.1. Realisasi keuangan Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Uraian (Prog/Keg)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	%	Fisik %	
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA DAERAH					
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	39.581.000.000	37.072.723.189	93,66%	100	2.508.276.811
1	BELANJA PEGAWAI (GAJI DAN TUNJANGAN)	10.690.140.000	9.952.474.685	93,10%	100	
2	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	28.890.860.000	27.120.248.504	93,87%	100	
II	BELANJA LANGSUNG	29.304.813.000	28.338.152.832	96,70%	99,92	966.660.168
A	PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN	13.672.937.000	13.305.458.805	97,31%	100	367.478.195
1	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DAN NERACA ASET	64.000.000	64.000.000	100%	100	0
2	PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	295.000.000	282.861.350	95,89%	100	12.138.650
3	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR	481.000.000	476.160.900	98,99%	100	4.839.100
4	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR	1.665.516.000	1.636.817.784	98,28%	100	28.698.216
5	PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN	6.291.321.000	6.134.683.382	97,51%	100	156.637.618
6	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR	113.000.000	113.000.000	100%	100	0
7	RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH	200.000.000	199.812.750	99,91%	100	187.250
8	PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN	30.000.000	30.000.000	100%	100	0
9	PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL	168.000.000	166.163.000	98,91%	100	1.837.000
10	PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN	1.137.021.400	1.112.869.100	97,88%	100	24.152.300
11	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PADA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN	609.925.000	606.713.859	99,47%	100	3.211.141

12	PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN	457.353.600	444.577.000	97,21%	100	12.776.600
13	RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH PADA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN	20.000.000	19.970.783	99,85%	100	29.217
14	PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA UPTD SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	50.000.000	47.195.297	94,39%	100	2.804.703
15	PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA UPTD SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	120.000.000	110.772.440	92,31%	100	9.227.560
16	PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA UPTD SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	194.360.000	177.341.679	91,24%	100	17.018.321
17	RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH PADA UPTD SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	25.640.000	24.576.000	95,85%	100	1.064.000
18	PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA CABANG DINAS LHK WILAYAH LEBAK DAN TANGERANG	107.700.000	91.440.500	84,90%	100	16.259.500
19	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PADA CABANG DINAS LHK WILAYAH LEBAK DAN TANGERANG	110.100.000	105.997.500	96,27%	100	4.102.500
20	PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADA CABANG DINAS LHK WILAYAH LEBAK DAN TANGERANG	460.000.000	423.570.542	92,08%	100	36.429.458
21	RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH PADA CABANG DINAS LHK WILAYAH LEBAK DAN TANGERANG	55.000.000	54.910.000	99,84%	100	90.000
22	PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA CABANG DINAS LHK WILAYAH PANDEGLANG, SERANG DAN CILEGON	70.000.000	64.103.800	91,58%	100	5.896.200
23	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PADA CABANG DINAS LHK WILAYAH PANDEGLANG, SERANG DAN CILEGON	130.000.000	129.851.800	99,89%	100	148.200
4	PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADA CABANG DINAS LHK WILAYAH PANDEGLANG, SERANG DAN CILEGON	325.000.000	320.823.708	98,71%	100	4.176.292

25	RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH PADA CABANG DINAS LHK WILAYAH PANDEGLANG, SERANG DAN CILEGON	45.000.000	42.350.000	94,11%	100	2.650.000
26	PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA UPTD PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN (TAHURA)	135.000.000	127.389.600	94,36%	100	7.610.400
27	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PADA UPTD PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN (TAHURA)	155.000.000	150.223.000	96,62%	100	4.777.000
28	PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADA UPTD PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN (TAHURA)	138.000.000	128.089.131	92,82%	100	9.910.869
29	RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH PADA UPTD PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN (TAHURA)	20.000.000	19.193.900	95,97%	100	806.100
B	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN	5.354.900.000	5.060.865.233	94,51%	99,48	294.034.767
30	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	503.000.000	497.851.300	98,98%	100	5.148.700
31	PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	1.654.000.000	1.579.144.695	95,47%	100	74.855.305
32	PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP	810.000.000	702.293.040	86,70%	95,83	107.706.960
33	PERENCANAAN DAN PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP	330.000.000	327.884.000	99,36%	100	2.116.000
34	PELAYANAN PENGADUAN DAN PENEGAKAN HUKUM	355.000.000	322.330.350	90,80%	100	32.669.650
35	PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	745.000.000	717.253.200	96,28%	100	27.746.800
36	PENINGKATAN JAMINAN MUTU LABORATORIUM LINGKUNGAN	275.000.000	260.514.426	94,73%	100	14.485.574
37	PENGUJIAN DAN ANALISA LABORATORIUM LINGKUNGAN	682.900.000	653.594.222	95,71%	100	29.305.778
C	PROGRAM PENGELOLAAN DAN KONSERVASI HUTAN	10.276.976.000	9.971.828.794	97,03%	100	305.147.206

38	PERENCANAAN DAN PENATAGUNAAN HUTAN	515.000.000	508.243.227	98,69%	100	6.756.773
39	PEMANFAATAN HUTAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN	725.000.000	717.570.000	98,98%	100	7.430.000
40	PENGEMBANGAN ANEKA USAHA DAN PROMOSI KEHUTANAN	606.250.000	594.167.500	98,10%	100	12.082.500
41	PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	900.000.000	861.882.760	95,76%	100	38.117.240
42	KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM	600.000.000	593.685.807	98,95%	100	6.314.193
43	PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	650.000.000	626.425.600	96,37%	100	23.574.400
44	PENGEMBANGAN PEMBENIHAN TANAMAN HUTAN	742.465.000	706.473.998	95,15%	100	35.991.002
45	SERTIFIKASI DAN PROTEKSI PEREDARAN BENIH TANAMAN HUTAN	160.000.000	157.277.920	98,30%	100	2.722.080
46	REHABILITASI LAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA CABANG DINAS LHK WILAYAH LEBAK DAN TANGERANG	1.154.400.000	1.108.173.800	96,00%	100	46.226.200
47	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA HUTAN PADA CABANG DINAS LHK WILAYAH LEBAK DAN TANGERANG	380.600.000	364.935.000	95,88%	100	15.665.000
48	REHABILITASI LAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA CABANG DINAS LHK WILAYAH PANDEGLANG, SERANG, DAN CILEGON	1.478.716.000	1.434.005.584	96,98%	100	44.710.416
49	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA HUTAN PADA CABANG DINAS LHK WILAYAH PANDEGLANG, SERANG, DAN CILEGON	325.000.000	301.195.000	92,68%	100	23.805.000
50	PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN	271.000.000	269.005.000	99,26%	100	1.995.000
51	PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN	361.000.000	332.701.598	92,16%	100	28.298.402
52	REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL (DAK)	1.407.545.000	1.396.086.000	99,19%	100	11.459.000
	JUMLAH BELANJA DAERAH (BTL+BL)	68.885.813.000	65.410.876.021	94,96%	99,92	3.474.936.979

Tabel. 2.2 Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2019

No	Kegiatan/ Tolok Ukur	Target Kinerja	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja	Fisik (%)	Sisa Anggaran		Jumlah Silpa (Rp)	Keterangan
				Rp	%			Anggaran Tidak Digunakan (Rp)	Sisa Kontrak (Rp)		
1	Belanja Tidak Langsung		39.581.000.000	37.072.723.189	93,66		100	2.508.276.811	-	2.508.276.811	
	1. Gaji dan Tunjangan Pegawai		10.690.140.000	9.952.474.685	93,10			737.665.315		737.665.315	Gaji Pokok dan Tunjangan
	2. Tambahan Penghasilan PNS		28.890.860.000	27.120.248.504	93,87			1.770.611.496		1.770.611.496	Tambahan Penghasilan PNS
	Belanja Langsung		29.304.813.000	28.338.152.832	96,70		99.82	590.538.341	376.121.827	966.660.168	
2	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	27 dokumen	64.000.000	64.000.000	100,00	27 dokumen	100	-	-	-	
	1. Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	22 dokumen	32.765.000	32.765.000	100,00	22 dokumen		-	-	-	
	2. Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	3 dokumen	14.856.000	14.856.000	100,00	3 dokumen		-	-	-	
	3. Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	2 dokumen	16.379.000	16.379.000	100,00	2 dokumen		-	-	-	
3	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	18 dokumen	295.000.000	282.861.350	95,89	18 dokumen	100	12.138.650	-	12.138.650	
	1. Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan	3 dokumen	35.400.000	35.394.000	99,98	3 dokumen		6.000	-	6.000	sisa transport perjalanan dinas
	2. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan tahunan	10 dokumen	182.225.000	173.970.650	95,47	10 dokumen		8.254.350	-	8.254.350	Efisiensi penggandaan, mamin rapat, adcost perjalanan dinas, narsum rapat penyusunan laporan dokumen analisa resiko
	3. Penyusunan Evaluasi Pengendalian	5 dokumen	77.375.000	73.496.700	94,99	5 dokumen		3.878.300	-	3.878.300	Efisiensi mamin, adcost perjalanan dinas, narsum rapat penyusunan laporan evaluasi kinerja triwulan (Sakip)

4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 unit, 37 meter	481.000.000	476.160.900	98,99	1 unit, 37 meter	100		4.839.100	4.839.100	
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 unit, 37 meter	481.000.000	476.160.900	98,99	1 unit, 37 meter			4.839.100	4.839.100	sisa kontrak
5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana pada UPT Laboratorium	17 unit	1.137.021.400	1.112.869.100	97,88	17 unit	100		24.152.300	24.152.300	
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	17 unit	1.137.021.400	1.112.869.100	97,88	17 unit			24.152.300	24.152.300	sisa kontrak
6.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang Dan Cilegon	8 Unit	70.000.000	64.103.800	91,58	8 Unit	100	5.896.200	-	5.896.200	
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	8 unit	70.000.000	64.103.800	91,58	8 unit		5.896.200		5.896.200	Efisiensi Kontrak Karena Pembelian Melalui E-Katalog
7.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	5 paket	50.000.000	47.195.297	94,39	5 unit	100		2.804.703	2.804.703	
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	5 paket	50.000.000	47.195.297	94,39	5 unit			2.804.703	2.804.703	Efisiensi Pengadaan Plang Lembaga dan Efisiensi Pengadaan Meja, Kursi dan Lemari arsip Kerja Pejabat
8.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Banten	13 unit	135.000.000	127.389.600	94,36	13 unit	100	-	7.610.400	7.610.400	
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	13 unit	135.000.000	127.389.600	94,36	13 unit			7.610.400	7.610.400	Sisa Kontrak Pengadaan Pompa, Komputer, Alat Studio, Alat Lab lainnya dan Pengadaan Billboard
9.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 bulan	1.665.516.000	1.636.817.784	98,28	12 bulan	100	28.698.216	-	28.698.216	
	1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	42 unit	500.000.000	485.651.034	97,13	42 unit		8.949.716		8.949.716	
	2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	7 paket, 185 unit	1.165.516.000	1.151.166.750	98,77	7 paket, 185 unit		19.748.500		19.748.500	
10.	Pemeliharaan Sarana dan prasarana Kantor Pada UPT Laboratorium	12 bulan	609.925.000	606.713.859	99,47	12 bulan	100	3.211.141	-	3.211.141	
	1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12 bulan	75.700.000	75.640.000	99,92	12 bulan		60.000		60.000	sisa kontrak
	2. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor	12 bulan	6.000.000	6.000.000	100,00	12 bulan		-		-	

	3. Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK/Laboratorium	12 bulan	528.225.000	525.073.859	99,40	12 bulan		3.151.141		3.151.141	sisa pembayaran internet dan sisa kontrak
11.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	12 bulan	130.000.000	129.851.800	99,89	12 bulan	100	148.200	-	148.200	
	1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 bulan	23.150.000	23.150.000	100,00	12 bulan		-		-	
	2. Pemeliharaan Kendaraan Operasional	12 bulan	76.850.000	76.850.000	100,00	12 bulan		-		-	
	3. Pemeliharaan Gedung / Kantor/ Tempat Kerja	12 bulan	30.000.000	29.851.800	99,51	12 bulan		148.200		148.200	efisiensi kontrak
12.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	12 bulan	120.000.000	110.772.440	92,31	12 bulan	100	9.227.560	-	9.227.560	
	1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12 bulan	66.900.000	58.259.440	87,08	12 bulan		8.640.560		8.640.560	Efisiensi servis kendaraan roda dua, sisa pembayaran pajak & BBNKB
	2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 bulan	53.100.000	52.513.000	98,89	12 bulan		587.000		587.000	Efisiensi kontrak pemeliharaan bangunan tempat kerja dan efisiensi pemeliharaan sapras kantor
13.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Tahura Hutan Raya (TAHURA) Banten	12 bulan	155.000.000	150.223.000	96,92	12 bulan	100	4.777.000	-	4.777.000	
	1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12 bulan	60.000.000	56.406.000	94,01	12 bulan		3.594.000		3.594.000	efisiensi belanja jasa service, pelumas dan STNK
	2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 bulan	95.000.000	93.817.000	98,75	12 bulan		1.183.000		1.183.000	efisiensi Pemeliharaan komputer dan bangunan tempat kerja
14.	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	12 bulan	6.291.321.000	6.134.683.382	97,51	12 bulan	100	78.877.614	77.760.004	156.637.618	
	1. Operasional Kantor Tidak Tetap	272 orang	4.689.510.000	4.610.732.386	98,32	272 orang		78.777.614		78.777.614	Honor TKS dan BPJS Kesehatan
	2. Penyediaan Barang Pakai Habis	12 bulan	286.687.500	284.484.800	99,23	12 bulan			2.202.700	2.202.700	Sisa Kontrak ATK dan peralatan olah raga
	3. Penyediaan Bahan Cetak	12 bulan	108.881.500	107.177.500	98,43	12 bulan			1.704.000	1.704.000	sisa kontrak
	4. Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 bulan	168.570.000	167.705.000	99,49	12 bulan			865.000	865.000	sisa kontrak

	5. Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12 bulan	691.800.000	656.622.496	94,92	12 bulan			35.177.504	35.177.504	Sisa Telepon, Listrik dan sewa gedung
	6. Penyediaan BBM	12 bulan	333.372.000	295.561.200	88,66	12 bulan			37.810.800	37.810.800	sisa kontrak
	7. Penyediaan Promosi dan Publikasi	12 bulan	12.500.000	12.400.000	99,20	12 bulan		100.000		100.000	efisiensi
15.	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium	12 bulan	457.353.600	444.577.000	97,21	12 bulan	100	12.776.600	-	12.776.600	
	1. Operasional Perkantoran	12 bulan	226.500.000	224.000.000	98,90	12 bulan		2.500.000		2.500.000	efisiensi
	2. Penyediaan Barang Habis Pakai	12 bulan	143.651.800	141.593.000	98,57	12 bulan		2.058.800		2.058.800	efisiensi
	3. Penyediaan Bahan Cetak	12 bulan	3.933.800	3.883.800	98,73	12 bulan		50.000		50.000	efisiensi
	4. Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 bulan	15.300.000	13.350.000	87,25	12 bulan		1.950.000		1.950.000	efisiensi
	5. Penyediaan BBM	12 bulan	67.968.000	61.750.200	90,85	12 bulan		6.217.800		6.217.800	sisa BBM
16	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran Pada pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	12 bulan	325.000.000	320.823.708	98,71	12 bulan	100	3.176.292	1.000.000	4.176.292	
	1. Penyediaan Bahan Cetak	12 bulan	11.250.000	11.250.000	100,00	12 bulan		-		-	
	2. Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 bulan	19.200.000	19.200.000	100,00	12 bulan		-		-	
	3. Penyediaan Barang Pakai Habis	12 bulan	88.150.000	86.325.000	97,93	12 bulan		1.825.000		1.825.000	
	4. Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12 bulan	206.400.000	204.048.708	98,86	12 bulan		1.351.292	1.000.000	2.351.292	
17	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	12 bulan	194.360.000	177.341.679	91,24	12 bulan	100	17.018.321	-	17.018.321	
	1. Penyediaan Barang Habis Pakai	12 bulan	20.000.000	17.963.000	89,82	12 bulan		2.037.000		2.037.000	efisiensi kontrak
	2. Penyediaan Bahan Cetak	12 bulan	5.032.000	5.032.000	100,00	12 bulan		-		-	ATK
	3. Penyediaan Makan Minum kantor	12 bulan	54.200.000	53.540.000	98,78	12 bulan		660.000		660.000	Anggaran tidak digunakan
	4. Penyediaan BBM	12 bulan	40.128.000	35.960.672	89,61	12 bulan		4.167.328		4.167.328	sisa BBM
	5. Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12 bulan	75.000.000	64.846.007	86,46	12 bulan		10.153.993		10.153.993	Efisiensi dari Listrik, internet dan surat kabar/majalah
18.	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Banten	12 bulan	138.000.000	128.089.131	92,82	12 bulan	100	9.760.669	150.200	9.910.869	

	1. Oprasional Kantor Tidak Tetap	12 bulan	10.500.000	10.350.000	98,57	12 bulan			150.000	150.000	Sisa Kontrak belanja pakaian kerja lapangan
	2. Penyediaan Barang Habis Pakai	12 bulan	17.083.500	17.083.500	100,00	12 bulan		-		-	
	3. Penyediaan Bahan Cetak	12 bulan	8.720.400	8.720.200	100,00	12 bulan			200	200	
	4. Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 bulan	17.100.000	17.100.000	100,00	12 bulan		-		-	
	5. Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12 bulan	25.500.000	25.489.331	99,96	12 bulan		10.669		10.669	belanja listrik, telepon dan faksimili/ internet
	6. Penyediaan BBM	12 bulan	59.096.100	49.346.100	83,50	12 bulan		9.750.000		9.750.000	efisiensi bbm, kendaraan roda 2
19.	Peningkatan Kapasitas Aparatur	12 bulan	113.000.000	113.000.000	100,00	12 bulan	100	-	-	-	
	1. Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	12 bulan	3.000.000	3.000.000	100,00	12 bulan		-	-	-	
	2. Peningkatan Kompetensi Aparatur	12 bulan	110.000.000	110.000.000	100,00	12 bulan		-	-	-	
20	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	12 bulan	30.000.000	30.000.000	100,00	12 bulan	100	-	-	-	
	1. Pengelolaan Kearsipan	12 bulan	30.000.000	30.000.000	100,00	12 bulan		-	-	-	
21	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	12 bulan	200.000.000	199.812.750	99,91	12 bulan	100	187.250	-	187.250	
	1. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tugas pemerintahan	12 bulan	200.000.000	199.812.750	99,91	12 bulan		187.250		187.250	sisa transport
22.	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah pada UPT Laboratorium	12 bulan	20.000.000	19.970.783	99,85	12 bulan	100	29.217	-	29.217	sisa transport
	1. perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	10.650.000	10.620.783	99,73	12 bulan		29.217		29.217	sisa transport
	2. perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	9.350.000	9.350.000	100,00	12 bulan		-		-	
23.	Rapat Koordinasi Kedalam dan Luar Daerah pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	12 bulan	25.640.000	24.576.000	95,85	12 bulan	100	1.064.000	-	1.064.000	
	1 Koordinasi Kedalam	12 bulan	12.800.000	12.190.000	95,23	12 bulan		610.000		610.000	Efisiensi transport dan uang saku sesuai add cost perjalanan
	2 Koordinasi Luar Daerah	12 bulan	12.840.000	12.386.000	96,46	12 bulan		454.000			Efisiensi transport dan uang saku sesuai add cost perjalanan

24.	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Banten	12 bulan	20.000.000	19.193.900	95,97	12 bulan	100	806.100	-	806.100	
	1. Rapat Koordinasi Kedalam Daerah	12 bulan	11.160.000	10.638.500	95,33	12 bulan		521.500		521.500	sisa transport
	2. Rapat Koordinasi Keluar Daerah	12 bulan	8.840.000	8.555.400	96,78	12 bulan		284.600		284.600	sisa transport
25.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	12 bulan	107.700.000	91.440.500	84,90	12 bulan	100	-	16.259.500	16.259.500	
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor	12 bulan	107.700.000	91.440.500	84,90	12 bulan			16.259.500	16.259.500	efisiensi kontrak pengadaan lemari, meja kursi dan alat studio
26.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	12 bulan	110.100.000	105.997.500	96,27	12 bulan	100	3.445.000	657.500	4.102.500	
	1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 bulan	30.000.000	30.000.000	100,00	12 bulan		-		-	
	2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 bulan	80.100.000	75.997.500	94,88	12 bulan		3.445.000	657.500	4.102.500	penggantian suku cadang
27.	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	12 bulan	460.000.000	423.570.542	92,08	12 bulan	100	35.778.564	650.894	36.429.458	
	1. Penyediaan Bahan Cetak	12 bulan	12.936.000	12.800.106	98,95	12 bulan			135.894	135.894	efisiensi kontrak
	2. Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 bulan	67.200.000	66.000.000	98,21	12 bulan		1.200.000		1.200.000	sisa makan minum
	3. Penyediaan Barang Habis Pakai	12 bulan	62.920.000	62.405.000	99,18	12 bulan			515.000	515.000	efisiensi kontrak ATK
	4. Operasional Jasa KntorJasa Telepon, Listrik dan PHBI/PHBN	12 bulan	252.000.000	245.802.236	97,54	12 bulan		6.197.764		6.197.764	Sisa Telepon, Listrik dan PHBI/PHBN
	5. Penyediaan BBM	12 bulan	64.944.000	36.563.200	56,30	12 bulan		28.380.800		28.380.800	Sisa BBM
28.	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	12 bulan	55.000.000	54.910.000	99,84	12 bulan	100	90.000	-	90.000	
	1. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	12 bulan	55.000.000	54.910.000	99,84	12 bulan		90.000		90.000	Sisa transport

29.	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah pada Balai CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	12 bulan	45.000.000	42.350.000	94,11	12 bulan	100	2.650.000	-	2.650.000	
	1. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon	12 bulan	45.000.000	42.350.000	94,11	12 bulan		2.650.000	-	2.650.000	
30.	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	4 dokumen	168.000.000	166.163.000	98,91	4 dokumen	100	797.000	1.040.000	1.837.000	
	1. Penyusunan Profile Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 dokumen	4.800.000	4.800.000	100,00	1 dokumen		-		-	
	2. Pengelolaan PPID	1 dokumen	70.800.000	69.860.000	98,67	1 dokumen			940.000	940.000	sisa kontrak jasa konsultansi pengelolaan website
	3. Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	1 dokumen	57.750.000	57.750.000	100,00	1 dokumen		-	100.000	100.000	sisa kontrak
	4. Penyusunan Statistik sektoral dan informasi Geospasial	1 dokumen	34.650.000	33.753.000	97,41	1 dokumen		797.000		797.000	sisa adcost perjalanan dinas
31.	Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan	100%	330.000.000	327.884.000	99,36	100%	100	556.000	1.560.000	2.116.000	
	1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis	1 dokumen	100.550.000	100.195.000	99,65	1 dokumen			355.000	355.000	sisa kontrak
	2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemanfaatan dan Kinerja Pengelolaan Lingkungan	5 dokumen	193.950.000	192.189.000	99,09	5 dokumen		556.000	1.205.000	1.761.000	sisa kontrak, pernananan dinas luar daerah
	3. Pembinaan Tata Laksanan Penilaian Dokumen Lingkungan dan Penerbitan izin Lingkungan	2 dokumen	35.500.000	35.500.000	100,00	2 dokumen		-		-	
32.	Peningkatan Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan	100%	355.000.000	322.330.350	90,80	100%	100	12.912.000	19.757.650	32.669.650	
	1. Penanganan kasus-kasus akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH dan Kehutanan	100%	276.455.000	247.286.850	89,45	100%		9.410.500	19.757.650	29.168.150	sisa kontrak uji lab dan sisa belanja obat-obatan, honor narasumber, perjalanan dinas
	2. Pengawasan dan Pengendalian tidak langsung terhadap ketaatan pelaku usaha	100 usaha/ industri	78.545.000	75.043.500	95,54	100 usaha/ industri		3.501.500		3.501.500	honor narasumber, perjadiin

	dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup										
33.	Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	100%	745.000.000	717.253.200	96,28	100%	100	21.300.000	6.446.800	27.746.800	
	1. Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan	25 sekolah	319.035.000	313.633.200	98,31	25 sekolah		150.000	5.251.800	5.401.800	sisa kontrak bahan percontohan (nak sampah), perjalanan dinas dalam daerah
	2. Pembinaan dan Penilaian Kota Berwawasan Lingkungan di Provisni Banten	7 kab/kota	38.950.000	38.050.000	97,69	7 kab/kota		900.000		900.000	uang transport
	3. Pemberdayaan Pada Pemerhati Lingkungan dan Masyarakat Hukum Adat	2 saka (stuan karya) / 8 kwarcab (256 orang)	387.015.000	365.570.000	94,46	2 saka (stuan karya) / 8 kwarcab (256 orang)		20.250.000	1.195.000	21.445.000	sisa kontrak perlengkapan peserta, mamin kegiatan, sewa sarana mobilitas darat, perjalanan dinas dalam daerah dan uang saku
34.	Pemeliharaan Lingkungan Hidup	100%	810.000.000	702.293.040	86,70	100%	95,83	106.706.960	1.000.000	107.706.960	
	1. Penyusunan data dan informasi keanekaragaman hayati	1 dokumen	17.170.000	17.170.000	100,00	1 dokumen		-		-	
	2. Pembentukan Pusat Mangrove Prov. Banten	3 dokumen	186.050.000	81.429.500	43,77	3 dokumen		104.620.500		104.620.500	Pembentukan Mangrove Center dikarenakan MOU antara Pemprov dan Pemkot Serang belum tertandatangani
	3. Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	3 lokasi	25.000.000	24.700.000	98,80	3 lokasi			300.000	300.000	sisa kontrak
	4. Pemantauan dan Pengawasan Pemanfaatan SDA	3 lokasi	15.000.000	14.800.000	98,67	3 lokasi			200.000	200.000	sisa kontrak
	5. Pembinaan Adaptasi dan Migrasi Perubahan Iklim	22 desa	468.150.000	465.868.500	99,51	22 desa		1.981.500	500.000	2.481.500	sisa kontrak, perlengkapan peserta, uang saku, mamin, perjadin,
	6. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi GRK Sektor Limbah	2 dokumen	98.630.000	98.325.040	99,69	2 dokumen		104.960		104.960	sisa transport
35.	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	100%	1.654.000.000	1.579.144.695	95,47	100%	100	59.677.705	15.177.600	74.855.305	

	1. Pembinaan Pengelolaan Sampah	8 lembaga	1.404.000.000	1.350.530.337	96,19	8 lembaga		38.676.063	14.793.600	53.469.663	sisa kontrak, belanja jasa kebersihan, perjalanan dinas luar daerah, uang saku, promosi dan publikasi, sewa sarana mobilitas darat, belanja BBM.
	2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanganan Sampah dan Limbah B3	1 dokumen	100.000.000	97.661.000	97,66	1 dokumen		1.955.000	384.000	2.339.000	perjalanan dinas luar daerah dan uang saku
	3. Pemantauan dan Pembinaan Pengelolaan Limbah B3	100 industri	150.000.000	130.953.358	87,30	100 industri		19.046.642		19.046.642	belanja perjalanan dinas dalam daerah
36.	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	503.000.000	497.851.300	98,98	100%	100	1.463.500	3.685.200	5.148.700	
	1. Pemantauan Kualitas Air (Sungai, Laut, Danau)	1 Laut	122.286.000	121.592.500	99,43	1 Laut		205.500	488.000	693.500	sisa kontrak dan sisa sewa perahu
	2. Pemantauan Kualitas Udara Ambien	32 lokasi	128.500.000	127.586.300	99,29	32 lokasi		894.500	19.200	913.700	sisa kontrak dan sisa transport
	3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	1 dokumen	140.000.000	136.830.000	97,74	1 dokumen			3.170.000	3.170.000	sisa kontrak
	4. Pembinaan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Terhadap Pelaku Usaha Kegiatan	30 industri	102.414.000	102.052.000	99,65	30 industri		354.000	8.000	362.000	sisa kontrak, perijin
	5. Pemantauan Kerusakan Situ/Danau	1 dokumen	9.800.000	9.790.500	99,90	1 dokumen		9.500		9.500	sisa transport
37.	Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan	100%	275.000.000	260.514.426	94,73	100%	100	14.421.474	64.100	14.485.574	
	1. Akreditasi/ Surveilans Laboratorium Lingkungan	25 parameter / 1 dokumen	106.280.000	103.697.622	97,57	25 parameter / 1 dokumen		2.195.878	64.100	2.259.978	Sisa Transport, sewa penginapan
	2. Pembinaan Jaminan Mutu Lab. Lingkungan	100 orang	168.720.000	156.816.804	92,95	100 orang		12.225.596		12.225.596	Sisa Transport narasumber, uang saku dan penginapan
38.	Pengujian dan Analisa Laboratorium Lingkungan	100%	682.900.000	653.594.222	95,71	100%	100	4.417.578	24.888.200	29.305.778	
	1. Pengujian dan Analisa Sample Uji	174 sampel	644.785.000	617.410.222	95,75	174 sampel		2.486.578	24.888.200	27.374.778	efisiensi kontrak, sisa transport
	2. Pembinaan Pengujian dan Analisa Lab. Lingkungan	2 kali	38.115.000	36.184.000	94,93	2 kali		1.931.000		1.931.000	Sisa Transport Narasumber, sisa transport perjalanan dinas
39.	Pemanfaatan hutan dan penatausahaan hasil hutan	100%	725.000.000	717.570.000	98,98	100%	100	4.620.000	2.810.000	7.430.000	

	1. Pengelolaan Usaha Hutan Rakyat Berbasis Industri	10 kelompok	547.370.000	540.820.000	98,80	10 kelompok		3.750.000	2.800.000	6.550.000	Sisa Kontrak, sisa perjalanan dinas dan sisa narasumber
	2. Penatausahaan Hasil Hutan	3 dokumen	177.630.000	176.750.000	99,50	3 dokumen		870.000	10.000	880.000	Sisa Kontrak, sisa perjalanan dinas dan sisa narasumber
40.	Perencanaan dan Penatagunaan Hutan	100%	515.000.000	508.243.227	98,69	100%	100	6.266.773	490.000	6.756.773	
	1. Perencanaan Hutan	6 dokumen	376.750.000	371.664.700	98,65	6 dokumen		4.595.300	490.000	5.085.300	sisa kontrak, perjadi, narasumber
	2. Pemantapan Kawasan Hutan	6 kawasan	138.250.000	136.578.527	98,79	6 kawasan		1.671.473		1.671.473	sisa perjadi, narsum
41.	Pengembangan Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan	100%	606.250.000	594.167.500	98,01	100%	100	3.082.500	9.000.000	12.082.500	
	1. Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan	2 kelompok	198.127.000	197.213.000	99,54	2 kelompok		614.000		614.000	sisa transport Perjalanan Dinas
	2. Pengembangan Kawasan Bambu Terpadu	75 orang	67.388.000	65.340.000	96,96	75 orang		2.348.000	-	2.348.000	sisa transport Perjalanan Dinas
	3. Promosi Anke Usaha Kehutanan	2 event	340.735.000	331.614.500	97,32	2 event		120.500	9.000.000	9.120.500	sisa kontrak dekorasi pameran
42.	Konservasi SDA dan Ekosistem	100%	600.000.000	593.685.807	98,95	100%	100	2.592.860	3.721.333	6.314.193	
	1. Pemulihan kawasan konservasi (Luar Kawasan) yang terdegradasi	1 unit	62.995.000	61.383.500	97,44	1 unit		401.500	1.210.000	1.611.500	Sisa Perjalanan Dinas dan Sisa Kontrak
	2. Pembinaan Lembaga Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar	1 unit	15.226.000	15.153.000	99,52	1 unit		573.000		573.000	Sisa Perjalanan Dinas
	3. Pengelolaan Data dan informasi Kawasan Ekosistem Esensial	1 dokumen	21.741.000	21.398.000	98,42	1 dokumen		343.000		343.000	Sisa Perjalanan Dinas
	4. Pembinaan Masyarakat Daerah Penyangga Kawasan Konservasi	8 kelompok	409.726.000	406.686.707	99,26	8 kelompok		270.000	2.319.333	2.589.333	Sisa Perjalanan Dinas dan Sisa Kontrak
	5. Perencanaan Pemantapan Taman Kehati Banten	1 dokumen	50.000.000	49.808.000	99,62	1 dokumen			192.000	192.000	Sisa Kontrak
	6. Perencanaan Pembentukan Lembaga Konservasi Eksitu	1 dokumen	40.312.000	39.256.600	97,38	1 dokumen		1.005.360		1.005.360	Sisa Perjalanan Dinas
43.	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	100%	650.000.000	626.425.600	96,37	100%	100	23.113.400	461.000	23.574.400	
	1. Penyusunan Data dan Informasi Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1 dokumen	25.000.000	25.000.000	100,00	1 dokumen		-		-	

	2. Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan Kab. Serang, Pdg, Lebak	40 kelompok	375.090.000	362.161.500	96,55	40 kelompok		12.467.500	461.000	12.928.500	Belanja bahan percontohan (sisa Kontrak), belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah, belanja narasumber
	3. Peningkatan Kapasitas SDM dan Pembinaan Kader Konservasi dan Pecinta Alam	100 orang	51.730.000	48.820.000	94,37	100 orang		2.910.000		2.910.000	belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah, honor narasumber
	4. Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	138 orang	193.180.000	186.447.100	96,51	138 orang		6.732.900		6.732.900	belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah, honor narasumber
	5. Peningkatan Peran Serta dan usaha ekonomi Produktif kehutanan di sekitar hutan	5 kelompok	5.000.000	3.997.000	79,94	5 kelompok		1.003.000		1.003.000	belanja perjalanan dinas dalam daerah
44.	Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (DAK)	100%	1.407.545.000	1.396.086.000	99,19	100%	100	-	11.459.000	11.459.000	
	1. Pengembangan Hutan Rakyat	500 Hektar	1.407.545.000	1.396.086.000	99,19	500 Hektar			11.459.000	11.459.000	Sisa kontrak/efisiensi
45.	Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	100%	900.000.000	861.882.760	95,76	100%	100	34.949.240	3.168.000	38.117.240	
	1. Perencanaan Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Lahan	1 dokumen	50.000.000	49.940.000	99,88	1 dokumen			192.000	192.000	sisa kontrak
	2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Fungsi Lindung dan Gerakan Penanaman Pohon	2 Hektar	600.000.000	562.782.760	93,80	2 Hektar		34.949.240	1.970.000	36.919.240	Sisa Kontrak, Narasumber , ceremonial HMPI
	3. Rehabilitasi Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)	1 DAS	100.000.000	100.000.000	100,00	1 DAS		-	166.000	166.000	sisa kontrak
	4. Penghijauan Lingkungan mendukung Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1400 batang	100.000.000	99.160.000	99,16	1400 batang			840.000	840.000	sisa kontrak
	5. Pembinaan Forum DAS	2 forum	50.000.000	50.000.000	100,00	2 forum		-	-	-	
46.	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	100%	742.465.000	706.473.998	95,15	100%	100	10.559.677	25.431.325	35.991.002	
	1. Penyediaan Bibit Tanaman Hutan dan MPTS	125000 batang	516.120.000	487.228.998	94,40	125000 batang		3.459.677	25.431.325	28.891.002	Efisiensi Kontrak, Akomodasi tiket pesawat
	2. Penelusuran Sumber Benih unggul	1 unit	50.000.000	43.900.000	87,80	1 unit		6.100.000	-	6.100.000	efisiensi dari anggaran akomodasi
	3. Pembinaan Pengelolaan Perbenihan tanaman hutan dan MPTS	90 orang	65.495.000	64.495.000	98,47	90 orang		1.000.000		1.000.000	honor narasumber

	4. Identifikasi Tanaman Hutan Endemik Banten	1 jenis	44.000.000	44.000.000	100,00	1 jenis		-		-	
	5. Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Tanaman Hutan Unggul	3 unit	36.880.000	36.880.000	100,00	3 unit		-		-	
	6. Monitoring dan Evaluasi enyaluran Bibit Tanaman Kehutanan dan MPTS	8 kab/kota	29.970.000	29.970.000	100,00	8 kab/kota		-		-	
47.	Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih Tanaman Hutan	100%	160.000.000	157.277.920	98,30	100%	100	2.722.080	-	2.722.080	
	1. Sertifikasi Bibit atau Benih Tanaman Hutan dan MPTS	10500 batang	65.450.000	62.727.920	95,84	10500 batang		2.722.080		2.722.080	Sisa penginapan dan transport
	2. Pembinaan Pengada, Pengedar Benih/ Bibit Tanaman Hutan	30 orang	26.501.000	26.501.000	100,00	30 orang		-		-	
	3. Pengawasan Benih Tanaman Hutan	5 jenis benih	38.959.000	38.959.000	100,00	5 jenis benih		-		-	
	4. Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Benih Tanaman Kehutanan	5 orang	20.721.000	20.721.000	100,00	5 orang		-		-	
	5. Penyediaan Srana Prasarana Sertifikasi Benih atau Bibit Tanaman Hutan	2 unit	8.369.000	8.369.000	100,00	2 unit		-		-	
48.	Perlindungan dan Rehabilitasi Tahura Banten	100%	271.000.000	269.005.000	99,26	100%	100	980.000	1.015.000	1.995.000	
	1. Perlindungan Kawasan Tahura	5%	91.000.000	90.020.000	98,92	5%		980.000		980.000	sisa transport perjalanan dinas
	2. Rehabilitasi Kawasan Tahura	12,5 Hektar	150.000.000	148.985.000	99,32	12,5 Hektar			1.015.000	1.015.000	Sisa kontrak belanja bibit
	3. Penyediaan Koleksi Spesies Lokal/ Endemik / Langka/ Terancam Punah	1 dokumen	30.000.000	30.000.000	100,00	1 dokumen		-		-	
49.	Pengembangan dan Pemanfaatan Tahura Banten	100%	361.000.000	332.701.598	92,16	100%	100	7.808.000	20.490.402	28.298.402	
	1. Peningkatan Kunjungan Tahura	39500 orang	80.000.000	78.795.500	98,49	39500 orang			1.204.500	1.204.500	sisa kontrak belanja konsultansi perencanaan pembuatan profile tahura

	2. Sarana dan Prasarana Pemanfaatan Wisata	3 dokumen	281.000.000	253.906.098	90,36	3 dokumen		7.808.000	19.285.902	27.093.902	sisa kontrak konsultasi Perencanaan Penyusunan DED Puteran, Perencanaan Penyusunan Site plan Curug Gendang transport perjalanan dinas, pengadaan bangunan gedung untuk pos jaga, pembuatan billboard
50.	Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	100%	325.000.000	301.195.000	92,68	100%	100	22.885.000	920.000	23.805.000	
	1. Penyusun Perencanaan dan Rancangan Teknis	23 dokumen	125.000.000	124.080.000	99,26	23 dokumen			920.000	920.000	sisa kontrak
	2. Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu	1 dokumen	153.000.000	137.495.000	89,87	1 dokumen		15.700.000		15.700.000	sisa perjalanan dinas, narasumber, belanja penggandaan
	3. Pengawasan dan Pengendalian Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak dilindungi	1 dokumen	47.000.000	39.620.000	84,30	1 dokumen		7.185.000		7.185.000	sisa perjalanan dinas, belanja penggandaan
51.	Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	100%	1.478.716.000	1.434.005.584	96,98	100%	100	3.340.000	41.370.416	44.710.416	
	1. Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	24 kelompok	1.073.780.000	1.039.609.089	96,82	24 kelompok			34.170.911	34.170.911	sisa kontrak
	2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan	5 kelompok	237.876.000	230.676.495	96,97	5 kelompok			7.199.505	7.199.505	sisa kontrak
	3. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan	4 dokumen	167.060.000	163.720.000	98,00	4 dokumen		3.340.000		3.340.000	Narasumber ess II diganti ess III, efisiensi makan dan minum
52.	Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	100%	380.600.000	364.935.000	95,88	100%	100	14.300.000	1.365.000	15.665.000	
	1. Penyusunan Perencanaan dan Rancangan Teknis	20 dokumen	96.100.000	94.840.000	98,69	20 dokumen		700.000	1.140.000	1.840.000	sisa kintrak dan perjalanan dinas
	2. Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu	40 industri	46.900.000	46.700.000	99,57	40 industri				-	
	3. Pengawasan dan Pengendalian Industri Kehutanan	40 industri	103.140.000	96.465.000	93,53	40 industri		4.900.000	125.000	5.025.000	Sisa Anggaran Perjalanan Dinas dan Honor Narasumber

	4. Pengawasan dan Pengendalian peredaran pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidakdilindungi	40 penangkar	33.290.000	28.480.000	85,55	40 penangkar		5.410.000		5.410.000	Sisa Anggaran Perjalanan Dinas dan Honor Narasumber
	5. Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan Hutan	40 orang	54.270.000	52.080.000	95,96	40 orang		3.120.000		3.120.000	Sisa Anggaran Perjalanan Dinas dan Honor Narasumber
	6. Pengawasan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	40 orang	46.900.000	46.370.000	98,87	40 orang		170.000	100.000	270.000	Sisa kontrak, Perjalanan Dinas
53.	Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	100%	1.154.400.000	1.108.173.800	96,00	100%	100	1.310.000	44.916.200	46.226.200	
	1. Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	640.000 bibit	800.000.000	760.386.000	95,05	640.000 bibit			38.304.000	38.304.000	Sisa Kontrak
	2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan	4 KTH	320.000.000	313.387.800	97,93	4 KTH			6.612.200	6.612.200	Sisa Kontrak
	3. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan	12 bulan	34.400.000	34.400.000	100,00	12 bulan		1.310.000		1.310.000	sisa perjalanan dinas
JUMLAH			68.885.813.000	65.410.876.021	94,96		99,92	3.098.815.152	376.121.827	3.474.936.979	

B. Analisis Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2019

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2017-2022. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten di tahun 2019, maka diperoleh capaian kinerja sebagaimana pada tabel 2.3, Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja eselon II DLHK Provinsi Banten Tahun 2019

PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	Target Thn 2 (2019)	Realisasi	Pencapaian (%)	Ket
Tata Kelola Pemerintahan	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten (Satuan : Nilai)	75	80,06	106,75%	
Pengendalian Pencemaran Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Satuan : Nilai)	44,67	56,86	127,29%	
Pengelolaan dan konservasi Hutan	Rasio Cakupan Tutupan Hutan (Satuan : %)	31,71	39,53	124,66 %	

Tabel 2.4
Pengukuran Kinerja Esselon III DLHK Provinsi Banten Tahun 2019

No	Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian
1	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai IKM (satuan : skala (1-4))	3,00	3,34	111,333
2	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Air (Satuan : Nilai)	52,00	52,07	100,135
			Indek Kualitas Udara (Satuan : Nilai)	59,20	73,35	123,902
			Peningkatan Peran serta	60,00	62,00	103,333

			masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Satuan : Kelompok)			
3	Pengelolaan dan Konservasi Hutan	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan perlindungan hutan	Luas Lahan kritis yang terehabilitasi (satuan: Ha)	5000	7.297	145,94
			Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat (satuan : %)	10	11,58	115,8

Tabel 2.5
Pengukuran Kinerja Esselon IV DLHK Provinsi Banten Tahun 2019

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan			Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
				Uraian	Indikator Kinerja	Target		DOK	%
1	Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja Pemerintah	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten (satuan : nilai)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan		75	13.672.937.000	-	-
		Nilai IKM (satuan: nilai)				3,00		3,34	111.33
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	18 dokumen		18 dokumen	100
					1 Penyusunan Dokumen Evaluasi Program dan Kegiatan	3 dokumen		3 dokumen	100
					2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	10 dokumen		10 dokumen	100
					3 Penyusunan Dokumen Laporan Evaluasi dan Pengendalian	5 dokumen		5 dokumen	100

				Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	27 dokumen	64.000.000	27 dokumen	100		
					1	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	22 dokumen	32.765.000	22 dokumen	100	
					2	Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3 dokumen	16.379.000	3 dokumen	100	
					3	Penusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	2 dokumen	14.856.000	2 dokumen	100	
					Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	Tersedianya Data Pembangunan Sektoral	4 dokumen	168.000.000	4 dokumen	100	
						1	Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah	1 dokumen	4.800.000	1 dokumen	100
						2	Pengelolaan PPID	1 dokumen	70.800.000	1 dokumen	100
						3	Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	1 dokumen	57.750.000	1 dokumen	100
						4	Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial	1 dokumen	34.650.000	1 dokumen	100
				Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor	1 unit, 37 meter	481.000.000	1 unit, 37 meter	100		
					1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 unit, 37 meter	481.000.000	1 unit, 37 meter	100	
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	12 bulan	1.665.516.000	12 bulan	100		
					1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	42 unit	500.000.000	42 unit	100	

					2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	7 paket, 185 unit	1.165.516.000	7 paket, 185 unit	100
						Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran, Satuan	12 bulan	6.291.321.000	12 bulan	100
					1	Operasional Kantor Tidak Tetap	272 orang	4.689.510.000	272 orang	100
					2	Penyediaan Barang Pakai Habis	12 bulan	286.687.500	12 bulan	100
					3	Penyediaan Bahan Cetak	12 bulan	108.881.500	12 bulan	100
					4	Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 bulan	168.570.000	12 bulan	100
					5	Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12 bulan	691.800.000	12 bulan	100
					6	Penyediaan BBM	12 bulan	333.372.000	12 bulan	100
					7	Promosi dan Publikasi	12 bulan	12.500.000	12 bulan	100
						Meningkatnya Kapasitas Aparatur	12 bulan	113.000.000	12 bulan	100
					1	Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	12 bulan	3.000.000	12 bulan	100
					2	Peningkatan Kompetensi Aparatur	12 bulan	110.000.000	12 bulan	100
						Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	12 bulan	200.000.000	12 bulan	100
					1	Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100
					2	Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100

				Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	12 bulan	30.000.000	12 bulan	100
					1 Pengelolaan Kearsipan	12 bulan	30.000.000	12 bulan	100
				Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada UPT laboratorium Lingkungan	17 unit	1.137.021.400	17 unit	100
					1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17 unit	1.137.021.400	17 unit	100
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan	12 bulan	609.925.000	12 bulan	100
					1 Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung/ Kantor	12 bulan	6.000.000	12 bulan	100
					2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12 bulan	75.700.000	12 bulan	100
					3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK/Laboratorium	12 bulan	528.225.000	12 bulan	100
				Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium Lingkungan	Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium Lingkungan	12 bulan	457.353.600	12 bulan	100
					1 Operasional Perkantoran	12 bulan	226.500.000	12 bulan	100
					2 Penyediaan Barang Habis Pakai	12 bulan	143.651.800	12 bulan	100
					3 Penyediaan Bahan Cetak	12 bulan	3.933.800	12 bulan	100
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 bulan	15.300.000	12 bulan	100

					5	Penyediaan BBM	12 bulan	67.968.000	12 bulan	100
				Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPT Laboratorium Lingkungan		Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	12 bulan	20.000.000	12 bulan	100
					1	Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 bulan	10.650.000	12 bulan	100
					2	Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12 bulan	9.350.000	12 bulan	100
				Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan		Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	5 unit	50.000.000	5 unit	100
					1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5 unit	50.000.000	5 unit	100
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantoran pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	12 bulan	120.000.000	12 bulan	100
					1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12 bulan	66.900.000	12 bulan	100
					2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 bulan	53.100.000	12 bulan	100
				Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan		Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	12 bulan	194.360.000	12 bulan	100

					1	Penyediaan Barang Habis Pakai	12 bulan	20.000.000	12 bulan	100
					2	Penyediaan Bahan Cetak	12 bulan	5.032.000	12 bulan	100
					3	Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 bulan	54.200.000	12 bulan	100
					4	Penyediaan BBM	12 bulan	40.128.000	12 bulan	100
					5	Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12 bulan	75.000.000	12 bulan	100
				Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan		Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	12 bulan	25.640.000	12 bulan	100
					1	Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 bulan	12.800.000	12 bulan	100
					2	Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12 bulan	12.840.000	12 bulan	100
				Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang		Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	40 unit	107.700.000	40 unit	100
					1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	40 unit	107.700.000	40 unit	100
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantoran pada Balai Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	12 bulan	110.100.000	12 bulan	100

					1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 bulan	30.000.000	12 bulan	100
					2	Pemeliharaan kendaraan dinas	12 bulan	80.100.000	12 bulan	100
				Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang		Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	12 bulan	460.000.000	12 bulan	100
					1	Penyediaan Barang Cetak	12 bulan	12.936.000	12 bulan	100
					2	Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 bulan	67.200.000	12 bulan	100
					3	Penyediaan barang habis Pakai	12 bulan	62.920.000	12 bulan	100
					4	Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12 bulan	252.000.000	12 bulan	100
					5	Penyediaan BBM	12 bulan	64.944.000	12 bulan	100
				Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang		Terlaksannnya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	12 bulan	55.000.000	12 bulan	100
					1	Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 bulan	17.750.000	12 bulan	100
					2	Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12 bulan	37.250.000	12 bulan	100
				Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang,		Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	8 Unit	70.000.000	8 Unit	100

				Serang dan Cilegon							
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantoran pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8 unit	70.000.000	8 unit	100	
						Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	12 bulan	130.000.000	12 bulan	100	
					1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 bulan	23.150.000	12 bulan	100	
					2	Pemeliharaan Kendaraan Operasional	12 bulan	76.850.000	12 bulan	100	
					3	Pemeliharaan Gedung/ Kantor/ Tempat Kerja	12 bulan	30.000.000	12 bulan	100	
				Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon		Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	12 bulan	325.000.000	12 bulan	100	
					1	Penyediaan Bahan Cetak	12 bulan	11.250.000	12 bulan	100	
					2	Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 bulan	19.200.000	12 bulan	100	
					3	Penyediaan Bahan Pakai Habis	12 bulan	88.150.000	12 bulan	100	
					4	Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12 bulan	206.400.000	12 bulan	100	

				Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten (TAHURA)	Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten (TAHURA)	12 bulan	138.000.000	12 bulan	100	
					1	Oprasional Kantor Tidak Tetap	12 bulan	10.500.000	12 bulan	100
					2	Penyediaan Barang Habis Pakai	12 bulan	17.083.500	12 bulan	100
					3	Penyediaan Bahan Cetak	12 bulan	8.720.400	12 bulan	100
					4	Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 bulan	17.100.000	12 bulan	100
					5	Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12 bulan	25.500.000	12 bulan	100
					6	Penyediaan BBM	12 bulan	59.096.100	12 bulan	100
2	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan : %)		Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten (TAHURA)	Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten (TAHURA)	12 bulan	20.000.000	12 bulan	100	
					1	Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 bulan	8.840.000	12 bulan	100
					2	Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12 bulan	11.160.000	12 bulan	100
							44,67		56,,86	127,29
		Indeks Kualitas Air (Satuan: Nilai)	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup				52,00		52,07	100,35
		Indeks Kualitas Udara (Satuan: Nilai)					59,20	5.354.900.000	73,35	123,902

					Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara serta tersusunnya kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	100%	503.000.000	100%	100
						1 Pemantauan Kualitas Air (Sungai, Danau, Laut)	1 Laut	122.286.000	1 Laut	100
						2 Pemantauan Kualitas Udara Ambient	32 lokasi	128.500.000	32 lokasi	100
						3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	1 dokumen	140.000.000	1 dokumen	100
						4 Pembinaan pengendalian pencemaran dan Perusakan terhadap pelaku usaha kegiatan	30 industri	102.414.000	30 industri	100
						5 Pemantauan Kerusakan Situ/Danau	1 dokumen	9.800.000	1 dokumen	100
					Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Terlaksananya Pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3	100%	1.654.000.000	Lembaga/dok/industri	100
						1 Pembinaan Pengelolaan Sampah	8 lembaga	1.404.000.000	8 lembaga	100
						2 Penyusunan dokumen perencanaan penanganan sampah dan limbah B3	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100
						3 Pemantauan dan pembinaan pengelola Limbah B3	100 industri	150.000.000	100 industri	100
					Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Terlaksannanya pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati serta evaluasi dan pelaporan emisi GRK sektor limbah	100%	810.000.000	100%	95.83

					1	Penyusunan data dan informasi keanekaragaman hayati	1 dokumen	17.170.000	1 dokumen	100
					2	Pembentukan Pusat Mangrove provinsi Banten	3 dokumen	186.050.000	3 dokumen	75
				Peningkatan Jaminan Mutu Laboratoruim Lingkungan	3	Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konserrvasi keanekaragaman hayati	3 lokasi	25.000.000	3 lokasi	100
					4	pemantauan dan pengawasan pemanfaatan SDA	3 lokasi	15.000.000	3 lokasi	100
					5	Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (kampung Iklim)	22 desa	468.150.000	22 desa	100
					6	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan emisi GRK sektor limbah	2 dokumen	98.630.000	2 dokumen	100
					Terlaksananya pembinaan jaminan mutu Laboratorium Lingkungan melalui Uji Profisiensi sebanyak 40 parameter		100%	275.000.000	100%	100
					1	Akreditasi/surveilan laboratorium lingkungan	25 parameter / 1 dokumen	106.280.000	25 parameter / 1 dokumen	100
					2	Pembinaan jaminan mutu laboratorium lingkungan	100 orang	168.720.000	100 orang	100
					Terlaksananya pembinaan pengujian dan analisa laboratorium lingkungan melalui uji dan analisa sample uji		100%	682.900.000	100%	100
					1	Pengujian dan Analisa Sample Uji	174 sampel	644.785.000	174 sampel	100
					2	Pembinaan Pengujian dan analisa laboratorium lingkungan	2 kali	38.115.000	2 kali	100
							60,00		62	103,33

		masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Satuan : Kelompok)		Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	100%	330.000.000	100%	100
					1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis	1 dokumen	100.550.000	1 dokumen	100
					2 Penyusunan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan kinerja pengelolaan lingkungan	5 dokumen	193.950.000	5 dokumen	100
					3 Pembinaan tata laksana penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan	2 dokumen	35.500.000	2 dokumen	100
				Pelayanan Pengaduan dan penegakan Hukum LHK	Terlaksananya tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat pencemaran dan perusakan LH serta pengawasan thd usaha yang memiliki ijin Lingkungan	100%	355.000.000	100%	100
					1 Penanganan kasus-kasus akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan kehutanan	100%	276.455.000	100%	100
					2 Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan	100 usaha/ industri	78.545.000	100 usaha/ industri	100
				Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Terlaksananya pembinaan pada sekolah, pemerhati lingkungan dan MHA serta penilaian kota berwawasan lingkungan	100%	745.000.000	100%	100
					1 Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya lingkungan	25 sekolah	319.035.000	25 sekolah	100

3	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan perlindungan hutan	Rasio Cakupan Tutupan Hutan (satuan : %) (satuan: Ha)	Luas Lahan kritis yang terehabilitasi (satuan: Ha)	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan	Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2	Pembinaan dan penilaian Kota berwawasan lingkungan di provinsi Banten	7 kab/kota	38.950.000	7 kab/kota	100
						3	Pembinaan pada pemerhati Lingkungan dan Masyarakat Hukum Adat	2 saka (stuan karya) / 8 kwarcab (256 orang)	387.015.000	2 saka (stuan karya) / 8 kwarcab (256 orang)	100
								31,71		39,53	124,66
								5000	10.276.976.000	7.297	145,94
							Terlaksananya pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Lahan	100%	900.000.000	100%	100
						1	perencanaan pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Lahan	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	100
						2	Rehabilitasi hutan dan lahan kawasan fungsi lindung dan gerakan penanaman pohon	2 Hektar	600.000.000	2 Hektar	100
						3	Rehabilitasi wilayah Daerah aliran Sungai (DAS)	1 DAS	100.000.000	1 DAS	100
						4	Penghijauan Lingkungan mendukung Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1400 batang	100.000.000	1400 batang	100
						5	Pembinaan Forum DAS	2 forum	50.000.000	2 forum	100

					Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	Terpilihkannya kawasan konservasi (luar kawasan hutan) yang terdegradasi	100%	600.000.000	100%	100	
					1	Pemulihan Kawasan Konservasi (Luar Kawasan) yang Terdegradasi	1 unit	62.995.000	1 unit	100	
					2	Pembinaan lembaga konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar	1 unit	15.226.000	1 unit	100	
					3	Pengelolaan Data dan Informasi Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial	1 dokumen	21.741.000	1 dokumen	100	
					4	Pembinaan Masyarakat Daerah Penyangga Kawasan Konservasi	8 kelompok	409.726.000	8 kelompok	100	
					5	Perencanaan Penetaan Taman Kehati Banten	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	100	
					6	Perencanaan Pembentukan Lembaga Konservasi Ex Situ	1 dokumen	40.312.000	1 dokumen	100	
					Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat		Terlaksananya peningkatan usaha dan peran serta masyarakat dalam konservasi SDA	100%	650.000.000	100%	100
					1	Penyusunan Data dan Informasi Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	100	
					2	Pengembangan Kelembagaan Dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan Kab.Serang, Pandeglang, Lebak	40 kelompok	375.090.000	40 kelompok	100	
					3	Peningkatan Kapasitas SDM dan Pembinaan Kader Konservasi Dan Pencinta Alam	100 orang	51.730.000	100 orang	100	
					4	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	138 orang	193.180.000	138 orang	100	

					5	Peningkatan Peran Serta dan Usaha Ekonomi Produktif Kehutanan di Sekitar Hutan	5 kelompok	5.000.000	5 kelompok	100
				Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan		100%	742.465.000	100%	100
					1	Penyediaan bibit tanaman hutan dan MPTS	125000 batang	516.120.000	125000 batang	100
					2	Penelusuran Sumber Benih Unggul	1 unit	50.000.000	1 unit	100
					3	Pembinaan Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hutan dan MPTS	90 orang	65.495.000	90 orang	100
					4	Identifikasi Tanaman Hutan Endemik Banten	1 jenis	44.000.000	1 jenis	100
					5	Pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber benih tanaman hutan unggul	3 unit	36.880.000	3 unit	100
					6	Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bibit Tanaman Kehutanan dan MPTS	8 kab/kota	29.970.000	8 kab/kota	100
				Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih Tanaman Hutan	Terlaksananya Pengawasan dan Sertifikasi Bibit/Benih Tan. Kehutanan		100%	160.000.000	100%	100
					1	Sertifikasi Bibit atau benih Tanaman Hutan dan MPTS	10500 batang	65.450.000	10500 batang	100
					2	Pembinaan Pengada, Pengedar Benih/Bibit Tanaman Hutan	30 orang	26.501.000	30 orang	100
					3	Pengawasan Benih Tanaman Hutan	5 jenis benih	38.959.000	5 jenis benih	100
					4	Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Benih Tanaman Kehutanan	5 orang	20.721.000	5 orang	100
					5	Penyediaan Sarana Prasarana Sertifikasi Benih atau Bibit Tanaman Hutan	2 unit	8.369.000	2 unit	100
				Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya	Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Pandeglang		100%	325.000.000	100%	100

				Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	1	Penyusunan Perencanaan dan Rancangan Teknis	23 dokumen	125.000.000	23 dokumen	100				
					2	Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu	1 dokumen	153.000.000	1 dokumen	100				
					3	Pengawasan dan Pengendalian Tumbuhan dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi	1 dokumen	47.000.000	1 dokumen	100				
					Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Serang dan Cilegon		100%	1.478.716.000	100%	100				
					1	Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	24 kelompok	1.073.780.000	24 kelompok	100				
					2	Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan	5 kelompok	237.876.000	5 kelompok	100				
					3	Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan	4 dokumen	167.060.000	4 dokumen	100				
					Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Lebak		100%	380.600.000	100%	100				
					1	Penyusunan Perencanaan dan Rancangan Teknis	20 dokumen	96.100.000	20 dokumen	100				
				2	Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu	40 industri	46.900.000	40 industri	100					
				3	Pengawasan dan Pengendalian Industri Kehutanan	40 industri	103.140.000	40 industri	100					
				4	Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi	40 penangkar	33.290.000	40 penangkar	100					
				5	Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan Hutan	40 orang	54.270.000	40 orang	100					
				Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang										

					6	Pengawasan dan Pengendalian Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	40 orang	46.900.000	40 orang	100
				Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Tangerang		100%	1.154.400.000	100%	100
				Rehabilitasi lahan dan Perhutanan Sosial (DAK)	1	Pengembangan Hutan Rakyat	640.000 bibit	800.000.000	640.000 bibit	100
					2	Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar Hutan	4 KTH	320.000.000	4 KTH	100
					3	Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan	12 bulan	34.400.000	12 bulan	100
					Terlaksananya rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial		100%	1.407.545.000	100%	100
				Perencanaan dan Penatagunaan Hutan	1	Pengembangan Hutan Rakyat	500 Hektar	1.407.545.000	500 Hektar	100
							10		11.58	115,8
					Tersusunnya dokumen perencanaan dan pemantapan kawasan hutan		100%	515.000.000	100%	100
					1	Perencanaan hutan	6 dokumen	376.750.000	6 dokumen	100
				Pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan	2	Pemantapan Kawasan Hutan	6 kawasan	138.250.000	6 kawasan	100
					Terlaksananya penatausahaan hasil hutan yang lestari		100%	725.000.000	100%	100
					1	Pengelolaan Usaha Hutan Rakyat Berbasis Industri	10 kelompok	547.370.000	10 kelompok	100
					2	Penatausahaan Hasil Hutan	3 dokumen	177.630.000	3 dokumen	100

				Pengembangan Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan	Terlaksananya pengembangan dan promosi aneka usaha kehutanan	100%	606.250.000	100%	100
					1 Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan	2 kelompok	198.127.000	2 kelompok	100
					2 Pengembangan Kawasan Bambu Terpadu	75 orang	67.388.000	75 orang	100
					3 Promosi Aneka Usaha Kehutanan	2 event	340.735.000	2 event	100
				Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan TAHURA	Terlaksananya perlindungan kawasan TAHURA dan Rehabilitasi kawasan TAHURA	100%	271.000.000	100%	100
					1 Perlindungan kawasan tahura	5%	91.000.000	5%	100
					2 Rehabilitasi kawasan tahura	12,5 Hektar	150.000.000	12,5 Hektar	100
					3 Penyediaan koleksi species lokal/endemik/langka/terancam punah	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	100
				Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan TAHURA	Terbangunnya sarana dan prasarana fasilitas pemanfaatan wisata	100%	361.000.000	100%	100
					1 Peningkatan Kunjungan TAHURA	39500 orang	80.000.000	39500 orang	100
					2 Sarana dan prasarana fasilitas pemanfaatan Wisata	3 dokumen	281.000.000	3 dokumen	100
JUMLAH							29.304.813.000		99.92

Pengukuran atas capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2019 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Program dan kegiatan yang menjadi pendukung terhadap sasaran ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten setiap tahunnya. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai pendukung terhadap pelaksanaan kegiatan lainnya. Baik dari perencanaan, evaluasi dan pelaporan keuangan dan fisik dari seluruh kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan.

Capaian pertama sasaran Laporan Kinerja Pemerintahan Provinsi Banten sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator sasaran Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan program dan kegiatan yang terdapat pada Renstra 2017-2022 nilai target 2019 sebesar 75 akan tetapi perhitungan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Inspektorat nilai realisasinya belum bisa dihitung karena penilaian untuk tahun 2019 dilaksanakan pada awal tahun 2020, dan untuk target tahun 2018 sebesar 70, adapun hasil perhitungan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2018 yang dilakukan Inspektorat Provinsi Banten nilainya sebesar 89,53.

Capaian kedua Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan sasarannya adalah mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas yang terlihat dari indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) di Provinsi Banten. Pada akhir tahun 2019 IKLH Provinsi Banten mencapai 56,86 point ada kenaikan IKLH sebesar $\pm 7,84$ point dibandingkan dengan IKLH tahun 2018 yang mencapai 49,02 point.

Capaian ketiga Rasio Cakupan Tutupan Hutan dengan sasarannya meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan perlindungan hutan dengan indikator Rasio Cakupan Tutupan Hutan. Pada tahun 2019 Rasio Tutupan Hutan adalah 39,53 % terdapat kenaikan $\pm 7,12$ % di bandingkan Pada tahun 2018 dengan nilai Rasio Tutupan Hutan adalah 32,41%.

Program pertama Tata Kelola Pemerintahan dengan Capaian Sasaran Program Meningkatkan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

tergambar dari capaian 1 indikator Yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks kepuasan Masyarakat (IKM : Skala 1-4), capaian pada Tahun 2018 sebesar 3,3. Target tahun 2019 adalah 3,0 dengan capaian sebesar 3,34 atau sebesar 111,13 %.

Setelah dilakukan penghitungan terhadap nilai indeks kepuasan masyarakat berdasarkan masing-masing jenis pelayanan yang terdapat di DLHK Provinsi Banten, selanjutnya dilakukan rekapitulasi dari seluruh perolehan nilai tersebut untuk mengagregasi nilai IKM DLHK Provinsi Banten dengan cara menghitung nilai rata-ratanya, sehingga diperoleh nilai IKM DLHK Provinsi Banten pada tahun 2019 ini adalah sebesar 3,34 atau 83,58 dengan mutu pelayanan berperingkat “B” sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan secara keseluruhan pada DLHK Provinsi Banten tahun ini ini adalah baik.

Kinerja layanan yang paling baik adalah unsur biaya/tarif, kompetensi pelaksana, dan perilaku pelaksana dengan nilai rata-rata per unsur sebesar 3,58 ke atas atau mutu pelayanan berperingkat “A” sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja layanan pada unsur-unsur tersebut sudah sangat baik. Sedangkan unsur pelayanan yang paling rendah adalah unsur waktu pelayanan serta sarana dan prasarana yang masih dinilai kurang baik atau berperingkat “C”. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam gambar berikut :

No.	Unsur Pelayanan	NRR per Unsur	NRR Tertimbang	Mutu Pelayanan
U1	Persyaratan	3.32	0.37	B
U2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	3.16	0.35	B
U3	Waktu Pelayanan	2.99	0.33	C
U4	Biaya/Tarif	3.66	0.41	A
U5	Produk Layanan	3.22	0.36	B
U6	Kompetensi Pelaksana	3.58	0.40	A
U7	Perilaku Pelaksana	3.71	0.41	A
U8	Penanganan Pengaduan dan Saran	3.42	0.38	B
U9	Sarana dan Prasarana	3.04	0.34	C
IKM DLHK Prov. Banten 2019			3.34	B
IKM Konversi DLHK Prov. Banten 2019			83.58	

Gambar 2.1 Rekapitulasi Nilai IKM Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2019

Sumber: pengolahan data, IKM Tahun 2019

Program kedua Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dengan sasaran program Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dengan 3 (tiga) capaian indikator, diantaranya :

1. Meningkatnya Indeks Kualitas Air,

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj).

Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan pada 7 sungai (Cisadane, Cidurian, Cibanten, Cirarab, Cimanceri, Cidanau, Ciujung) yang merupakan sungai utama lintas Kab/Kota. Masing-masing sungai dilakukan pemantauan sebanyak 6 (enam) titik selama 3 (tiga) bulan. Parameter yang dipantau meliputi :TSS, DO, BOD,COD, Total Fosfat, *Fecal Coli*, dan *Total Coliform*.

Berdasarkan hasil analisa laboratorium dan hasil penghitungan indeknya, diperoleh hasil IKA Provinsi Banten tahun 2019 adalah 52,07. Angka tersebut berdasarkan pengklasifikasian peringkat masuk dalam kategori “kurang baik” ($50 \leq IKA \leq 60$).

Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain : penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan pada beberapa sumber air; ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; penggunaan air; serta tingkat erosi dan sedimentasi. Sehingga dalam rangka meningkatkan IKA juga harus bersenergi dengan program dan kegiatan unit internal DLHK yang terkait, OPD lainnya dan Kab/Kota serta pelaku usaha.

Target tahun 2019 sebesar 52,00 point **kondisi Realisasi pada akhir tahun 2019 mencapai 52,07 point**, terdapat kenaikan sekitar $\pm 0,57$ point dibandingkan dengan capaian tahun 2018 **mencapai 51,50 point**.

2. Meningkatnya Indeks Kualitas Udara, IKU (Indeks Kualitas Udara) merupakan alat ukur sederhana berupa angka untuk menginformasikan kualitas udara ambien suatu daerah. IKU diperoleh dari pengolahan data hasil pemantauan kualitas udara.

Pada tahun 2019, DLHK Provinsi melakukan pengambilan sample udara ambien di 8 Kab/Kota pada 4 lokasi (mewakili daerah transportasi, industri, pemukiman, komersial/perkantoran). Kegiatan pengambilan sample udara dilakukan 2 (dua) kali pertahun. Tahap I mewakili musim kemarau dan Tahap II mewakili musim penghujan.

Pengukuran kualitas udara ambien selama satu tahun dengan parameter pencemar udara berupa SO₂ (Sulfur Dioksida) dan NO₂ (Nitrogen Dioksida) menggunakan metode passive sampler bertujuan untuk menyatakan atau menyimpulkan kondisi kualitas udara di Provinsi Banten dalam bentuk Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Banten yang merupakan salah satu komponen dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Berdasarkan hasil analisa laboratorium dan hasil penghitungan indeknya, diperoleh hasil IKU Provinsi Banten tahun 2019 adalah 73,35. Angka tersebut berdasarkan pengklasifikasian peringkat masuk dalam kategori “baik” ($70 < \text{IKU} \leq 80$).

Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Kab/Kota dan instansi terkait.

Target tahun 2019 sebesar 59,20 point **Realisasi pada akhir tahun 2019 mencapai 73,35 point**, terdapat kenaikan sebesar $\pm 14,35$ point dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018 **mencapai 59,00 point**

3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Target Tahun 2019 sebesar 60 Kelompok/Lembaga dengan realisasi yang melebihi dari target tahun 2019 sebesar 62 kelompok/Lembaga ada kenaikan realisasi sebesar 103,33 %.

Berdasarkan hasil realisasi tahun 2019, diketahui bahwa realisasi pencapaian sasaran Kinerja dibandingkan dengan rencana pada tahun 2019 rata-rata mencapai target yang dapat di katagorikan Memuaskan.

Program ketiga meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan perlindungan hutan dengan capaian program :

- a. Luas Lahan Kritis yang terehabilitasi **target pada tahun 2019 sebesar 5.000 Ha dengan realisasi Luas Lahan Kritis yang terehabilitasi sampai dengan akhir tahun 2019 mencapai 7.297 Ha.** Luas Lahan Kritis yang terehabilitasi

target pada tahun pada tahun 2018 5.000 Ha dengan realisasi Luas Lahan Kritis yang terehabilitasi sampai dengan akhir tahun 2018 mencapai 7.990 Ha.

- b. Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat, target pada tahun 2019 mencapai 10 %, Realisasi pada akhir tahun 2019 sebesar 11,58 %, terdapat kenaikan sebesar 1,58 % jika dilihat dari target pada tahun 2019 sebesar 10 %, dengan perhitungan :

Tahun 2019 :

I. Produksi Kayu Bulat

Kebutuhan kayu berdasarkan kapasitas industry terpasang : 1.200.000 M³ /

Tahun Ketersediaan Base Line : 456.000 M³ / Tahun

Target Peningkatan 10% setiap tahun : 45.600 M³ / Tahun

Sehingga target pada setiap akhir tahun : 501.600 M³ / Tahun

Produksi Kayu Rakyat : 107.986,14 M³ / Tahun (sumber Bid. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan)

Kayu bulat dari perum perhutani : 30.973,86 M³ / Tahun (sumber RKT Perum Perhutani)

RPPK (Asumsi Rasio Peningkatan Produksi Kayu)

$$\begin{aligned}
 \text{RPPK} &= \frac{\text{Produksi Kayu Tahun } N}{\text{Kapasitas Terpasang Mesin Industri}} \times 100\% \\
 &= \frac{107.986,14 + 30.973,86}{1.200.000} \times 100\% \\
 &= \frac{138.960}{1.200.000} \times 100\% \\
 &= 11,58 \%
 \end{aligned}$$

Nb : Kapasitas terpasang = Kebutuhan kayu berdasarkan kapasitas produksi th 2019

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

Paradigma baru pelayanan publik menempatkan masyarakat sebagai pengguna jasa dan Pemerintah Daerah pada posisi yang sederajat. Sesuai dengan perannya sebagai abdi masyarakat (civil servant), sudah seharusnya pemerintah memantau dan memperhatikan kepuasan dan pendapat masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Prinsip ini sejalan dengan esensi Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang kewenangan Pemerintah Daerah (otonomi) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat.

Pemikiran terkini tentang tata kelola pemerintahan (governance) berimplikasi pada meningkatnya posisi tawar masyarakat sebagai konsumen pelayanan publik. Paradigma lama menempatkan masyarakat pada posisi yang lemah karena tidak memiliki kekuatan atau pilihan untuk berganti ke penyedia jasa publik lain sudah tidak relevan lagi pada saat ini. Dorongan ini makin menguat karena semakin kuatnya tuntutan atas terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, efisiensi, akuntabilitas, serta menghargai martabat masyarakat sebagai konsumen pelayanan.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara eksplisit dikemukakan bahwa hakekat dari pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat.

Salah satu kegiatan evaluasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik adalah menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur terhadap optimalisasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat. Dalam dokumen RPJMD tahun 2017-2022, IKM ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja utama yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten, dimana pada dokumen tersebut, nilai IKM yang harus dicapai pada tahun 2019 sebesar 3,2 (kriteria baik) dan diharapkan nilainya terus meningkat tiap tahun, sehingga pada akhir periode jabatan gubernur dan wakil gubernur, nilai IKM menjadi 3,5. Sementara itu, hasil perhitungan IKM DLHK Tahun 2018 menghasilkan nilai IKM sebesar 3,3 kriteria baik (IKM : Skala 1-4) dari Nilai target sebesar 2,8

Berdasarkan hasil survey indeks kepuasan masyarakat yang dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja layanan DLHK Hasil Survei IKM pada tahun 2019 didapatkan hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM : Skala 1-4), Target tahun 2019 adalah 3,0 dengan realisasi sebesar 3,34

Jika ditelusuri berdasarkan unit pelayanannya, maka dapat dilihat bahwa terdapat unit pelayanan yang nilai indeksnya masih di bawah 80, yaitu Sie. Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Sie. Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan, dan Sie. Perbenihan, sehingga hal tersebut dapat dijadikan perhatian khusus bagi pemangku kepentingan. Sedangkan nilai IKM paling tinggi diraih oleh Sie. Sertifikasi serta Sie Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan yang memang terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar tabel berikut.

No.	Unit Layanan (Seksi)	2019		2018		2017	
		IKM	Mutu Pelayanan	IKM	Mutu Pelayanan	IKM	Mutu Pelayanan
1	Perencanaan dan Pengkajian Dampak	85.42	B	84.70	B	74.90	C
2	Pengaduan Penegakan Hukum	81.71	B	81.49	B	77.40	B
3	Peningkatan Kapasitas	82.94	B				
4	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	83.33	B	77.96	B	77.70	B
5	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	81.94	B				
6	Pemeliharaan Lingkungan Hidup	79.63	B				
7	Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan	91.67	A	81.59	B	78.90	B
8	Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	80.09	B				
9	Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan	84.13	B				
10	Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan	78.70	B	83.45	B	73.70	C
11	Penyuluhan Kehutanan	83.33	B				
12	Konservasi SDA dan Ekosistem	81.48	B				
13	Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan	81.94	B	83.74	B	75.90	C
14	Pengujian dan Analisis Laboratorium Lingkungan	80.03	B				
15	Perlindungan dan Rehabilitasi	84.72	B				
16	Pengembangan dan Pemanfaatan	82.87	B	84.29	B	81.70	B
17	Sertifikasi	91.67	A				
18	Perbenihan	79.54	B	81.86	B	77.70	B
19	Pengawasan dan Pengendalian SDH (PSC)	80.21	B				
20	Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat (PSC)	88.27	B				
21	Pengawasan dan Pengendalian SDH (LT)	86.48	B	82.16	B	77.50	B
22	Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat (LT)	88.54	A				
IKM DLHK Prov. Banten		83.58	B	82.66	B	77.50	B
		3.34		3.31		3.10	

Gambar 2.2 Perkembangan Nilai IKM Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Periode 2017-2019

Sumber: pengolahan data, IKM Tahun 2017-2019

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja layanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2019, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten pada tahun 2019 secara agregat mencerminkan kinerja yang baik atau berperingkat “B” dengan nilai IKM sebesar 3,34 atau 83,58.
- b. Unsur pelayanan dengan nilai tertinggi adalah “perilaku pelaksana” sebesar 3,71 atau 92,75, hal ini berarti bahwa para pegawai yang melayani langsung sudah bersikap ramah/sopan sehingga dapat disimpulkan bahwa penilaian kepada unsur perilaku pelaksana ini sudah sangat baik.
- c. Unsur pelayanan dengan nilai terendah adalah “waktu pelayanan” sebesar 2,99 atau 74,75, hal ini berarti bahwa kecepatan dalam memberikan pelayanan masih dirasa kurang cepat sebagaimana yang pengguna layanan harapkan, sehingga disimpulkan bahwa penilaian kepada unsur waktu pelayanan ini masih kurang baik.
- d. Unit pelayanan dengan nilai tertinggi diperoleh oleh “Sie. Sertifikasi” serta “Sie. Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan” dengan nilai IKM sebesar 3,66 atau 91,67, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan pada unit pelayanan tersebut sudah sangat baik.
- e. Unit pelayanan dengan nilai terendah diperoleh oleh “Sie. Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Kehutanan” dengan nilai IKM sebesar 3,14 atau 78,70, namun demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan pada unit pelayanan tersebut masih dalam kategori baik.
- f. Secara umum telah terjadi peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun ke tahunnya, mulai dari 77,50 atau 3,10 pada tahun 2017, kemudian meningkat menjadi 82,66 atau 3,31 pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 ini kembali mengalami peningkatan menjadi 83,58 atau 3,34, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja perkembangan pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten terus maju ke arah yang lebih baik.
- g. Meskipun nilai IKM secara agregat terus mengalami peningkatan, namun terdapat unsur layanan yang mengalami penurunan peringkat dari nilai mutu pelayanan “B” menjadi “C”, yaitu unsur “sarana dan prasarana” dimana pada tahun 2018 diperoleh nilai IKM sebesar 77,00 sedangkan pada tahun 2019 ini

menjadi 75,96, sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur sarana dan prasarana mengalami perkembangan kinerja yang kurang baik.

Selanjutnya disampaikan saran-saran lainnya untuk perbaikan kegiatan survei kepuasan sebagai berikut:

- a. Diperlukan sinkronisasi rujukan pedoman bagi setiap bidang dalam penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan DLHK Provinsi Banten agar hasil yang dikeluarkan dari kegiatan survei masing-masing bidang tersebut dapat dikolaborasikan sehingga hasil IKM kolaborasi dari masing-masing bidang dapat merepresentasikan nilai IKM untuk DLHK secara keseluruhan.
- b. Diperlukan usaha peningkatan unsur pelayanan berdasarkan jenis layanan di masing-masing bidang yang diprioritaskan agar meningkat sesuai dengan rencana tindak lanjut.
- c. Diperlukan usaha dalam memertahankan unsur pelayanan yang memiliki nilai di atas rata-rata kinerja unsur pelayanan lainnya yang ada di DLHK Provinsi Banten.
- d. Diperlukan sosialisasi e-survey pada setiap unit layanan agar pelaksanaan survei dapat lebih efektif dan efisien, sehingga kualitas survei dapat lebih baik lagi.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi DLHK

Dalam penentuan rencana kerja, selain didasarkan pada capaian sasaran yang telah ditetapkan pada renstra namun mempertimbangkan pula isu dan masalah mendesak yang sedang berkembang. Isu dan Masalah yang sedang berkembang pada saat ini adalah sebagai berikut :

1. Wabah Pandemi covid 19 di Provinsi Banten
2. Kualitas Lingkungan Hidup (Penurunan kualitas air sungai, Peningkatan Pencemaran Udara, Peningkatan Pencemaran Limbah domestik, B3 dan Limbah B3, Sarana dan Prasarana pengukuran pemantauan kualitas lingkungan hidup)
3. Perizinan & pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta Inventarisasi dan pemberian penghargaan Lingkungan Hidup
4. Ketahanan terhadap Perubahan iklim (Keanekaragaman hayati, Ruang Terbuka Hijau)

5. Belum Optimalnya pemanfaatan hasil hutan bagi masyarakat (Nilai ekonomi kawasan hutan, Hasil Hutan Bukan Kayu, SDM, Peran serta masyarakat dan kapasitas kelembagaan)
6. Konflik kawasan hutan dan masyarakat hukum Adat (MHA)
7. Kerusakan DAS dan bencana banjir dan longsor di Provinsi Banten
8. Masih luasnya lahan kritis di Provinsi Banten
9. Peningkatan SDM dan Kapasitas Kelembagaan OPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra DLHK dengan hasil pencapaian target tahunan. Rancangan awal Renja yang telah disusun oleh DLHK telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja DLHK Provinsi Banten .

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra DLHK yang dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Disamping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta indikator kinerja dan rencana capaiannya. Usulan program dan kegiatan dalam Renja DLHK senantiasa diselaraskan dengan Renstra DLHK dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat disajikan dalam Tabel 2.14 sebagai berikut ini :

Tabel 2.6. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 Provinsi Banten

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1205.01	Urusan Wajib					Urusan Wajib				
	Bidang Lingkungan Hidup				39.154.332.000	Bidang Lingkungan Hidup				13.600.080.000
	PROGRAM TATA KEBOLA PEMERINTAHAN		1 : Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	19.646.661.000	PROGRAM TATA KEBOLA PEMERINTAHAN		1 : Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	10.450.080.000
			2 : Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100%				2 : Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100%	
			3 : Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100%				3 : Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100%	
			4 : Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%				4 : Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	
1205.120501.00.01.001.5.2	Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Prov. Banten	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset yang akuntabel (dok)	15 dok	64.000.000	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset			15 dok	50.000.000
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	Prov. Banten	Dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun Anggaran (1 dok), Laporan SPIP (1 dok), penyusunan laporan keuangan semester I (1 dok), penyusunan laporan realisasi semester dan prognosis 6 bln (1 dok), penyusunan dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ kegiatan (4 dok)	8 dok	32.765.000	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	Prov. Banten	Dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun Anggaran (1 dok), Laporan SPIP (1 dok), penyusunan laporan keuangan semester I (1 dok), penyusunan laporan realisasi semester dan prognosis 6 bln (1 dok), penyusunan dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ kegiatan (4 dok)	8 dok	31.000.000
	Sub Kegiatan : Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (T LHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	Prov. Banten	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (T LHP) untuk semester 1 dan 2	2 dok	14.856.000	Sub Kegiatan : Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (T LHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	Prov. Banten	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (T LHP) untuk semester 1 dan 2	2 dok	12.000.000
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	Prov. Banten	Dokumen Pelaporan pajak PPh Ps 21 DLHK prov Banten T.A.N (1 dok), Pelaporan pajak PPh Ps 22 dan PPh ps 23 Keg DLHK Prov Banten T.A.N (1 dok), Pelaporan SPT Pajak tahunan DLHK T.A.N (1 dok)	3 dok	16.379.000	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	Prov. Banten	Dokumen Pelaporan pajak PPh Ps 21 DLHK prov Banten T.A.N (1 dok), Pelaporan pajak PPh Ps 22 dan PPh ps 23 Keg DLHK Prov Banten T.A.N (1 dok), Pelaporan SPT Pajak tahunan DLHK T.A.N (1 dok)	2 dok	7.000.000
1205.120501.00.01.001.5.2	Kegiatan : Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Prov. Banten	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan tepat waktu (dok)	21 dok	618.000.000	Kegiatan : Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Prov. Banten	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan tepat waktu (dok)	21 dok	350.000.000
	Sub Kegiatan : Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan	Prov. Banten	Penyusunan LKIP DLHK (1 dok), penyusunan LKJP DLHK (1 dok), Penyusunan LPPD DLHK (1 dok)	3 dok	32.960.000	Sub Kegiatan : Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan	Prov. Banten	Penyusunan LKIP DLHK (1 dok), penyusunan LKJP DLHK (1 dok), Penyusunan LPPD DLHK (1 dok)	3 dok	15.150.000

	Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	Prov. Banten	Penyusunan Renja Tahun N dan N+1 (2 dok), fasilitasi penyusunan RKAP dan DPPA Tahun N (2 dok), fasilitasi penyusunan RKA dan DPA Tahun N+1 (2 dok), Penyusunan Parkin dan IKU DLHK N dan N+1 (2 dok), forum Renja (1 dok), dan penyusunan RUP (1 dok)	10	dok	193.640.000	Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	Prov. Banten	Penyusunan Renja Tahun N dan N+1 (2 dok), fasilitasi penyusunan RKAP dan DPPA Tahun N (2 dok), fasilitasi penyusunan RKA dan DPA Tahun N+1 (2 dok), Penyusunan Parkin dan IKU DLHK N dan N+1 (2 dok), forum Renja (1 dok), dan penyusunan RUP (1 dok)	10	dok	128.660.000
	Sub Kegiatan : Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	Prov. Banten	Penyusunan Laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan kegiatan	4	dok	61.800.000	Sub Kegiatan : Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	Prov. Banten	Penyusunan Laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan kegiatan	4	dok	71.910.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan data dan informasi Pembangunan	Prov. Banten	1. Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah (1 dok), 2. Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah (1 dok) 3. Pengelolaan website PD (1 tahun), 4. Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial tematik (1 dok) 5. pengelolaan PPID (12 bin), 6. Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (1 dok)	4	dok	329.600.000	Sub Kegiatan : Penyediaan data dan informasi Pembangunan	Prov. Banten	1. Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah (1 dok), 2. Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah (1 dok) 3. Pengelolaan website PD (1 tahun), 4. Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial tematik (1 dok) 5. pengelolaan PPID (12 bin), 6. Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (1 dok)	4	dok	134.280.000
1205.120501.01.046	Kegiatan Penyediaan Barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Prov. Banten	Tersedianya barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran yang berkualitas dan berdaya guna (keg)	12	Keg	9.339.535.000	Kegiatan Penyediaan Barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Prov. Banten	Tersedianya barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran yang berkualitas dan berdaya guna (keg)	12	Keg	8.042.080.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Prov. Banten	1. Operasional kantor tidak tetap (TKS, Supir, Pramubakti, Satpam dll), 2. Penyediaan jasa kebersihan gedung dan halaman (outsourcing), 3. Penyediaan barang habis pakai (ATK untuk 1 dinas), 4. Penyediaan bahan cetak (kebutuhan cetak surat/Amplap dan cetak lainnya), 5. Penyediaan makan dan minum kantor (keb. makan dan minum untuk kegiatan Rutin dinas), 6. Penyediaan operasional jasa kantor (tdg, Listrik, internet dan PHBI/PHBN, PHBD dll), 7. Penyediaan BBM (keg)	7	Keg	7.000.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Prov. Banten	1. Operasional kantor tidak tetap (TKS, Supir, Pramubakti, Satpam dll), 2. Penyediaan jasa kebersihan gedung dan halaman (outsourcing), 3. Penyediaan barang habis pakai (ATK untuk 1 dinas), 4. Penyediaan bahan cetak (kebutuhan cetak surat/Amplap dan cetak lainnya), 5. Penyediaan makan dan minum kantor (keb. makan dan minum untuk kegiatan Rutin dinas), 6. Penyediaan operasional jasa kantor (tdg, Listrik, internet dan PHBI/PHBN, PHBD dll), 7. Penyediaan BBM (keg)	7	Keg	7.005.996.456
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Prov. Banten	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor (keg)	1	Keg	316.250.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Prov. Banten	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor (keg)	1	Keg	121.430.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Prov. Banten	1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor, 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, 3. Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK (keg)	3	Keg	1.693.285.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Prov. Banten	1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor, 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, 3. Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK (keg)	3	Keg	714.653.544
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	Prov. Banten	Perjalanan dinas ke dalam dan keluar daerah (keg)	1	Keg	330.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	Prov. Banten	Perjalanan dinas ke dalam dan keluar daerah (keg)	1	Keg	200.000.000
1205.120501.01.01	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Prov. Banten	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Aparatur yang berkompeten (Dok)	18	dok	103.000.000	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Prov. Banten	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Aparatur yang berkompeten (Dok)	18	dok	45.000.000
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	Prov. Banten	fasilitasi kenaikan pangkat dan golongan PNS (1 dok), Fasilitas Kenaikan Gaji Berkala PNS (1dok), Pemutakhiran data kepegawaian dan Kompetensi pegawai (1 dok), evaluasi SKP (12 dok)	15	dok	5.150.000	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	Prov. Banten	fasilitasi kenaikan pangkat dan golongan PNS (1 dok), Fasilitas Kenaikan Gaji Berkala PNS (1dok), Pemutakhiran data kepegawaian dan Kompetensi pegawai (1 dok), evaluasi SKP (12 dok)	15	dok	5.000.000

	Sub Kegiatan : Peningkatan Kompetensi Aparatur	Prov. Banten	Fasilitasi kursus, Pelatihan, Bimtek (dok)	3 dok	97.850.000	Sub Kegiatan : Peningkatan Kompetensi Aparatur	Prov. Banten	Fasilitasi kursus, Pelatihan, Bimtek (dok)	3 dok	40.000.000
1205.120501.00.01.0	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kerasipan dan Pelayanan Perpustakaan	Prov. Banten	Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan (bln)	12 bln	200.000.000	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kerasipan dan Pelayanan Perpustakaan	Prov. Banten	Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan (bln)	12 bln	45.000.000
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan DPD	Prov. Banten	Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan DPD (bln)	12 bln	200.000.000	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan DPD	Prov. Banten	Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan DPD (bln)	12 bln	45.000.000
1205.120501.01.048	Kegiatan Pelayanan T ata Usaha pada COLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Kantor COLHK LT	Terlaksananya Pelayanan T ata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna	11 keg	1.172.418.000	Kegiatan Pelayanan T ata Usaha pada COLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Kantor COLHK LT	Terlaksananya Pelayanan T ata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna	11 keg	375.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada COLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Kantor COLHK LT	1. Operasional kantor tdk tetap, 2. Penyediaan jasa kebersihan gedung dan halaman (outsourcing), 3. Penyediaan barang habis pakai, 4. Penyediaan makan dan minum kantor, 5. Penyediaan operasional jasa kantor, 6. Penyediaan BBM	6 keg	593.506.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada COLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Kantor COLHK LT	1. Operasional kantor tdk tetap, 2. Penyediaan jasa kebersihan gedung dan halaman (outsourcing), 3. Penyediaan barang habis pakai, 4. Penyediaan makan dan minum kantor, 5. Penyediaan operasional jasa kantor, 6. Penyediaan BBM	6 keg	270.000.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada COLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Kantor COLHK LT	Pengadaan Prasarana sarana Kantor pada COLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	1 keg	400.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada COLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Kantor COLHK LT	Pengadaan Prasarana sarana Kantor pada COLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	1 keg	40.000.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada COLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Kantor COLHK LT	1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor, 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, 3. Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK	3 keg	128.650.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada COLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Kantor COLHK LT	1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor, 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, 3. Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK	3 keg	40.000.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada COLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Kantor COLHK LT	Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada COLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	1 keg	50.262.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada COLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Kantor COLHK LT	Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada COLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	1 keg	25.000.000
1205.120501.01.047	Kegiatan Pelayanan T ata Usaha pada UPT D Laboratorium Lingkungan	UPT D Lab Ling	Terlaksananya Pelayanan T ata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna (keg)	10 keg	2.735.000.000	Kegiatan Pelayanan T ata Usaha pada UPT D Laboratorium Lingkungan	UPT D Lab Ling	Terlaksananya Pelayanan T ata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna (keg)	10 keg	650.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT D Laboratorium Lingkungan	UPT D Lab Ling	1. Operasional kantor tdk tetap, 2. Penyediaan barang habis pakai, 3. Penyediaan makan dan minum kantor, 4. Penyediaan operasional jasa kantor, 5. Penyediaan BBM (keg)	5	1.200.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT D Laboratorium Lingkungan	UPT D Lab Ling	1. Operasional kantor tdk tetap, 2. Penyediaan barang habis pakai, 3. Penyediaan makan dan minum kantor, 4. Penyediaan operasional jasa kantor, 5. Penyediaan BBM (keg)	5	450.000.000

	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPT D Laboratorium Lingkungan	UPT D Lab Ling	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor (keg)	1	700.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPT D Laboratorium Lingkungan	UPT D Lab Ling	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor (keg)	1	50.000.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT D Laboratorium Lingkungan	UPT D Lab Ling	1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor, 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, 3. Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK (keg)	3	750.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT D Laboratorium Lingkungan	UPT D Lab Ling	1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor, 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, 3. Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK (keg)	3	125.000.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPT D Laboratorium Lingkungan	UPT D Lab Ling	Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah (keg)	1	85.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPT D Laboratorium Lingkungan	UPT D Lab Ling	Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah (keg)	1	25.000.000
1205.120501.01.049	Kegiatan Pelayanan T ata Usaha pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Kantor CDLHK PSC	T erlak saranya Pelayanan T ata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna	11 Keg	1.520.000.000	Kegiatan Pelayanan T ata Usaha pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Kantor CDLHK PSC	T erlak saranya Pelayanan T ata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna	11 Keg	300.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Kantor CDLHK PSC	1. Operasional kantor tdk tetap, 2. Penyediaan jasa kebersihan gedung dan halaman (outsourcing), 3. Penyediaan barang habis pakai, 4. Penyediaan makan dan minum kantor, 5. Penyediaan operasional jasa kantor, 6. Penyediaan BBM	6 Keg	450.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Kantor CDLHK PSC	1. Operasional kantor tdk tetap, 2. Penyediaan jasa kebersihan gedung dan halaman (outsourcing), 3. Penyediaan barang habis pakai, 4. Penyediaan makan dan minum kantor, 5. Penyediaan operasional jasa kantor, 6. Penyediaan BBM	6 Keg	190.000.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Kantor CDLHK PSC	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	1 Keg	700.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Kantor CDLHK PSC	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	1 Keg	40.000.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Kantor CDLHK PSC	1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor, 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, 3. Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK	3 Keg	300.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Kantor CDLHK PSC	1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor, 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, 3. Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK	3 Keg	50.000.000
	Sub Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Kantor CDLHK PSC	Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	1 Keg	70.000.000	Sub Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Kantor CDLHK PSC	Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	1 Keg	20.000.000
1205.120501.01.050	Kegiatan Pelayanan T ata Usaha pada UPT D Sertifikasi dan Perbenihan T anaman Hutan	UPT D SPT H	T erlak saranya Pelayanan T ata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna (keg)	22 Keg	927.000.000	Kegiatan Pelayanan T ata Usaha pada UPT D Sertifikasi dan Perbenihan T anaman Hutan	UPT D SPT H	T erlak saranya Pelayanan T ata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna (keg)	22 Keg	315.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT D Sertifikasi dan Perbenihan T anaman Hutan	UPT D SPT H	1. Operasional kantor tdk tetap, 2. Penyediaan jasa kebersihan gedung dan halaman (outsourcing), 3. Penyediaan barang habis pakai, 4. Penyediaan makan dan minum kantor, 5. Penyediaan operasional jasa kantor, 6. Penyediaan BBM (keg)	6 Keg	250.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT D Sertifikasi dan Perbenihan T anaman Hutan	UPT D SPT H	1. Operasional kantor tdk tetap, 2. Penyediaan jasa kebersihan gedung dan halaman (outsourcing), 3. Penyediaan barang habis pakai, 4. Penyediaan makan dan minum kantor, 5. Penyediaan operasional jasa kantor, 6. Penyediaan BBM (keg)	6 Keg	200.000.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPT D Sertifikasi dan Perbenihan T anaman Hutan	UPT D SPT H	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor (keg)	1 Keg	200.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPT D Sertifikasi dan Perbenihan T anaman Hutan	UPT D SPT H	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor (keg)	1 Keg	40.000.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT D Sertifikasi dan Perbenihan T anaman Hutan	UPT D SPT H	1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor, 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, 3. Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK (keg)	3 Keg	377.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT D Sertifikasi dan Perbenihan T anaman Hutan	UPT D SPT H	1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor, 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, 3. Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK (keg)	3 Keg	50.000.000

	Sub Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	UPTD SPT H	Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah (keg)	I Keg	100.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	UPTD SPT H	Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah (keg)	I Keg	25.000.000
1205.120501.01.051	Kegiatan Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaaan Taman Hutan Raya Banten	Kantor UPTD Tahura	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdampak guna	11 Keg	2.967.708.000	Kegiatan Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaaan Taman Hutan Raya Banten	Kantor UPTD Tahura	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdampak guna	11 Keg	278.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran UPTD Pengelolaaan Taman Hutan Raya Banten	Kantor UPTD Tahura	1. Operasional kantor tdk tetap, 2. Penyediaan jasa kebersihan gedung dan halaman (outsourcing), 3. Penyediaan barang habis pakai, 4. Penyediaan makan dan minum kantor, 5. Penyediaan operasional jasa kantor, 6. Penyediaan BBM	6 Keg	174.340.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran UPTD Pengelolaaan Taman Hutan Raya Banten	Kantor UPTD Tahura	1. Operasional kantor tdk tetap, 2. Penyediaan jasa kebersihan gedung dan halaman (outsourcing), 3. Penyediaan barang habis pakai, 4. Penyediaan makan dan minum kantor, 5. Penyediaan operasional jasa kantor, 6. Penyediaan BBM	6 Keg	133.000.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaaan Taman Hutan Raya Banten	Kantor UPTD Tahura	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaaan Taman Hutan Raya Banten	I Keg	2.600.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaaan Taman Hutan Raya Banten	Kantor UPTD Tahura	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaaan Taman Hutan Raya Banten	I Keg	50.000.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaaan Taman Hutan Raya Banten	Kantor UPTD Tahura	1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor, 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, 3. Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK	3 Keg	143.368.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaaan Taman Hutan Raya Banten	Kantor UPTD Tahura	1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor, 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, 3. Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK	3 Keg	70.000.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pengelolaaan Taman Hutan Raya Banten	Kantor UPTD Tahura	Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pengelolaaan Taman Hutan Raya Banten	I Keg	50.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pengelolaaan Taman Hutan Raya Banten	Kantor UPTD Tahura	Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pengelolaaan Taman Hutan Raya Banten	I Keg	25.000.000
1205.15	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP		1 : Indeks Kualitas Air	52,5 Nilai	16.705.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP		1 : Indeks Kualitas Air	52,5 Nilai	2.320.000.000
			2 : Indeks Kualitas Udara	66,8 Nilai				2 : Indeks Kualitas Udara	66,8 Nilai	
			3 : Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	68 Kelompok/ Lembaga				3 : Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	68 Kelompok/ Lembaga	
			4 : Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup	98%				4 : Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup	98%	
			5 : Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan	16,90%				5 : Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan	16,90%	
1205.120501.000.15.0	Kegiatan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Prov Banten	Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara serta tersusunnya kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai standar baku mutu dan kriteria kerusakan	4 dok	5.150.000.000	Kegiatan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Prov Banten	Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara serta tersusunnya kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai standar baku mutu dan kriteria kerusakan	4 dok	450.000.000

	Sub Kegiatan pemantauan kualitas Air dan kerusakan situ/ danau	Ciujung, Cibanten, Cinarab, Cimaneuri, Cilener, Wilayah Laut Anyer, Muara Ciujung barat, Rangkasbitung	Dokumen pemantauan kualitas air dan kerusakan situ/ danau (dok)	2	dok	4.500.000.000	Sub Kegiatan pemantauan kualitas Air dan kerusakan situ/ danau	Ciujung, Cibanten, Cinarab, Cimaneuri, Cilener, Wilayah Laut Anyer, Muara Ciujung barat, Rangkasbitung	Dokumen pemantauan kualitas air dan kerusakan situ/ danau (dok)	2	dok	236.310.000
	Sub Kegiatan pemantauan kualitas udara ambien	Prov Banten	Dokumen pemantauan kualitas udara ambien (dok)	1	dok	250.000.000	Sub Kegiatan pemantauan kualitas udara ambien	Prov Banten	Dokumen pemantauan kualitas udara ambien (dok)	1	dok	186.920.000
	Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pengendalian pencemaran lingkungan	Sungai Cinarab	dokumen perencanaan pengendalian pencemaran lingkungan (dok)	1	dok	400.000.000	Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pengendalian pencemaran lingkungan	Sungai Cinarab	dokumen perencanaan pengendalian pencemaran lingkungan (dok)	1	dok	26.770.000
						300.000.000		Prov. Banten	Pembinaan pengendalian pencemaran dan kerusakan terhadap pelaku usaha kegiatan	50 Industri		200.000.000
1205.120501.00.15.0	Kegiatan pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Prov Banten	T erlaksananya Pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan sampah B3 dan limbah B3 sesuai dengan pedoman pengelolaan sampah dan limbah B3 (dok)	4	dok	8.800.000.000.00	Kegiatan pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Prov Banten	T erlaksananya Pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan sampah B3 dan limbah B3 sesuai dengan pedoman pengelolaan sampah dan limbah B3 (dok)	4	dok	950.000.000
	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan penanganan sampah dan limbah B3	Prov Banten	dokumen perencanaan penanganan sampah dan limbah B3 (dok)	2	dok	400.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan penanganan sampah dan limbah B3	Prov Banten	dokumen perencanaan penanganan sampah dan limbah B3 (dok)	2	dok	60.000.000
	Sub Kegiatan pengelolaan sampah	Kab. Tangerang, Kab. Serang, Kab. Latak, Kab. Pandeglang dan Kota Serang, Kota Cilegon	Laporan pembinaan dan pengelolaan sampah (dok)	1	dok	8.000.000.000	Sub Kegiatan pengelolaan sampah	Kab. Tangerang, Kab. Serang, Kab. Latak, Kab. Pandeglang dan Kota Serang, Kota Cilegon	Laporan pembinaan dan pengelolaan sampah (dok)	1	dok	860.000.000
	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi pengelolaan limbah B3	Prov Banten , Kota Cilegon	Laporan industri pengelolaan limbah B3 yang dipantau dan dievaluasi (dok)	1	dok	400.000.000	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi pengelolaan limbah B3	Prov Banten , Kota Cilegon	Laporan industri pengelolaan limbah B3 yang dipantau dan dievaluasi (dok)	1	dok	30.000.000
1205.120501.00.15.0	Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Prov Banten	T erlaksananya pembinaan proklam, pemantauan dan pengawasan konservasi kehati dan pemanfaatan SDA, penyusunan data dan informasi kehati serta evaluasi dan pelaporan emisi GRK sektor limbah sesuai dengan pedoman dan SOP (Dok)	8	dok	1.200.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Prov Banten	T erlaksananya pembinaan proklam, pemantauan dan pengawasan konservasi kehati dan pemanfaatan SDA, penyusunan data dan informasi kehati serta evaluasi dan pelaporan emisi GRK sektor limbah sesuai dengan pedoman dan SOP (Dok)	8	dok	370.000.000
	Sub Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi dan Pengawasan Pemanfaatan SDA Secara Lestari	Prov Banten	Laporan Pemantauan dan pengawasan Pelaksanaan konservasi dan pengawasan pemanfaatan SDA secara lestari (dok)	2	dok	150.000.000	Sub Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi dan Pengawasan Pemanfaatan SDA Secara Lestari	Prov Banten	Laporan Pemantauan dan pengawasan Pelaksanaan konservasi dan pengawasan pemanfaatan SDA secara lestari (dok)	2	dok	40.000.000
	Sub Kegiatan Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	8 kab/Kota di Prov Banten	Laporan Pembinaan adaptasi ,mitigasi perubahan iklim di Kampung iklim dan laporan pemantauan pengawasan bahan perusak ozon (BPO) (dok)	3	dok	800.000.000	Sub Kegiatan Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	8 kab/Kota di Prov Banten	Laporan Pembinaan adaptasi ,mitigasi perubahan iklim di Kampung iklim dan laporan pemantauan pengawasan bahan perusak ozon (BPO) (dok)	3	dok	270.000.000
	Sub Kegiatan Pengembangan mangrove provinsi Banten	Prov Banten	Dokumen Pengembangan mangrove provinsi Banten (dok)	1	dok	100.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan mangrove provinsi Banten	Prov Banten	Dokumen Pengembangan mangrove provinsi Banten (dok)	1	dok	30.000.000

	Sub Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi GRK Sektor Limbah	Prov. Banten	Laporan pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi GRK Sektor Limbah (dok)	2	dok	150.000.000	Sub Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi GRK Sektor Limbah	Prov. Banten	Laporan pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi GRK Sektor Limbah (dok)	2	dok	30.000.000
1205.120501.00.15.0	Kegiatan Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan	Prov. Banten	Jumlah parameter akreditasi/Surveillance dalam peningkatan kompetensi laboratorium lingkungan sesuai dengan ISO 17025 Tahun 2017 (parameter)	35	parameter	400.000.000	Kegiatan Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan	Prov. Banten	Jumlah parameter akreditasi/Surveillance dalam peningkatan kompetensi laboratorium lingkungan sesuai dengan ISO 17025 Tahun 2017 (parameter)	35	parameter	300.000.000
	Sub Kegiatan Akreditasi/Surveillance	DLHK Prov. Banten, UPT Lab DLH Kab Tangerang, UPT LAB DLH Kab Pandeglang	Akreditasi/Surveillance (parameter)	35	parameter	400.000.000	Sub Kegiatan Akreditasi/Surveillance	DLHK Prov. Banten, UPT Lab DLH Kab Tangerang, UPT LAB DLH Kab Pandeglang	Akreditasi/Surveillance (parameter)	35	parameter	300.000.000
1205.120501.00.15.0	Kegiatan Pengujian dan analisa laboratorium lingkungan	Prov. Banten	Tertaksonanya pemantauan parameter kualitas air dan udara sesuai dengan baku mutu (sample)	284	sample	500.000.000	Kegiatan Pengujian dan analisa laboratorium lingkungan	Prov. Banten	Tertaksonanya pemantauan parameter kualitas air dan udara sesuai dengan baku mutu (sample)	284	sample	250.000.000
	Sub Kegiatan Pengambilan sampel, pengujian dan Analisa Sampel Internal	Prov. Banten	Jumlah Pengambilan sampel, pengujian dan Analisa Sampel Internal (sample)	234	sample	400.000.000	Sub Kegiatan Pengambilan sampel, pengujian dan Analisa Sampel Internal	Prov. Banten	Jumlah Pengambilan sampel, pengujian dan Analisa Sampel Internal (sample)	234	sample	200.000.000
	Sub Kegiatan Pelayanan: Pengujian dan Analisa Parameter Kualitas Lingkungan Eksternal	Prov. Banten	Jumlah Pengambilan Sampel dalam pelayanan pengujian dan analisa parameter kualitas lingkungan eksternal (sample)	50	sample	100.000.000	Sub Kegiatan Pelayanan: Pengujian dan Analisa Parameter Kualitas Lingkungan Eksternal	Prov. Banten	Jumlah Pengambilan Sampel dalam pelayanan pengujian dan analisa parameter kualitas lingkungan eksternal (sample)	50	sample	50.000.000
1205.120501.15.014	Kegiatan Dak. Lingkungan Hidup	Prov. Banten	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor UPT D Lab. Lingkungan	1	paket	655.000.000	Kegiatan Dak. Lingkungan Hidup	Prov. Banten	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor UPT D Lab. Lingkungan	1	paket	-
		Prov. Banten	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor UPT D Lab. Lingkungan	1	paket	655.000.000		Prov. Banten	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor UPT D Lab. Lingkungan	1	paket	-
	Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Kel/Lembaga)	76	Kel/Lembaga	2.802.871.000				76	Kel/Lembaga	830.000.000
			Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup (%)	98	%					100	%	
1205.120501.00.15.0	Kegiatan Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Prov. Banten	Tersusunnya perencanaan penilaian pengkajian dampak lingkungan hidup sesuai SOP (dok)	10	dok	500.000.000	Kegiatan Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Prov. Banten	Tersusunnya perencanaan penilaian pengkajian dampak lingkungan hidup sesuai SOP (dok)	10	dok	270.000.000
	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan kinerja pengelolaan lingkungan	Prov. Banten	Dokumen perencanaan, pemanfaatan dan kinerja pengelolaan lingkungan (dok)	8	dok	400.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan kinerja pengelolaan lingkungan	Prov. Banten	Dokumen perencanaan, pemanfaatan dan kinerja pengelolaan lingkungan (dok)	8	dok	210.000.000
	Sub Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Prov. Banten	dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disusun dan divalidasi (dok)	1	dok	40.000.000	Sub Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Prov. Banten	dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disusun dan divalidasi (dok)	1	dok	30.000.000

	Sub Kegiatan Tata laksana penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan	Prov. Banten	Dokumen penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan (dok)	1	dok	60.000.000	Sub Kegiatan Tata laksana penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan	Prov. Banten	Dokumen penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan (dok)	1	dok	30.000.000
1205.120501.00.15.0	Kegiatan Pelayanan Pengaduan dan penegakan Hukum	Prov. Banten	Tertanganinya penanganan kasus – kasus dugaan pencemaran lingkungan hidup serta meningkatnya ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup Sesuai SOP (dok)	2	dok	1.002.671.000	Kegiatan Pelayanan Pengaduan dan penegakan Hukum	Prov. Banten	Tertanganinya penanganan kasus – kasus dugaan pencemaran lingkungan hidup serta meningkatnya ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup Sesuai SOP (dok)	2	dok	280.000.000
	Sub Kegiatan Penanganan kasus-kasus akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan kehutanan	Prov. Banten	Laporan penanganan kasus-kasus akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan kehutanan (dok)	1	dok	500.193.000	Sub Kegiatan Penanganan kasus-kasus akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan kehutanan	Prov. Banten	Laporan penanganan kasus-kasus akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan kehutanan (dok)	1	dok	140.000.000
	Sub Kegiatan Pengawasan dan pengendalian terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan	Prov. Banten	Laporan Pengawasan dan pengendalian terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan (dok)	1	dok	502.478.000	Sub Kegiatan Pengawasan dan pengendalian terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan	Prov. Banten	Laporan Pengawasan dan pengendalian terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan (dok)	1	dok	140.000.000
1205.120501.00.15.0	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Prov. Banten	meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat, kelompok, dan sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelola Lingkungan Hidup Sesuai SOP (lembara)	37	lembara	1.300.000.000	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Prov. Banten	meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat, kelompok, dan sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelola Lingkungan Hidup Sesuai SOP (lembara)	37	lembara	280.000.000
	Sub Kegiatan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan	Prov. Banten	Jumlah Lembaga/Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan yang dibina (lembara)	25		700.000.000	Sub Kegiatan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan	Prov. Banten	Jumlah Lembaga/Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan yang dibina (lembara)	25		200.000.000
	Sub Kegiatan Penilaian Kota berwawasan lingkungan di Provinsi Banten	Prov. Banten	lembaga/Kota berwawasan lingkungan di Provinsi Banten yang dibina dan dinilai (lembara)	7		150.000.000	Sub Kegiatan Penilaian Kota berwawasan lingkungan di Provinsi Banten	Prov. Banten	lembaga/Kota berwawasan lingkungan di Provinsi Banten yang dibina dan dinilai (lembara)	7		20.000.000
	Sub Kegiatan Pemertih lingkungan dan masyarakat hukum adat	Prov. Banten	jumlah Lembaga pemertih lingkungan dan masyarakat hukum adat (lembara)	5		450.000.000	Sub Kegiatan Pemertih lingkungan dan masyarakat hukum adat	Prov. Banten	jumlah Lembaga pemertih lingkungan dan masyarakat hukum adat (lembara)	5		60.000.000
20	Urusan Pilihan Bidang Kehutanan						Urusan Pilihan Bidang Kehutanan					
2004	Kehutanan					19.981.408.000	Kehutanan					5.399.920.000
2004.15	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan		Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat (%)	10	%	2.730.000.000	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan		Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat (%)	10	%	1.170.000.000
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon (kelompok)	3	Kelompok				Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon (kelompok)	3	Kelompok	
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak dan Tangerang (kelompok)	3	Kelompok				Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak dan Tangerang (kelompok)	3	Kelompok	

2004.120501.00.15.	Kegiatan Perencanaan dan Penatagunaan Hutan	Prov. Banten	Terwujudnya perencanaan dan penempatan kawasan hutan sesuai dengan tata guna hutan dan perencanaan hutan (dok)	7	dok	640.000.000	Kegiatan Perencanaan dan Penatagunaan Hutan	Prov. Banten	Terwujudnya perencanaan dan penempatan kawasan hutan sesuai dengan tata guna hutan dan perencanaan hutan (dok)	7	dok	300.000.000
	Sub Kegiatan Perencanaan hutan	Prov. Banten, Kab. Lebak, Serang)	Terdapatnya dokumen perencanaan hutan (Evaluasi RAD GRK Sektor Kehutanan I dok, Penyusunan NSDH I dok, Perencanaan Penatagunaan Hutan dan Lahan dalam rangka mitigasi di wilayah Sub DAS Cisimeut I dok, Perencanaan Penatagunaan Hutan dan Lahan dalam rangka mitigasi di wilayah DAS Cibanten I dok) dok	4	dok	420.000.000	Sub Kegiatan Perencanaan hutan	Prov. Banten, Kab. Lebak, Serang)	Terdapatnya dokumen perencanaan hutan (Evaluasi RAD GRK Sektor Kehutanan I dok, Penyusunan NSDH I dok, Perencanaan Penatagunaan Hutan dan Lahan dalam rangka mitigasi di wilayah Sub DAS Cisimeut I dok, Perencanaan Penatagunaan Hutan dan Lahan dalam rangka mitigasi di wilayah DAS Cibanten I dok) dok	4	dok	200.000.000
	Sub Kegiatan Penempatan kawasan hutan	Prov. Banten	Terdapatnya dokumen Penempatan Kawasan hutan (Rapat penempatan hutan cadangan utk dijadikan kawasan hutan I dok, Movev Penggunaan kawasan hutan utk keg non kehutanan I dok, Fasilitas Penyelesaian Pemmasalahan Konflik Tenurial Kawasan Hutan I dok) dok	3	dok	220.000.000	Sub Kegiatan Penempatan kawasan hutan	Prov. Banten	Terdapatnya dokumen Penempatan Kawasan hutan (Rapat penempatan hutan cadangan utk dijadikan kawasan hutan I dok, Movev Penggunaan kawasan hutan utk keg non kehutanan I dok, Fasilitas Penyelesaian Pemmasalahan Konflik Tenurial Kawasan Hutan I dok) dok	3	dok	100.000.000
2004.120501.00.15.	Kegiatan Pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan	Prov. Banten	Meningkatnya pengelolaan hutan dan hasil hutan secara lestari sesuai dengan rencana tata kelola hutan (dok)	2	dok	785.000.000	Kegiatan Pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan	Prov. Banten	Meningkatnya pengelolaan hutan dan hasil hutan secara lestari sesuai dengan rencana tata kelola hutan (dok)	2	dok	250.000.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Usaha Hutan Rakyat Berbasis Industri	Prov. Banten	Laporan pengelolaan usaha hutan rakyat berbasis industri	1	dok	560.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Usaha Hutan Rakyat Berbasis Industri	Prov. Banten	Laporan pengelolaan usaha hutan rakyat berbasis industri	1	dok	200.000.000
	Sub Kegiatan Penatausahaan hasil hutan	Prov. Banten	Laporan Penatausahaan industri hasil hutan	1	dok	225.000.000	Sub Kegiatan Penatausahaan hasil hutan	Prov. Banten	Laporan Penatausahaan industri hasil hutan	1	dok	50.000.000
2004.120501.00.15.003.5.2	Kegiatan Pengembangan Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan	Dalam dan luar prov. Banten	Terlaksananya pengembangan dan promosi aneka usaha kehutanan komoditas unggulan hasil hutan bukan kayu (Komoditas)	4	komoditas	825.000.000	Kegiatan Pengembangan Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan	Dalam dan luar prov. Banten	Terlaksananya pengembangan dan promosi aneka usaha kehutanan komoditas unggulan hasil hutan bukan kayu (Komoditas)	4	komoditas	300.000.000
	Sub Kegiatan Pengembangan dan Promosi aneka usaha kehutanan	Dalam dan luar prov. Banten	jumlah komoditas usaha kehutanan (Komoditas)	3	komoditas	750.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan dan Promosi aneka usaha kehutanan	Dalam dan luar prov. Banten	jumlah komoditas usaha kehutanan (Komoditas)	3	komoditas	250.000.000
	Sub Kegiatan Pengembangan kawasan bambu terpadu	Prov. Banten	Pengembang kawasan bambu terpadu (Komoditas)	1	komoditas	75.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan kawasan bambu terpadu	Prov. Banten	Pengembang kawasan bambu terpadu (Komoditas)	1	komoditas	50.000.000
2004.120501.00.15.017.5.2	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan pada cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Pandeglang, Serang, Cilegon	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan di Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon sesuai SOP (dok)	8	dok	280.000.000	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan pada cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Pandeglang, Serang, Cilegon	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan di Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon sesuai SOP (dok)	8	dok	160.000.000
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi	Pandeglang, Serang, Cilegon	Laporan pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi (dok)	3	dok	50.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi	Pandeglang, Serang, Cilegon	Laporan pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi (dok)	3	dok	40.000.000
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Pandeglang, Serang, Cilegon	Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting (dok)	1	dok	80.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Pandeglang, Serang, Cilegon	Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting (dok)	1	dok	40.000.000

	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan	Pandeglang, Serang, Cilegon	Dokumen Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan (dok)	2 dok	100.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan	Pandeglang, Serang, Cilegon	Dokumen Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan (dok)	2 dok	40.000.000
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Pandeglang, Serang, Cilegon	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan hutan (dok)	2 dok	50.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Pandeglang, Serang, Cilegon	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan hutan (dok)	2 dok	40.000.000
2004.120501.00.15.017.5.2	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Lebak, Tangerang	Tertindakannya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan di Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai SOP (dok)	8 dok	200.000.000	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Lebak, Tangerang	Tertindakannya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan di Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai SOP (dok)	8 dok	160.000.000
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi	Lebak, Tangerang	Jumlah Laporan pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi (dok)	3 dok	70.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi	Lebak, Tangerang	Jumlah Laporan pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi (dok)	3 dok	40.000.000
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Lebak, Tangerang	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting (dok)	1 dok	20.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Lebak, Tangerang	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting (dok)	1 dok	40.000.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan	Lebak, Tangerang	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan (dok)	2 dok	80.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan	Lebak, Tangerang	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan (dok)	2 dok	40.000.000
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Lebak, Tangerang	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan hutan (dok)	2 dok	30.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Lebak, Tangerang	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan hutan (dok)	2 dok	40.000.000
	Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan		Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS) (%)	20 %	17.251.408.000	Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan		Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS) (%)	20 %	4.229.920.000
			Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan (Klpk)	10 Klpk				Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan (Klpk)	10 Klpk	
			Peningkatan fungsi UPT D T A HURA (%)	12,5 %				Peningkatan fungsi UPT D T A HURA (%)	12,5 %	
			Luas Lahan kritis yang ter rehabilitasi wilayah pandeglang Serang cilegon (Ha)	2.500 Ha				Luas Lahan kritis yang ter rehabilitasi wilayah pandeglang Serang cilegon (Ha)	#### Ha	
			Luas Lahan kritis yang ter rehabilitasi wilayah Lebak dan Tangerang (ha)	2.500 Ha				Luas Lahan kritis yang ter rehabilitasi wilayah Lebak dan Tangerang (ha)	#### Ha	
			Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat (Btg)	180.000 Btg				Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat (Btg)	#### Btg	
2004.120501.00.15.004.5.2	Kegiatan Pengelolaan DAS	Prov Banten	Tertindakannya pengelolaan DAS terpadu sesuai dengan pedoman teknis (dok)	5 dok	1.850.000.000	Kegiatan Pengelolaan DAS	Prov Banten	Tertindakannya pengelolaan DAS terpadu sesuai dengan pedoman teknis (dok)	5 dok	300.000.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Hutan Lahan dan Monev RHL	Prov Banten	Dokumen Perencanaan pengelolaan rehabilitasi hutan lahan dan Monev RHL (dok)	3 dok	200.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Hutan Lahan dan Monev RHL	Prov Banten	Dokumen Perencanaan pengelolaan rehabilitasi hutan lahan dan Monev RHL (dok)	3 dok	100.000.000

	Sub Kegiatan Pengembangan kelembagaan dan peningkatan fungsi DAS	Prov Banten, DAS Cidana, DAS Cibanten, DAS Ciujung, DAS Cidurian, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan.	Laporan Pengembangan kelembagaan dan peningkatan fungsi DAS (dok)	2	dok	1.650.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan kelembagaan dan peningkatan fungsi DAS	Prov Banten, DAS Cidana, DAS Cibanten, DAS Ciujung, DAS Cidurian, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan.	Laporan Pengembangan kelembagaan dan peningkatan fungsi DAS (dok)	2	dok	200.000.000
2004.120501.00.15	Kegiatan Konservasi SDA dan Ekosistem	Prov Banten	Terbinanya daerah penyangga, sumberdaya alam hayati dan ekosistem kawasan konservasi yang lestari (dok)	7	dok	825.000.000	Kegiatan Konservasi SDA dan Ekosistem	Prov Banten	Terbinanya daerah penyangga, sumberdaya alam hayati dan ekosistem kawasan konservasi yang lestari (dok)	7	dok	300.000.000
	Sub Kegiatan Pengendalian penangkaran tumbuhan dan satwa liar	Prov Banten	Laporan Pengendalian penangkaran tumbuhan dan satwa liar (dok)	1		50.000.000	Sub Kegiatan Pengendalian penangkaran tumbuhan dan satwa liar	Prov Banten	Laporan Pengendalian penangkaran tumbuhan dan satwa liar (dok)	1		40.000.000
	Sub Kegiatan Penanganan Daerah penyangga kawasan konservasi dan Lembaga Konservasi	Kab Serang dan Pandeglang	Laporan Penanganan Daerah penyangga kawasan konservasi dan Lembaga Konservasi (dok)	2		400.000.000	Sub Kegiatan Penanganan Daerah penyangga kawasan konservasi dan Lembaga Konservasi	Kab Serang dan Pandeglang	Laporan Penanganan Daerah penyangga kawasan konservasi dan Lembaga Konservasi (dok)	2		90.000.000
	Sub Kegiatan Perencanaan Pengolahan data dan Informasi kebakaran hutan lahan, Kawasan Konservasi dan ekosistem esensial	Prov Banten	Jumlah Dokumen Perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (dok)	2		75.000.000	Sub Kegiatan Perencanaan Pengolahan data dan Informasi kebakaran hutan lahan, Kawasan Konservasi dan ekosistem esensial	Prov Banten	Jumlah Dokumen Perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (dok)	2		90.000.000
	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pembentukan Taman Kehati Banten dan Lembaga Konservasi ex-situ	Kab Lebak, Kabupaten Serang	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembentukan Taman Kehati Banten dan Lembaga Konservasi ex-situ (dok)	2		300.000.000	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pembentukan Taman Kehati Banten dan Lembaga Konservasi ex-situ	Kab Lebak, Kabupaten Serang	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembentukan Taman Kehati Banten dan Lembaga Konservasi ex-situ (dok)	2		80.000.000
2004.120501.00.15	Kegiatan Penyuluhan Kehutanan	Prov Banten	Terwujudnya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan, sdm penyuluh kehutanan dan Kelenbagaan Kehutanan sesuai kompetensi (kelompok)	64	Klpk	700.000.000	Kegiatan Penyuluhan Kehutanan	Prov Banten	Terwujudnya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan, sdm penyuluh kehutanan dan Kelenbagaan Kehutanan sesuai kompetensi (kelompok)	64	Klpk	300.000.000
	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM penyuluh kehutanan	Prov Banten	Jumlah Kelompok peserta Peningkatan kapasitas SDM penyuluh kehutanan (PNS dan Swadaya) (kelompok)	2	Klpk	200.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM penyuluh kehutanan	Prov Banten	Jumlah Kelompok peserta Peningkatan kapasitas SDM penyuluh kehutanan (PNS dan Swadaya) (kelompok)	2	Klpk	50.000.000
	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan data dan informasi dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH)	Prov Banten	Jumlah Kelompok Kelembagaan data dan informasi dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH) (kelompok)	60	Klpk	350.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan data dan informasi dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH)	Prov Banten	Jumlah Kelompok Kelembagaan data dan informasi dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH) (kelompok)	60	Klpk	150.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengembangan Perhutanan Sosial	Prov Banten	jumlah kelompok Penyediaan dan pengembangan Perhutanan Sosial (kelompok)	2	Klpk	150.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengembangan Perhutanan Sosial	Prov Banten	jumlah kelompok Penyediaan dan pengembangan Perhutanan Sosial (kelompok)	2	Klpk	100.000.000
2004.120501.17.009	Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada cabang dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Prov Banten (Kab Pandeglang, Serang, Cilegon)	Terlaksananya Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Tani Hutan di Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon sesuai Target (Ha)	2500	Ha	1.750.000.000	Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada cabang dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Prov Banten (Kab Pandeglang, Serang, Cilegon)	Terlaksananya Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Tani Hutan di Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon sesuai Target (Ha)	2500	Ha	900.000.000
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	Prov Banten (Kab Pandeglang, Serang, Cilegon)	Luas Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (KBO, Pengembangan hutan rakyat, jauling, sumur resapan, pemberdayaan masyarakat) (Ha)	2500	Ha	1.750.000.000	Sub Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	Prov Banten (Kab Pandeglang, Serang, Cilegon)	Luas Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (KBO, Pengembangan hutan rakyat, jauling, sumur resapan, pemberdayaan masyarakat) (Ha)	2500	Ha	900.000.000

2004.120501.00.15.019.5.2	Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Prov Banten (Kab Lebak, Tangerang raya)	Terlaksananya Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Tani Hutan di Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai target (Ha)	2.500 Ha	5.945.000.000	Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Prov Banten (Kab Lebak, Tangerang raya)	Terlaksananya Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Tani Hutan di Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai target (Ha)	### Ha	700.000.000
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	Prov Banten (Kab Lebak, Tangerang raya)	Luas Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (Rantek, OED dan pengawasan Pemb Sumur Resapan, KBO, Jauling, HR pengkayaan, Kakija, Kakisu, Sumur Resapan, Biopori, pemberdayaan masyarakat tani hutan/ Jamur tiram dan lebah madu, Pengemb porang, monev keg) (Ha)	2.500 Ha	5.945.000.000	Sub Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	Prov Banten (Kab Lebak, Tangerang raya)	Luas Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (Rantek, OED dan pengawasan Pemb Sumur Resapan, KBO, Jauling, HR pengkayaan, Kakija, Kakisu, Sumur Resapan, Biopori, pemberdayaan masyarakat tani hutan/ Jamur tiram dan lebah madu, Pengemb porang, monev keg) (Ha)	#### Ha	700.000.000
2004.120501.00.15	Kegiatan Pengembangan/Perbenihan Tamanan Hutan	Prov Banten	Tersedianya Bibit Tamanan Kehutanan sesuai standar (btg)	180.100 btg	1.200.000.000	Kegiatan Pengembangan/Perbenihan Tamanan Hutan	Prov Banten	Tersedianya Bibit Tamanan Kehutanan sesuai standar (btg)	### btg	340.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan bibit tanaman hutan dan produktif	Prov Banten	Jumlah bibit tanaman hutan dan MPT S (btg)	180.000 btg	800.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan bibit tanaman hutan dan produktif	Prov Banten	Jumlah bibit tanaman hutan dan MPT S (btg)	#### btg	300.000.000
	Sub Kegiatan Pengembangan Tamanan Hutan dan Produktif	Prov Banten	Jumlah tanaman hutan (dan produktif) yang dikembangkan (btg)	100 btg	400.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Tamanan Hutan dan Produktif	Prov Banten	Jumlah tanaman hutan (dan produktif) yang dikembangkan (btg)	100 btg	40.000.000
2004.120501.00.15	Kegiatan Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih Tamanan Hutan	Prov Banten	Terlaksananya Sertifikasi dan pengawasan Bibit/Benih Tamanan Kehutanan sesuai SOP (dok)	4 dok	685.000.000	Kegiatan Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih Tamanan Hutan	Prov Banten	Terlaksananya Sertifikasi dan pengawasan Bibit/Benih Tamanan Kehutanan sesuai SOP (dok)	4 dok	290.000.000
	Sub Kegiatan pengendalian pengada, pengedar benih/bibit tanaman hutan	Prov Banten	Lap pembinaan pengada, pengedar benih/bibit tanaman hutan (dok)	1 dok	250.000.000	Sub Kegiatan pengendalian pengada, pengedar benih/bibit tanaman hutan	Prov Banten	Lap pembinaan pengada, pengedar benih/bibit tanaman hutan (dok)	1 dok	95.000.000
	Sub Kegiatan Pengawasan benih tanaman hutan (laporan)	Prov Banten	Laporan Pengawasan benih tanaman hutan (dok)	1 dok	50.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan benih tanaman hutan (laporan)	Prov Banten	Laporan Pengawasan benih tanaman hutan (dok)	1 dok	50.000.000
	Sub Kegiatan Sertifikasi bibit atau benih tanaman hutan dan MPT S	Prov Banten	Lap sertifikasi bibit atau benih tanaman hutan dan MPT S (dok)	1 dok	300.000.000	Sub Kegiatan Sertifikasi bibit atau benih tanaman hutan dan MPT S	Prov Banten	Lap sertifikasi bibit atau benih tanaman hutan dan MPT S (dok)	1 dok	95.000.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aliboreturn/ kebun koleksi	UPT D SPT H Ds. Pejaten Kec. Kramatwatu Kab. Serang	Laporan Aliboreturn/ kebun koleksi (dok)	1 dok	85.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aliboreturn/ kebun koleksi	UPT D SPT H Ds. Pejaten Kec. Kramatwatu Kab. Serang	Laporan Aliboreturn/ kebun koleksi (dok)	1 dok	50.000.000
2004.120501.00.15	Kegiatan Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan T A HURA	T ahura Banten	Terlaksananya perlindungan kawasan T A HURA dan Rehabilitasi kawasan T A HURA sesuai dengan peraturan pengelolaan taman hutan raya sesuai dengan peraturan pengelolaan taman hutan raya (Ha)	1595,9 Ha	2.500.000.000	Kegiatan Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan T A HURA	T ahura Banten	Terlaksananya perlindungan kawasan T A HURA dan Rehabilitasi kawasan T A HURA sesuai dengan peraturan pengelolaan taman hutan raya sesuai dengan peraturan pengelolaan taman hutan raya (Ha)	1595 Ha	200.000.000
	Sub Kegiatan Perlindungan dan pengamanan kawasan T A HURA	T ahura Banten	Luas Perlindungan dan pengamanan kawasan T A HURA (Ha)	1595,9 Ha	1.500.000.000	Sub Kegiatan Perlindungan dan pengamanan kawasan T A HURA	T ahura Banten	Luas Perlindungan dan pengamanan kawasan T A HURA (Ha)	1595 Ha	150.000.000
	Sub Kegiatan Reboisasi dan Rehabilitasi lahan serta pengawetan keanekaragaman hayati	T ahura Banten	Luasan reboisasi dan rehabilitasi serta pengawetan keanekaragaman hayati (Ha)	12,5 Ha	1.000.000.000	Sub Kegiatan Reboisasi dan Rehabilitasi lahan serta pengawetan keanekaragaman hayati	T ahura Banten	Luasan reboisasi dan rehabilitasi serta pengawetan keanekaragaman hayati (Ha)	12,5 Ha	50.000.000

2004.120501.00.15.014.5.2	Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan T A HURA	Tahura Banten	Terbangunnya sarana dan prasarana fasilitas pemanfaatan wisata sesuai RPJIP (dok)	4 dok	1.446.408.000	Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan T A HURA	Tahura Banten	Terbangunnya sarana dan prasarana fasilitas pemanfaatan wisata sesuai RPJIP (dok)	4 dok	290.000.000
	<u>Sub Kegiatan</u> Pengembangan Kawasan T A HURA Banten	Tahura Banten	Pengembangan kawasan tahura (Pengembangan data dasar Pengelolaan, Pembinaan masyarakat sekitar Tahura, Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam) (dok)	2 dok	135.000.000	<u>Sub Kegiatan</u> Pengembangan Kawasan T A HURA Banten	Tahura Banten	Pengembangan kawasan tahura (Pengembangan data dasar Pengelolaan, Pembinaan masyarakat sekitar Tahura, Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam) (dok)	2 dok	145.000.000
	<u>Sub Kegiatan</u> Pemanfaatan Kawasan Tahura Banten	Tahura Banten	Pemanfaatan Kawasan Tahura Banten (Pembangunan sarana dan prasarana Pemanfaatan, Penatagunaan Blok-blok Pengelolaan) (dok)	2 dok	1.311.408.000	<u>Sub Kegiatan</u> Pemanfaatan Kawasan Tahura Banten	Tahura Banten	Pemanfaatan Kawasan Tahura Banten (Pembangunan sarana dan prasarana Pemanfaatan, Penatagunaan Blok-blok Pengelolaan) (dok)	2 dok	145.000.000
2004.120501.17.012	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif dan Sipil T eknis Diluar Kawasan Hutan (DAK)	Prov Banten			350.000.000	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif dan Sipil T eknis Diluar Kawasan Hutan (DAK)	Prov Banten			609.920.000
			Penanaman Hutan Rakyat	300 Ha	350.000.000			Penanaman Hutan Rakyat	300 Ha	585.000.000
			Kegiatan Penunjang	keg	-			Kegiatan Penunjang	keg	24.920.000
	TOTAL				59.135.740.000				-	19.000.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Pemangku Kepentingan)

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, LSM, asosiasi-asosiasi atau perguruan tinggi seperti disajikan dalam Tabel 2.15 berikut ini :

Tabel 2.15 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021

a. Kabupaten/Kota

No	Kab/Kota	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Latar Belakang	Output	Jumlah Pagu Usulan (Rp)	Keterangan	Tindakan lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	KOTA SERANG							
		1 Mesin Karbonase	Kota Serang (TPS3R)	- Untuk Land clearing di TPA (mesin Kapasitas 5 M3/hari dimensi panjang 2 m lebar 1 m dan tinggi 2,8 m.)	2 Unit	2.000.000.000		Bankeu
				- Untuk Sampah Daily (Mesin Kapasitas 10 M3/hari dimensi panjang 2,4 m lebar 1,2 m dan tinggi 2,8 m.)				Bankeu
		2 Penyediaan Sarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kota Serang	Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kebersihan di Kota Serang				
					Kendaraan Penyapu Jalan 1 unit	2.000.000.000		Bankeu
					Excavator Mini 1 Unit	800.000.000		Bankeu
					Mobil Pengangkut Excavator 1 Unit	2.200.000.000		
					Gerobak Sampah 50 Unit	250.000.000		Bankeu
					Bak Kontainer 50 Unit	1.500.000.000		Bankeu
					Amroll 2 Unit	900.000.000		Bankeu
					Pemeliharaan Lahan (tanaman) 1 paket	250.000.000		
					Pengujian Emisi Kendaraan 1 paket	100.000.000		DAK Kota
					Exapator Jumbo 1 unit	2.000.000.000		DAK Kota
					IPAL (Pengolah Air Lindi) 1 paket	3.500.000.000		DAK Kota
	Jumlah Kota Serang					15.500.000.000		
II	KABUPATEN LEBAK							
		1 Sistem Pengelolaan Persampahan	Ciboleger kec. Leuwidamar	Sebagai bentuk upaya pengurangan dan penanganan sampah	Tersedianya Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (Pusat Daur Ulang• PDU)	2.500.000.000	Kegiatan pengelolaan Sampah dan Limbah B3	
			Citerek Kidul kec. Cibeber	Sebagai bentuk upaya pengurangan dan penanganan sampah	Tersedianya Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (Pusat Daur Ulang• PDU)	2.500.000.000	Kegiatan pengelolaan Sampah dan Limbah B4	APBD Prov
			Sawama Kec Bayah	Sebagai bentuk upaya pengurangan dan penanganan sampah	Tersedianya Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (Pusat Daur Ulang• PDU)	2.500.000.000	Kegiatan pengelolaan Sampah dan Limbah B5	

		2 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Sindangmulya, Maja, Lebak (TPA Dengung)	Sebagai bentuk upaya pengurangan dan penanganan sampah'	Tersedianya SistemPengelolaan Air LimbahDomestik Selempal Skala Kola(Peningkatan PLT)	2.000.000.000	Kegiatan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Bankeu
		3 Penyehatan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat	Muara Ciujung Baral,Rangkasbitung, Lebak	Sebagai bentuk upaya ketaatan terhadap izin Lingkungan dan peningkatan kualitas air	Tersedianya SistemPengelolaan Air LimbahDomestik Terpusat BerbasisMasyarakat (IPAL Industri UKM Tahu, 3 lokasi pada	1.500.000.000	Kegiatan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	APBD Prov
		4 Pengembangan PenyelenggaraanPenataan Bangunan dan Lingkungan	Cijoro pasir, Rangkasbitung,Lebak	Sebagai bentuk upaya mengelola ruang terbuka hijau	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (Taman Angklung)	1.200.000.000	Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	APBD Prov
	Jumlah Kab Lebak					12.200.000.000		
III	KABUPATEN PANDEGLANG	1 Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	Desa Margasana Kec Pagelaran	Rusaknya hutan rakyat akibat bencana tsunami selat sunda	Tersedianya hutan mangrove 5 Ha	150.000.000	Kegiatan Pengelolaan DAS	APBD Prov
		(Hutan Mangrove)					Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada cabang dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	
			Desa Cigorondong Kec. Sumur	Rusaknya hutan bakau akibat bencana tsunami	Tersedianya hutan mangrove 18,5 Ha			
		2 Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (Hutan Rakyat/Reklamasi)	Desa Pasir Angin, Kecamatan Cadasari	Kerusakan Akibat Tambang Liar Galian C	Terlindungnya masyarakat dari pencemaran dan bencana akibat kerusakan lingkungan	200.000.000	Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada cabang dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	
							Kegiatan Pengelolaan DAS /	APBD Prov

		3 BinteK dan Diklat PPLH dan Petugas Lab		Masih kurangnya tenaga PPLH dan Analisis Lab	Bertambahnya tenaga PPLH dan Analisis Lab	50.000.000	Kegiatan Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan ; Gakum Koordinasi dgn bpsdm (Kegiatan yang dilaksanakan hanya binteknya saja petugas Lab)	APBD Prov
	Jumlah Kab Pandeglang					400.000.000		
IV	KABUPATEN TANGERANG							
		1 Pelatihan pengambil sampel air dan udara	Badan Diklat Prov Banten	Kompetensi pengambil sampel	Pengambil sampel		Kegiatan Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan	APBD Prov
		2 Sertifikasi BNSP pengambil sampel Air dan udara	Badan Diklat Prov Banten	persyaratan penambahan ruang lingkup	Tim pengambil sampel			Kordinasi dengan BPSDM Prov
	Jumlah Kab Tangerang							
V	KOTA CILEGON							
		1 Pengadaan cator untuk pelayanan angkutan limbah medis	Kota Cilegon	Belum tersedianya alat angkutan pelayanan limbah medis yang berasal dari klinik dan puskesmas	2 unit	150.000.000	Kegiatan pengelolaan Sampah dan Limbah B3	APBD Prov
		2 Pembangunan Masaro (Manajemen Sampah Zero)	Kota Cilegon	Masih kurangnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat	1 unit	2.800.000.000	Kegiatan pengelolaan Sampah dan Limbah B3	APBD Prov
		3 Pengadaan Mobil Pengawasan Tipe 4x4 WD Double Cabin	Kota Cilegon	Masih kurangnya kendaraan operasional pengawasan lingkungan hidup	3 unit	1.800.000.000		Bankeu

		4 Pengadaan Sarana Prasarana IPLT	Kota Cilegon		1 paket	2.000.000.000		Dak /Kab Kota
		5 Pengadaan Sarana Prasarana Bank Sampah	Kota Cilegon	Peningkatan jumlah Bank Sampah	3 Unit	75.000.000	Kegiatan pengelolaan Sampah dan Limbah B3	APBD Prov Pembinaan Paguyuban Bank Sampah
		6 Pembangunan Drainase vertikal (Sumur Resapan)	Kota Cilegon (Pemukiman Masyarakat)	Penanganan banjir	10 Unit	120.000.000	RHL PSC	APBD Prov
		7 Penghijauan	Kota Cilegon		1000 pohon	60.000.000	Kegiatan Pengelolaan DAS	PDAS
		8 Kampung Iklim	Kota Cilegon		sarana proklam	50.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan Hidup	APBD Prov
	Jumlah Kota Cilegon					7.055.000.000		
VI	KOTA TANGERANG							
		1 Peningkatan penghijauan kota	Kota Tangerang	UU No.32 Tahun 2009, Keppres No.24 Tahun 2008	Jumlah Tanaman	200.000.000	Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada cabang Dinas LHK Wilayah Lebak	APBD Prov
							Kegiatan Pengelolaan DAS	

		2 Unit pemantau kualitas air dan udara bergerak (mobile)	Kota Tangerang	UU No. 32 Tahun 2009	Banyaknya alat pembantu kualitas air dan udara bergerak (mobile)	5.000.000.000	Kegiatan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	DAK
		3 Pengadaan alat monitoring udara ambien (AQMS)	Zona industri	Diperlukan fasilitas pengukuran kualitas lingkungan berupa peralatan yang mampu menghasilkan data akurat	Banyaknya stasiun (pos) pemantauan udara yang terbangun sebanyak 1 unit	1.400.000.000	DAK	DAK
		4 Pengadaan alat monitoring air sungai (WQMS)	Bagian hulu sungai cisadane, sekitar rumah makan istana nelayan	Diperlukan fasilitas pengukuran kualitas lingkungan berupa peralatan yang mampu menghasilkan data akurat	5 orang mediator sengketa lingkungan hidup	900.000.000	DAK	DAK
		5 Bintek mediator penyelesaian sengketa lingkungan hidup	yogyakarta	Pengadaan pengaduan yang membutuhkan tenaga mediasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup	5 (lima) orang pejabat pengawas lingkungan hidup	100.000.000	Diakomodir di seksi Gakum berkoordinasi dgn BPSDM	Gakum APBD Prov
		6 Bintek pejabat pengawas lingkungan hidup	yogyakarta	Proses verifikasi lapangan penanganan pengaduan membutuhkan tenaga pengawas lingkungan hidup	5 (lima) orang penyusun lingkungan hidup	100.000.000		BPSDM Prov Banten
		7 Bintek penyusunan sanksi administrasi	Bogor	Proses penyusunan sanksi administrasi pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	5 (lima) orang penyusun administrasi	100.000.000		BPSDM Prov Banten
		8 Bintek perhitungan kerugian akibat pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	Semarang	Proses perhitungan kerugian akibat pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	5 (lima) penghitung kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100.000.000		BPSDM Prov Banten

		9 Bimtek penyusunan RPJMN, EDS,dan IPML untuk sekolah adiwiyata	Tangerang	Tim pembina belum mengerti penyusunan RPJMN, EDS,IPMLH	20 orang tim pembina dan 55 penilik	200.000.000		BPSDM Prov Banten
		10 Bimtek pembekalan tim pembina adiwiyata	Tangerang	Tim Pembina belum memahami perubahan indikator dalam perubahan permenLHK	100 CSK, 100 CSAP, +G74:G11950 SCAN dan CSAM	50.000.000		BPSDM Prov Banten
		11 Bimtek perhitungan sistem registrasi nasional (SRN) kampung iklim	Jakarta	Masih ditemukan petugas pengisi SRN yang belum memahami pengisian SRN	100 orang petugas pengisian SRN	100.000.000		BPSDM Prov Banten
		12 Kegiatan sosialisasi pelaksanaan proklam di calon kampung iklim nasional	Tangerang	Lokasi binaan kampung iklim belum memahami kegiatan proklam mulai persiapan,pelaksanaan, evaluasi dan keberlanjutan	200 orang ketua kampung iklim	150.000.000	Keg. Pemeliharaan Lingkungan	APBD Prov
		13 kegiatan pembinaan saka kalpataru	Bogor	Fasilitas kegiatan dukungan saka kalpataru	50 orang saka kalpataru, pamong dan instruktur	100.000.000	Keg. Peningkatan Kapasitas	APBD Prov
		14 pelatihan desain permaculture	Yogyakarta	Penanganan permasalahan lingkungan hidup terutama permasalahan persampahan untuk aplikasi di masyarakat	10 orang tim pendamping pelatihan di masyarakat	120.000.000		
		15 Pelatihan waste to energy	Surabaya	Penanganan persampahan dengan pendekatan teknologi agar menghasilkan energi	10 orang	85.000.000		
		16 Pelatihan pengolahan sampah dengan black fly soldier	Bogor	Penanganan persampahan dengan menggunakan black fly soldier	30 orang tim TPS 3R	50.000.000	Paguyuban Bank sampah	
		17 Pengolahan sampah intermediate treatment facility (ITF) wilayah timur	Kecamatan cipondoh	Dalam rangka mengurangi jumlah sampah yang harus di buang ke TPA	Bangunan dan permesinan	50.000.000.000		

		18	Pengadaan truk sampah compactor 10 m3	Kota Tangerang	Untuk efisiensi biaya operasional pengangkutan sampah	5 unit	20.000.000.000	Kegiatan pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Bankeu
		19	Pengadaan truk sampah compactor 6 m3	Kota Tangerang	Untuk efisiensi biaya operasional pengangkutan sampah	5 unit	15.000.000.000	Kegiatan pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Bankeu
		20	Pengadaan Sweeper 10 m3	Kota Tangerang	Untuk efisiensi biaya operasional pengangkutan sampah	3 unit	12.000.000.000	Kegiatan pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Bankeu
		21	Pengadaan Sweeper 6 m3	Kota Tangerang	Untuk efisiensi biaya operasional pengangkutan	2 unit	6.000.000.000	Kegiatan pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Bankeu
		22	Pembangunan RTH dan turap sungai cisadane sepanjang 5 KM	Kota Tangerang	Peningkatan RTH dan penataan sungai	1 paket	100.000.000.000	Keg RHL CDK LT dan PDAs	CDLHK /Perkim
		23	Bantuan biaya layanan pengolahan sampah (BLPS)/TIPPING FEE	Kota Tangerang	Dalam rangka mendukung proyek strategis nasional PLTSa Kota Tangerang	Biaya Tipping Fee Tahunan	44.457.000.000	87 Ribu/Ton X 1400 Ton x 365 hari	
	Jumlah Kota Tangerang						256.212.000.000		
VII	KABUPATEN SERANG								
		1	Pengawasan kegiatan usaha di wilayah pesisir yang memanfaatkan perairan laut	Kramatwatu, Bojonegara, Puloampel	Sesuai UU 23/2014, perairan laut 0-12 mil merupakan kewenangan propinsi, sehingga kegiatan/usaha sepanjang pesisir yang memanfaatkan areal perairan laut menjadi kewenangan propinsi (industry, reklamasi, pemotongan kapal, dsb)	Penaatan pelaku kegiatan usaha terhadap aturan lingkungan	300.000.000,00	Keg Gakum	APBD Prov
		2	Penyusunan naskah akademik dan pembuatan keputusan gubernur tentang penetapan peruntukan kelas air sungai ciujung, cidurian, cibanten dan	Kab serang	Sesuai PP 82/2001, sungai lintas kabupaten kota yang berada dalam 1 propinsi merupakan kewenangan propinsi	Keputusan gubernur tentang peruntukan klas sungai	300.000.000,00	Keg Pengendalian Pencerna	APBD Prov

		3	Pengawasan terpadu kegiatan pertambangan	Bojonegara	Kejadian banjir bandang di bojonegara dan pulo ampel yang diperkirakan dampak kegiatan penambangan perlu menjadi perhatian. Kewenangan legalitas kegiatan pertambangan pada berbagai instansi (kabupaten dan propinsi) memerlukan keterpaduan tindak dalam pengawasannya.	Kegiatan penambangan sesuai ketentuan	400.000.000,00	Keg Gakum	APBD Prov
				Pulo ampel					
						Pengelolaan lingkungan penambangan berjalan sesuai ketentuan			
		4	Optimalisasi kinerja dan tindak lanjut forum DAS ciujung	Sungai ciujung	Pengelolaan terpadu wilayah sungai (one river, one manajemen). Kurang aktifnya	Fgd	400.000.000,00	Kegiatan Pengelolaan DAS	APBD Prov
						Pelaksanaan tindak lanjut rencana kerja			
		5	Pembentukan Forum DAS Cidurian dan Cibanten	Prop Banten	Kejadian banjir, kekeringan dan penurunan kualitas sungai, perlu dilakukan system manajemen pengelolaan yang terpadu.	Fgd	350.000.000,00	Kegiatan Pengelolaan DAS	APBD Prov
						Pembentukan forum DAS			
						Action plan			
		6	Bantuan sarana peralatan pengelolaan persampahan (cator)						Bankeu
		7	Pemantauan kualitas air laut di wilayah kab. Serang	Kramatwatu	Sesuai UU 23/2014, perairan laut	Hasil uji kualitas air laut	300.000.000,00	Keg Pengendalian Pencema	APBD Prov
				Bojonegara	0-12 mil merupakan kewenangan propinsi				
				Pulo Ampel					
				Anyer					
				Cinangka					

		8 Sosialisasi dan bantuan peralatan untuk kegiatan pengurangan sampah pada masyarakat	Pabuaran	Sesuai UU 18/2008 kegiatan pengurangan sampah meliputi penanganan dan pengurangan sampah. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat melakukan pengurangan sampah. Kabupaten/kota berwenang dalam pelayanan penanganan sampah. Propinsi dapat berperan dalam memfasilitasi masyarakat untuk pengurangan sampah	Tumbuhnya kelompok 3R di masyarakat	300.000.000,00	Usulan Bank sampah melalui paguyuban Bank Sampah	
			Tirtayasa					
			Bandung					
	Jumlah Kab Serang					2.350.000.000,00		
VIII	KOTA TANGERANG SELATAN							
		A Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						
		1. Gerobak Sampah	Tangerang Selatan		Tersedianya 100 unit	350.000.000	Kegiatan pengelolaan Sampah dan Limbah B3	APBD Prov /Paguyuban Bank Sampah
		2. Motor Roda 3 Sampah			Tersedianya 37 Unit	1.850.000.000	Kegiatan pengelolaan Sampah dan Limbah B3	
		3. Bank Sampah Induk			1 Paket	2.000.000.000		Paguyuban Bank Sampah
		B. Pengelolaan Persampahan dan UPTD Laboratorium Pengelolaan Persampahan						
		1. Excavator Long Arm			Tersedianya 2 Unit Excavator Long Arm	4.400.000.000		Bankeu
		2. Excavator Spider			Tersedianya 2 Unit Excavator Spider	10.000.000.000		Bankeu
		3. Truck Tronton 24 m ³			Tersedianya 2 Unit Truck Tronton	2.000.000.000		Bankeu
		4. Incenerator Kap. 5 Ton per hari			Tersedianya 5 Unit Incenerator	5.000.000.000		Bankeu
		5. Hanggar (Penyimpanan Alat			Tersedianya 1 hanggar	2.000.000.000		Bankeu
		6. Gudang Penyimpanan Alat Ops			Tersedianya 1 Gudang	300.000.000		Bankeu
		7. Sistem/Sensor Identifikasi Kendaraan			Tersedianya 1 sistem	200.000.000		Bankeu

		C. Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup						
		1. Kendaraan Operasional Pengaduan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup			Menjalankan operasional pengaduan dan penataan hukum lingkungan hidup	495.000.000		Bankeu
		D. Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran						
		1. AQMS (Alat Ukur Kualitas Udara)			Hasil pemantauan yang ditanyakan dalam parameter pantau yang diolah menjadi ISPU	2.500.000.000		DAK Kab/Kota
		2. Alat Pantau Air			Hasil pemantauan kualitas air yang diolah menjadi IKA	300.000.000		DAK Kab/Kota
		3. Portable Dust Sampler (PM 2.5)			Hasil pemantauan kualitas udara PM 2.5	200.000.000		DAK Kab/Kota
		E. Optimalisasi Fungsi Analisis Laboratorium Lingkungan						
		1. Pengadaan MPAES (AAS Bertenaga Nitrogen)			Tersedianya MPAES (AAS Bertenaga Nitrogen)	3.580.000.000		DAK Kab/Kota
		2. Pengadaan Mobil Laboratorium Keliling + Peralatan			Tersedianya Mobil Laboratorium keliling+peralatan)	1.200.000.000		DAK Kab/Kota
		3. Pengadaan Alat Tes Khusus Mikrobiologi E.Coli			Tersedianya alat tes khusus mikrobiologi E.Coli	650.000.000		DAK Kab/Kota
		4. Pengadaan Automatic UPS			Tersedianya automatic UPS	250.000.000		DAK Kab/Kota
		5. Pengadaan Water Sampler			Tersedianya water sampler (Vertical dan Horizontal)	120.000.000		DAK Kab/Kota

		6. Pengadaan Alat Pemantau Udara Skala Kota (AQMS)			Tersedianya Alat Pemantauan Udara Skala Kota (AQMS)	2.350.000.000		DAK Kab/Kota
		7. Pengadaan Alat Laboratorium Udara			Tersedianya alat laboratorium udara	1.500.000.000		DAK Kab/Kota
		F. Fasilitas Program Perubahan						
		1. Penanaman Ruang Terbuka Hijau dan Pemeliharaan Tanaman Keanekaragaman Hayati			Pemeliharaan Hutan Kota		Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	APBD Prov
	Jumlah Kota Tangsel					41.245.000.000		
	TOTAL					334.962.000.000,00		

b. Stakeholder lainnya

No	Stakeholder	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Latar Belakang	Output	Jumlah Pagu Usulan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LMDH	1 BinteK penguatan kelembagaan LMDH					RHL CDLHK PSC
		2 Embung untuk meningkatkan produktifitas tanaman di luar kawasan hutan	Cibaliung, Cigeulis, mandalawangi				RHL CDLHK PSC
		3 budidaya madu	kel. Cijoro				RHL CDLHKLT
		4 KBD	kec. Cileles ds. Cikareo, kec. Cikurur ds. Parage				RHL CDLHKLT
2	FMU	1 bantuan mesin senso					Kegiatan Pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan
		2 mesin tepung porang					Kegiatan Pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan
		3 benih jahe					Kegiatan Pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan
		4 benih porang					Kegiatan Pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan

3	Palapa Ngariksa Bumi	1	budidaya nilam	kec. Cisata			RHL CDLHK PSC
		2	sosialisasi aturan				peningkatan kapasitas LH
		3	Pemantauan Adipura				peningkatan kapasitas LH
4	paguyuban bank sampah	1	lubang biopori (Jumbo)	kec. Priuk jaya			Kegiatan pengelolaan Sampah dan Limbah B3
				(Tangerang)			RHL CDLHKLT
5	Palapa Ngariksa Bumi		Bantuan Kendaraan Roda 3	Kab Pandeglang		2 Unit	Kegiatan pengelolaan Sampah dan Limbah B3
			(Warung Sampah)	(kawasan pantai)			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 adalah RKP Kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode Tahun 2020-2024, sasaran laju pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut ditargetkan pada kisaran 5,7 - 6,0 persen, yang selanjutnya diharapkan membuka lapangan kerja dan menurunkan angka pengangguran hingga 3,6 - 4,3 persen. Sejalan dengan itu tingkat kemiskinan diharapkan turun hingga 6,0 - 7,0 persen. Untuk pembangunan manusia ditargetkan meningkat hingga mencapai nilai 75,54 dan tingkat ketimpangan antar kelompok diharapkan berada pada indeks 0,36 - 0,37. Sesuai dengan arahan RPJMN, maka RKP 2021 akan memuat 7 agenda pembangunan yang meliputi pembangunan ekonomi, pengembangan wilayah, pembangunan sumber daya manusia, revolusi mental, pembangunan infrastruktur, **pelestarian lingkungan hidup**, dan stabilitas polhukhankam. Untuk mencapai sasaran jangka menengah RPJMN memuat 41 proyek prioritas strategis yang memiliki daya ungkit tinggi, seperti percepatan pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas, penanganan stunting dan kematian ibu, dan penuntasan jalan tol Trans Sumatera dari Aceh hingga Lampung.

Tema RKP 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat” dengan fokus Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi Penguatan Sistem Kesehatan Nasional. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021 adalah (i) pulihnya perekonomian nasional pasca dampak Covid-19 ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1-5,5 persen; (ii) menurunnya tingkat kemiskinan hingga kisaran 8,3-8,8 persen, terciptanya lapangan kerja berkualitas ditandai tingkat pengangguran di level 4,8-5,2 persen; (iv) meningkatnya pembangunan manusia ditandai angka IPM 73,0; dan (v) menurunnya tingkat ketimpangan ditandai Rasio Gini 0,373-0,376. RKP 2021 disusun dengan semangat menyusun kebijakan yang konkret dan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat. Oleh karena itu 41 proyek prioritas strategis (major project) akan menjadi fokus dalam rencana dan anggaran. Pelaksanaan proyek-proyek strategis ini dilaksanakan sesuai dengan kesiapan dan pentahapan

proyek. Beberapa major project yang mendukung langsung tema RKP 2021 akan didahulukan. Beberapa contohnya antara lain: 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, 9 kawasan industri di luar Jawa, industri 4.0 di 5 subsektor prioritas, pendidikan dan pelatihan vokasi, dan jaringan pelabuhan terpadu.

Beberapa arahan terkait pembangunan Provinsi Banten diidentifikasi menjadi tiga isu strategis yang memerlukan pendekatan lintas-sektor dan penanganan yang konsisten dalam pembangunan Provinsi Banten. Pertama tentang pemulihan kondisi sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dari data sementara tentang perkembangan wabah Covid-19 ini, Provinsi Banten merupakan provinsi keempat tertinggi kasus positif Covid-19. Diperlukan pemantauan yang ketat disertai disiplin yang tinggi dari segenap masyarakat untuk menjalankan physical distancing untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Oleh karena itu, kerjasama pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan di Banten untuk menjalankan arahan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar ini. Keberhasilan kita mengatasi penyebaran virus ini akan menjadi kunci bagi pemulihan sosial ekonomi wilayah Banten. Jika kita bisa mengatasi pandemi ini dengan relatif cepat, maka faktor-faktor produksi tidak terlalu lama menganggur (idle) atau rusak sehingga roda perekonomian bisa segera berputar dengan kapasitas penuh.

Arahan pemerintah Pusat khususnya Kemenerian Dalam Negeri dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah antara lain : 1) Reformulasi target kinerja pemda dampak pandemik Covid-19. 2) Fokus pembangunan paska Covid-19 terutama pada sektor: kesehatan, lapangan kerja, dan pangan. 3) Daerah dapat mengalokasikan belanja hibah dan bantuan sosial sebagai rangkaian paska pandemik Covid-19. 4).Efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah daerah. 5) Memperhatikan dan melakukan sinkronisasi serta berkontribusi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN terutama kebijakan pembangunan Wilayah Jawa Bali dan Major Project yang akan dilaksanakan di Provinsi Banten. 6). Mempedomani RKP Tahun 2021. 7). Memperhatikan hasil Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah dilaksanakan pada Bulan Maret Tahun 2020 yang bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka mencapai target pembangunan Nasional. 8) Dapat memanfaatkan dan mengintegrasikan SIPD dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKP. 9)

Memperhatikan kewenangan tiap-tiap tingkatan pemerintahan daerah dalam penyusunan program/kegiatan.

Isu yang kedua Isu kedua adalah kesenjangan pembangunan antara Banten bagian pesisir utara dan bagian pesisir selatan. Kawasan utara telah menjadi pusat investasi, jasa, dan industri. Dengan kepadatan penduduknya yang tinggi didukung oleh infrastruktur konektivitas, kawasan utara berpotensi untuk terus berkembang karena keuntungan aglomerasinya. Sementara itu kawasan selatan yang sebenarnya juga punya potensi besar relatif tertinggal. Oleh karena itu diperlukan upaya strategis yang komprehensif untuk mengembangkan kawasan pesisir selatan. Pengembangan sumber daya manusia tidak bisa ditawar, dengan didukung ekspansi infrastruktur. Dari sisi strategi, perlu dicari arah pengembangan yang saling komplementer atau setidaknya tidak saling mematikan. Jika di utara berorientasi jasa dan industri, mungkin di selatan lebih berpotensi sebagai wilayah pariwisata, yang didukung dengan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai.

Isu strategis yang terakhir peran industri manufaktur yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Padahal, sektor industri merupakan sektor dengan kontribusi tertinggi di Banten, sekaligus penyerap tenaga kerja yang utama. Perlu ada skema atau insentif untuk industri baru yang akan dikembangkan di Banten, termasuk juga penyederhanaan perizinan untuk menarik investasi. Berdasarkan Isu Strategis tersebut, maka arah kebijakan di Banten untuk tahun 2021 diarahkan untuk: (i) mengurangi kesenjangan pembangunan antara Banten bagian utara dan bagian selatan; (ii) meningkatkan investasi dan mengembangkan pariwisata kelas dunia di Tanjung Lesung; (iii) mendorong pengembangan ekonomi kreatif khususnya ekonomi digital yang mengoptimalkan kekayaan budaya lokal; (iv) meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerjasama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah; dan (v) **menjaga daya dukung lingkungan hidup**.

Untuk itu perhatian terhadap sektor lingkungan Hidup dan kehutanan tetap menjadi bagian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi Banten khususnya. Pertumbuhan ekonomi atau industri harus diiringi dengan peningkatan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan hidup secara umum yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2. Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2021 merupakan tahun ke-4 pelaksanaan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017- 2022. Sebagai bagian dari RPJMD, RKPD dilaksanakan untuk mewujudkan Visi RPJMD, yaitu: **Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah**. Visi Provinsi Banten Tahun 2017-2022 tersebut akan diwujudkan melalui lima misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2021, yaitu **“AKSELERASI DAYA SAING DAERAH MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANTAPAN INFRASTRUKTUR”**, tema ini ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Banten sebagai bagian dari upaya pencapaian target pembangunan yang harus selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.

Dalam kaitannya dengan visi dan misi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dan didasari permasalahan pembangunan yang sudah dipetakan maka perumusan prioritas pembangunan daerah dapat diidentifikasi menjadi isu strategis. Berikut isu strategis pembangunan Provinsi Banten tahun 2021:

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
2. Peningkatan Transformasi Ekonomi
3. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
4. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur

Dari isu strategis di atas dapat ditetapkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang diarahkan untuk:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Melalui Pembangunan Akses & Mutu Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Life Skill.
2. Penguatan Pembangunan Infrastruktur.
3. Penguatan Daya Saing Perekonomian.

4. Reformasi Birokrasi Melalui Pemantapan 8 (Delapan) Area Perubahan (Manajemen Perubahan, Panataan Peraturan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik).

Dari Prioritas tersebut dengan Fokus Pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Melalui Pembangunan Akses & Mutu Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Life Skill, dengan fokus pembangunan sebagai berikut :
 - a. Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB) SMA, SMK DAN Sekolah Khusus; b. Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS dan BOSDA);
 - b. Peningkatan mutu pendidikan SMA, SMK dan Sekolah Khusus;
 - c. Pengadaan Saprang Gedung Life Skill (Pemuda);
 - d. Penyediaan Jaminan Sosial dan Kesehatan Masyarakat Miskin;
 - e. Pengembangan Rumah Sakit Ciligrang;
 - f. Pengembangan Rumah Sakit Malingping;
 - g. Pengendalian Stunting;
 - h. Pembangunan Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat;
 - i. Pembangunan RSUD Banten Sebagai RS Rujukan Regional (Multi Years);
 - j. Peningkatan Saprang Balai Latihan Kerja
2. Penguatan Pembangunan Infrastruktur, dengan fokus pembangunan sebagai berikut:
 - a. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan/ Jembatan Kewenangan Provinsi;
 - b. Pembangunan Jalan untuk Membuka Interkoneksi antar Wilayah;
 - c. Pembangunan Sport Centre (Multiyears);
 - d. Pembangunan Infrastruktur mendukung Pengembangan Perekonomian Daerah dan Kawasan Strategis Provinsi;
 - e. Pemenuhan Elektrifikasi (Listrik Perdesaan);
 - f. Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
 - g. Penataan Kawasan Kumuh;
 - h. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU);
 - i. Pembangunan dan Pemeliharaan PJU;
 - j. Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
3. Penguatan Daya Saing Perekonomian, dengan fokus pembangunan sebagai berikut:

- a. Peningkatan produksi pertanian dan Perkebunan;
 - b. Peningkatan produksi Kelautan dan perikanan;
 - c. Penataan destinasi wisata;
 - d. Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi;
 - e. Peningkatan akses modal dan pasar untuk Koperasi, industri kecil dan ekonomi kreatif;
 - f. Peningkatan Kemudahan Pelayanan perijinan bagi investor;
 - g. Memperkuat Link and Match antara Dunia Usaha/Industri dengan lembaga pendidikan kejuruan
2. Reformasi Birokrasi Melalui Pemantapan 8 (Delapan) Area Perubahan (Manajemen Perubahan, Panataan Peraturan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik), dengan fokus pembangunan sebagai berikut :
- a. Peningkatan kualitas perencanaan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan;
 - b. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah; c. Reformasi Birokrasi (8 Area Perubahan) (Manajemen Perubahan, Panataan Peraturan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - c. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Adapun Sinkronisasi Prioritas, Sasaran dengan Program Pembangunan Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Sinkronisasi Prioritas, Sasaran dengan Program Pembangunan Tahun 2021

No	Sasaran RKPD	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	OPD
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	Penguatan Daya Saing Perekonomian	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	DLHK

			Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	DLHK
	Meningkatnya pengelolaan daerah aliran sungai melalui konservasi sumber daya alam		Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	DLHK
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Reformasi Birokrasi Melalui Pemantapan 8 (Delapan) Area Perubahan (Manajemen Perubahan, Panataan Peraturan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	
			Program Tata Kelola Pemerintahan Seluruh OPD	Semua OPD

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja DLHK Provinsi Banten

Misi dan Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten periode 2017-2022 untuk bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, adalah :

5. Misi ke-1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
 - Tujuan : Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sumberdaya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat,
6. Misi ke-5 : Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
 - Tujuan : Meningkatnya perekonomian secara berkelanjutan berbasiskan potensi ekonomi lokal

Tujuan Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2020 adalah :

- **Tujuan 1** : *Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran*
- **Sasarannya Renstra** : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien
- **Indikator Kinerja Sasaran** : 1. *Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Banten target tahun 2020 adalah : Nilai A*
- **Tujuan 2** : Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem
- **Sasarannya Renstra** : 1. Meningkatkan Lingkungan Hidup yang berkualitas
2, *Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal*
- **Indikator Kinerja Sasaran** : 1. *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup target pada tahun 2020 adalah : 51,83 (satuan nilai)*
2. *Rasio Cakupan Tutupan Hutan target pada tahun 2020 adalah : 32,71 %*

3.4. Program dan Kegiatan

Dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 130/736/SJ Tanggal 27 Januari 2020 Tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diharapkan mengambil Langkah Langkah percepatan melalui integrasi proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada satu platform Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melaksanakan proses Pemetaan (mapping) dan pemutakhiran terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak merubah target dan indikator dalam RPJMD.

Sesuai dengan hasil pemetaan dan pemutakhiran program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten melaksanakan 10 Program dan 52 Kegiatan yang dilaksanakan pada Unit Induk dan UPTD dan Cabang Dinas. Rencana Program kegiatan dan Sub Kegiatan beserta pagu indikatif dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.2 Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 (setelah Pemetaan Permendagri 90 Tahun 2019)

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Program	Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif RKPD	Pagu Rancangan KUA-PPAS 2021	Keterangan
1	2	3	5	6	7		8
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
		1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		350.000.000	350.000.000	
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000	100.000.000	
				2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	10.000.000	
				3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	10.000.000	
				4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	10.000.000	
				5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	10.000.000	
				6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90.000.000	90.000.000	
				7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.000.000	120.000.000	
			2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		31.734.000.000	31.734.000.000	
				8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.684.000.000	30.509.116.000	
				9 Penyediaan Administrasi	7.000.000	1.181.884.000	
				10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.000.000	7.000.000	
				11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.000.000	7.000.000	

	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.000.000	7.000.000	
	13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.000.000	7.000.000	
	14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	8.000.000	8.000.000	
	15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.000.000	7.000.000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		101.000.000	21.000.000	
	16	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	101.000.000	21.000.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		124.800.000	104.800.000	
	17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	79.800.000	79.800.000	
	18	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.000.000	25.000.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		661.039.000	477.559.000	
	19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.350.000	25.350.000	
	20	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	208.225.000	134.225.000	
	21	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.464.000	55.464.000	
	22	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	67.000.000	67.000.000	
	23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.000.000	60.000.000	UMUM (pagu perpustakaan tetap)
	24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	130.520.000	
	25	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	5.000.000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		121.430.000	121.430.000	
	26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.430.000	83.430.000	
	27	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	38.000.000	38.000.000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.695.701.000	6.695.701.000	
	28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	522.042.456	522.042.456	
	29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	6.173.658.544	6.173.658.544	

8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		428.110.000	355.110.000	
	30 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.400.000	55.400.000	
	31 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.550.000	132.550.000	
	32 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	206.000.000	133.000.000	
	33 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.160.000	34.160.000	
9 Administrasi Umum Perangkat Daerah		125.000.000	111.000.000	UPTD Lab. Ling
	34 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.425.000	2.425.000	
	35 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.372.500	20.372.500	
	36 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.000.000	72.000.000	
	37 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.202.500	1.202.500	
	38 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000	15.000.000	
10 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5.000.000	5.000.000	
	39 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	5.000.000	
11 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		357.600.000	357.600.000	
	40 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	357.600.000	357.600.000	
12 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		162.400.000	142.400.000	
	41 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.900.000	120.900.000	
	42 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	41.500.000	21.500.000	

13 Administrasi Umum Perangkat Daerah		108.500.000	102.430.000	CDLHK LT
	43 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.100.000	2.100.000	
	44 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.476.000	15.476.000	
	45 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.094.000	56.094.000	
	46 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.060.000	9.060.000	
	47 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	4.700.000	
	48 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.570.000	15.000.000	
14 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5.000.000	5.000.000	
	49 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	5.000.000	
15 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		194.600.000	194.600.000	
	50 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.600.000	39.600.000	
	51 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	155.000.000	155.000.000	
16 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		66.900.000	66.900.000	
	52 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.000.000	51.000.000	
	53 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	15.900.000	15.900.000	
17 Administrasi Umum Perangkat Daerah		163.000.000	137.000.000	CDLHK PSC
	54 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.500.000	20.000.000	
	55 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.600.000	69.600.000	
	56 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.100.000	24.100.000	
	57 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.800.000	8.300.000	
	58 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	15.000.000	

18 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		40.000.000	40.000.000	
	59 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	40.000.000	
19 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		47.000.000	47.000.000	
	60 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.000.000	47.000.000	
20 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		50.000.000	50.000.000	
	61 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.000.000	32.000.000	
	62 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	18.000.000	18.000.000	
21 Administrasi Umum Perangkat Daerah		88.105.000	80.155.000	UPTD Setifikasi
	63 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.092.000	2.092.000	
	64 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.740.000	20.240.000	
	65 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.675.000	31.675.000	
	66 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.440.000	8.440.000	
	67 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.208.000	2.708.000	
	68 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.950.000	15.000.000	
22 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		22.500.000	22.500.000	
	69 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.500.000	22.500.000	
23 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		125.060.000	125.060.000	
	70 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.400.000	56.400.000	
	71 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	68.660.000	68.660.000	
24 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		79.335.000	79.335.000	

			72	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.835.000	45.835.000	
			73	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.500.000	33.500.000	
		25 Administrasi Umum Perangkat Daerah			114.340.000	101.840.000	UPTD TAHURA
			74	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.001.000	1.001.000	
			75	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.919.000	14.919.000	
			76	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.960.000	61.960.000	
			77	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.540.000	6.540.000	
			78	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.920.000	2.420.000	
			79	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000	15.000.000	
		26 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			60.000.000	60.000.000	
			80	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000	60.000.000	
		27 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			28.800.000	28.800.000	
			81	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.800.000	28.800.000	
		28 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			74.860.000	67.860.000	
			82	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.354.000	47.354.000	
			83	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	27.506.000	20.506.000	
		JUMLAH 1			42.134.080.000	41.684.080.000	
	2 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN						
		29 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			600.000.000	300.000.000	
			84	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,	300.000.000	150.000.000	
			85	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	300.000.000	150.000.000	

		30 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan		80.000.000	80.000.000	
			86 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	30.000.000	30.000.000	
			87 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	50.000.000	50.000.000	
		31 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan		100.000.000	100.000.000	
			88 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	50.000.000	50.000.000	
			89 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	50.000.000	50.000.000	
		32 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		300.000.000	300.000.000	UPTD Lab. Ling
			90 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	300.000.000	300.000.000	
		33 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan		250.000.000	250.000.000	UPTD Lab. Ling
			91 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	250.000.000	250.000.000	
		JUMLAH 2		1.330.000.000	1.030.000.000	
		3 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
		34 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		70.000.000	70.000.000	
			92 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	35.000.000	35.000.000	
			93 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	35.000.000	35.000.000	
		JUMLAH 3		70.000.000	70.000.000	
		4 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
		35 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		920.000.000	920.000.000	
			94 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	60.000.000	60.000.000	
			95 Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	860.000.000	860.000.000	
		JUMLAH 4		920.000.000	920.000.000	

	5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
		36 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		550.000.000	550.000.000	
			96 Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	200.000.000	200.000.000	
			97 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	30.000.000	30.000.000	
			98 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	270.000.000	270.000.000	
			99 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	50.000.000	50.000.000	
	JUMLAH 5			550.000.000	550.000.000	
	6 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
		37 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah		280.000.000	280.000.000	
			100 Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	280.000.000	280.000.000	
	JUMLAH 6			280.000.000	280.000.000	
	JUMLAH A (1+2+3+4+5+6)			45.284.080.000	44.534.080.000	
	B	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
	I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				
	7 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
		38 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		300.000.000	300.000.000	
			101 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	50.000.000	50.000.000	
			102 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	50.000.000	50.000.000	
			103 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	50.000.000	50.000.000	

	104 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan	50.000.000	50.000.000	
	105 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	50.000.000	50.000.000	
	106 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	50.000.000	50.000.000	
39 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		300.000.000	200.000.000	
	107 Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	50.000.000	50.000.000	
	108 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	25.000.000	25.000.000	
	109 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	200.000.000	100.000.000	
	110 Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	25.000.000	25.000.000	
40 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun		250.000.000	200.000.000	
	111 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	75.000.000	75.000.000	
	112 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	100.000.000	50.000.000	
	113 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	75.000.000	75.000.000	
41 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		1.309.920.000	1.185.770.000	CDLHK LT
	114 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	50.000.000	50.000.000	
	115 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	961.150.000	837.000.000	
	116 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	100.000.000	100.000.000	
	117 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	73.770.000	73.770.000	

			118 Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	100.000.000	100.000.000	
			119 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	25.000.000	25.000.000	
		42 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		900.000.000	544.150.000	CDLHK PSC
			120 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	50.000.000	50.000.000	
			121 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	637.500.000	281.650.000	
			122 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	87.500.000	87.500.000	
			123 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	50.000.000	50.000.000	
			124 Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	50.000.000	50.000.000	
			125 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	25.000.000	25.000.000	
		43 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		340.000.000	340.000.000	UPTD Sertifikasi
			126 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	340.000.000	340.000.000	
		44 Perbenihan Tanaman Hutan		290.000.000	290.000.000	UPTD Sertifikasi
			127 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengekar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	58.000.000	58.000.000	
			128 Sertifikasi Sumber Benih	58.000.000	58.000.000	
			129 Sertifikasi Mutu Benih	58.000.000	58.000.000	
			130 Sertifikasi Mutu Bibit	58.000.000	58.000.000	
			131 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	58.000.000	58.000.000	
		JUMLAH 7		3.689.920.000	3.059.920.000	
	8 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
		45 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		300.000.000	200.000.000	
			132 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	50.000.000	50.000.000	
			133 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	50.000.000	50.000.000	

	134 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	200.000.000	100.000.000	
46 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi		40.000.000	40.000.000	CDLHK LT
	135 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	40.000.000	40.000.000	
47 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		120.000.000	120.000.000	CDLHK LT
	136 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	30.000.000	30.000.000	
	137 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	30.000.000	30.000.000	
	138 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	60.000.000	60.000.000	
48 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi		40.000.000	40.000.000	CDLHK PSC
	139 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	40.000.000	40.000.000	
49 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		120.000.000	120.000.000	CDLHK PSC
	140 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	30.000.000	30.000.000	
	141 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	30.000.000	30.000.000	
	142 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	60.000.000	60.000.000	

		50 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi		490.000.000	490.000.000	
		143 Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA		20.000.000	20.000.000	
		144 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi		100.000.000	100.000.000	
		145 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi		10.000.000	10.000.000	
		146 Pengawetan Koridor Hidupan Liar		10.000.000	10.000.000	
		147 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi		50.000.000	50.000.000	
		148 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi		25.000.000	25.000.000	
		149 Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi		25.000.000	25.000.000	
		150 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi		75.000.000	75.000.000	
		151 Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi		100.000.000	100.000.000	
		152 Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA		35.000.000	35.000.000	
		153 Perencanaan Pengelolaan TAHURA		40.000.000	40.000.000	
		JUMLAH 8		1.110.000.000	1.010.000.000	
	9 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
		51 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		300.000.000	300.000.000	
			154 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	100.000.000	100.000.000	
			155 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	100.000.000	100.000.000	
			156 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	100.000.000	100.000.000	
		JUMLAH 9		300.000.000	300.000.000	

	10 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN					
		52 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		300.000.000	300.000.000	
			157 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	75.000.000	75.000.000	
			158 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	50.000.000	50.000.000	
			159 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	50.000.000	50.000.000	
			160 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	75.000.000	75.000.000	
			161 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	25.000.000	25.000.000	
			162 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	25.000.000	25.000.000	
		JUMLAH 10			300.000.000	300.000.000
JUMLAH B (7+8+9+10)			5.399.920.000	4.669.920.000		
JUMLAH A + B			50.684.000.000	49.204.000.000		

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 dapat terlihat sebagaimana Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DLHK Provinsi Banten Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

NO	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Unit OPD
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
	2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				44.534.080.000				46.760.784.000	
1	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1 : Persentase terwujudnya penatuaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100,00%	41.684.080.000			100%	43.768.284.000	
			2 : Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah		100,00%				100%		
			3 : Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah		100,00%				100%		
			4 : Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100,00%				100%		
1	2.11.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				350.000.000				367.500.000	Sekretariat
	2.11.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi Perencanaan bidang LHK 1 dok., Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Bidang LHK 1 dok., Tersusunnya Dokumen Analisis Risiko 1 tersusunnya Dokumen ORK 1 dok., Tersusunnya Penjabaran Kinerja PERKIN 2021 1 dok., Tersusunnya Rancangan Awal Renja Tahun 2022 1 dok., Tersusunnya Renja Akhir (Final) tahun 2022 1 dok., Tersusunnya Renja Perubahan Tahun 2021 1 dok., Tersusunnya RUP 2021 1 dok.	Prov. Banten	8 dokumen	100.000.000	APBD		8 dokumen	105.000.000	
	2.11.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA Tahun 2022	Prov. Banten	1 dok	10.000.000	APBD		1 dok	10.500.000	
	2.11.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan 2021	Prov. Banten	1 dok	10.000.000	APBD		1 dok	10.500.000	
	2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan OPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen OPA Tahun 2022	Prov. Banten	1 dok	10.000.000	APBD		1 dok	10.500.000	
	2.11.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan OPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen OPA Perubahan 2021	Prov. Banten	1 dok	10.000.000	APBD		1 dok	10.500.000	
	2.11.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Pengelolaan Website DLHK Tersusunnya Data Statistik Sektoral Bidang LHK tahun 2021 Tersusunnya Dokumen LKIP Tersusunnya Dokumen LKP Tersusunnya Dokumen LPPD Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Indikator Pembangunan Bidang LHK Prov. Banten Semester 1 dan 2 tahun 2021	Prov. Banten	6 dok	90.000.000	APBD		6 dok	94.500.000	
	2.11.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Realisasi Barang dan Jasa Terlaksananya Evaluasi Realisasi Risk dan Keuangan Terlaksananya Evaluasi Triwulan Terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang LHK Tersusunnya Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat	Prov. Banten	5 dok	120.000.000	APBD		5 dok	126.000.000	

2	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				31.734.000.000				33.320.700.000	Sekretariat
	2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Banten	14 bulan	30.509.116.000	APBD		14 bulan	32.034.571.800	
	2.11.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prov. Banten	1 dokumen	1.181.884.000	APBD		1 dokumen	1.240.978.200	
	2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prov. Banten	1 dokumen	7.000.000	APBD		1 dokumen	7.350.000	
	2.11.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Prov. Banten	1 dokumen	7.000.000	APBD		1 dokumen	7.350.000	
	2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prov. Banten	1 dokumen	7.000.000	APBD		1 dokumen	7.350.000	
	2.11.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tambahan Pemeriksaan	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tambahan Pemeriksaan	Prov. Banten	1 dokumen	7.000.000	APBD		1 dokumen	7.350.000	
	2.11.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Banten	1 dokumen	8.000.000	APBD		1 dokumen	8.400.000	
	2.11.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prov. Banten	1 dokumen	7.000.000	APBD		1 dokumen	7.350.000	
3	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				21.000.000				22.050.000	Sekretariat
	2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	Prov. Banten	12 bulan	21.000.000	APBD		12 bulan	22.050.000	
4	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				104.800.000	APBD			110.040.000	Sekretariat
	2.11.01.1.05.02	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pengadaan pakelan dinas beserta atribut kelengkapannya	Prov. Banten	12 bulan	79.800.000	APBD		12 bulan	83.790.000	
	2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Prov. Banten	1 dokumen	25.000.000	APBD		1 dokumen	26.250.000	
5	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				477.559.000	APBD			501.436.950	Sekretariat
	2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov. Banten	12 bulan	25.350.000	APBD		12 bulan	26.617.500	
	2.11.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Prov. Banten	12 bulan	134.225.000	APBD		12 bulan	140.936.250	
	2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Prov. Banten	12 bulan	55.464.000	APBD		12 bulan	58.237.200	
	2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Prov. Banten	12 bulan	67.000.000	APBD		12 bulan	70.350.000	
	2.11.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Prov. Banten	12 bulan	60.000.000	APBD		12 bulan	63.000.000	
	2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Banten	12 bulan	130.520.000	APBD		12 bulan	137.046.000	
	2.11.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Prov. Banten	12 bulan	5.000.000	APBD		12 bulan	5.250.000	

6	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				121.430.000				127.501.500	Sekretariat
	2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Banten	12 bulan	83.430.000	APBD		12 bulan	87.601.500	
	2.11.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Prov. Banten	12 bulan	38.000.000	APBD		12 bulan	39.900.000	
7	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.895.701.000				7.030.486.050	Sekretariat
	2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Banten	12 bulan	522.042.456	APBD		12 bulan	548.144.579	
	2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Banten	12 bulan	6.173.658.544	APBD		12 bulan	6.482.341.471	
8	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				355.110.000				372.865.500	Sekretariat
	2.11.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Banten	12 bulan	55.400.000	APBD		12 bulan	58.170.000	
	2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Banten	12 bulan	132.550.000	APBD		12 bulan	138.177.500	
	2.11.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Banten	12 bulan	133.000.000	APBD		12 bulan	138.650.000	
	2.11.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Banten	12 bulan	34.160.000	APBD		12 bulan	35.868.000	
9	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				111.000.000				116.500.000	UPT D Lab Ling
	2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	UPT D Lab Ling	12 bulan	2.425.000	APBD		12 bulan	2.546.250	
	2.11.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya alat tulis kantor	UPT D Lab Ling	12 bulan	20.372.500	APBD		12 bulan	21.391.125	
	2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya Bahan Logistik Kantor tersedianya makanan dan minuman	UPT D Lab Ling	12 bulan	72.000.000	APBD		12 bulan	75.600.000	
	2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	UPT D Lab Ling	12 bulan	1.202.500	APBD		12 bulan	1.262.625	
	2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah	UPT D Lab Ling	12 bulan	15.000.000	APBD		12 bulan	15.750.000	
10	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.000.000				5.250.000	UPT D Lab Ling
	2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPT D Lab Ling	12 bulan	5.000.000	APBD		12 bulan	5.250.000	
11	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				357.600.000				375.480.000	UPT D Lab Ling
	2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPT D Lab Ling	12 bulan	357.600.000	APBD		7 paket	375.480.000	
12	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				142.400.000				149.520.000	UPT D Lab Ling
	2.11.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	UPT D Lab Ling	12 bulan	120.900.000	APBD		12 bulan	126.945.000	
	2.11.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	UPT D Lab Ling	12 bulan	21.500.000	APBD		12 bulan	22.575.000	

13	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				102.430.000				107.551.500	CDLHK LT
	2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terkahsananya penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Kantor CDLHK LT	1 bulan	2.100.000	APBD		1 bulan	2.205.000	
	2.11.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor CDLHK LT	12 bulan	15.476.000	APBD		12 bulan	16.248.800	
	2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terkahsananya Penyediaan makanan dan minuman	Kantor CDLHK LT	12 bulan	56.094.000	APBD		12 bulan	58.898.700	
	2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	tersedianya barang cetak an dan penggandaan	Kantor CDLHK LT	12 bulan	9.060.000	APBD		12 bulan	9.513.000	
	2.11.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terkahsananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor CDLHK LT	12 bulan	4.700.000	APBD		12 bulan	4.935.000	
	2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terkahsananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah/luar	Kantor CDLHK LT	12 bulan	15.000.000	APBD		12 bulan	15.750.000	
14	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.000.000				5.250.000	CDLHK LT
	2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terkahsananya pengadaan peralatan gedung kantor	Kantor CDLHK LT	12 bulan	5.000.000	APBD		12 bulan	5.250.000	
15	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				194.600.000				204.330.000	CDLHK LT
	2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya fasilitas jasa komunikasi air dan listrik	Kantor CDLHK LT	12 bulan	39.600.000	APBD		12 bulan	41.580.000	
	2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor CDLHK LT	12 bulan	155.000.000	APBD		12 bulan	162.750.000	
16	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				66.900.000				70.245.000	CDLHK LT
	2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terkahsananya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Kantor CDLHK LT	12 bulan	51.000.000	APBD		12 bulan	53.550.000	
	2.11.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terkahsananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kantor CDLHK LT	12 bulan	15.900.000	APBD		12 bulan	16.695.000	
17	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				137.000.000				143.850.000	CDLHK PSC
	2.11.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kantor CDLHK PSC	12 bulan	20.000.000	APBD		12 bulan	21.000.000	
	2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kantor CDLHK PSC	12 bulan	69.600.000	APBD		12 bulan	73.080.000	
	2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	tersedianya barang cetak an dan penggandaan	Kantor CDLHK PSC	12 bulan	24.100.000	APBD		12 bulan	25.305.000	
	2.11.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terkahsananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor CDLHK PSC	12 bulan	8.300.000	APBD		12 bulan	8.715.000	
	2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terkahsananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah/luar	Kantor CDLHK PSC	12 bulan	15.000.000	APBD		12 bulan	15.750.000	
18	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				40.000.000				42.000.000	CDLHK PSC
	2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terkahsananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor CDLHK PSC	12 bulan	40.000.000	APBD		12 bulan	42.000.000	

19	211 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				47.000.000				49.350.000	COLHK PSC
	211 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor COLHK PSC	12 bulan	47.000.000	APBD		12 bulan	49.350.000	
20	211 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				50.000.000				52.500.000	COLHK PSC
	211 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Terkelaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional	Kantor COLHK PSC	12 bulan	32.000.000	APBD		12 bulan	33.600.000	
	211 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terkelaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor COLHK PSC	12 bulan	18.000.000	APBD		12 bulan	18.900.000	
21	211 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				80.155.000				84.162.750	UPT D SPT H
	211 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Terkelaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPT D SPT H	12 bulan	2.092.000	APBD		12 bulan	2.196.600	
	211 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPT D SPT H	12 bulan	20.240.000	APBD		12 bulan	21.252.000	
	211 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kant	Tersedianya makanan dan minuman	UPT D SPT H	12 bulan	31.675.000	APBD		12 bulan	33.258.750	
	211 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	UPT D SPT H	12 bulan	8.440.000	APBD		12 bulan	8.862.000	
	211 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Baccan dan Peraturan Perundangundangan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	UPT D SPT H	12 bulan	2.708.000	APBD		12 bulan	2.843.400	
	211 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terkelaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah/kab	UPT D SPT H	12 bulan	15.000.000	APBD		12 bulan	15.750.000	
22	211 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah				22.500.000				23.625.000	UPT D SPT H
	211 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPT D SPT H	12 bulan	22.500.000	APBD		12 bulan	23.625.000	
23	211 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				125.060.000				131.313.000	UPT D SPT H
	211 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya fasilitas jasa komunikasi air dan listrik	UPT D SPT H	12 bulan	56.400.000	APBD		12 bulan	59.220.000	
	211 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terkelaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPT D SPT H	12 bulan	68.660.000	APBD		12 bulan	72.093.000	
24	211 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				79.335.000				83.301.750	UPT D SPT H
	211 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terkelaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional	UPT D SPT H	12 bulan	45.835.000	APBD		12 bulan	48.126.750	
	211 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Terkelaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Terkelsananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	UPT D SPT H	12 bulan	33.500.000	APBD		12 bulan	35.175.000	
25	211 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				101.840.000				106.932.000	UPT D T ahura
	211 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terkelaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor UPT D T ahura	1 bulan	1.001.000	APBD		12 bulan	1.051.050	
	211 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor UPT D T ahura	12 bulan	14.919.000	APBD		12 bulan	15.664.950	

	2.11.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman	Kantor UPT D T ahura	12 bulan	61.960.000	APBD		12 bulan	65.058.000	
	2.11.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kantor UPT D T ahura	12 bulan	6.540.000	APBD		12 bulan	6.867.000	
	2.11.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kantor UPT D T ahura	12 bulan	2.420.000	APBD		12 bulan	2.541.000	
	2.11.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	T erlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah	Kantor UPT D T ahura	12 bulan	15.000.000	APBD		12 bulan	15.750.000	
26	2.11.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				60.000.000				63.000.000	UPT D T ahura
	2.11.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor UPT D T ahura	12 bulan	60.000.000	APBD		12 bulan	63.000.000	
27	2.11.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				28.800.000				30.240.000	UPT D T ahura
	2.11.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor UPT D T ahura	12 bulan	28.800.000	APBD		12 bulan	30.240.000	
28	2.11.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				67.860.000				71.253.000	UPT D T ahura
	2.11.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	T erlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional	Kantor UPT D T ahura	1 paket	47.354.000	APBD		1 paket	49.721.700	
	2.11.01.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	T erlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorPemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor UPT D T ahura	12 bulan	20.506.000	APBD		12 bulan	21.531.300	
II	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan (%)		17,60%	1.030.000.000			19%	1.081.500.000	
29	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				300.000.000				315.000.000	Bidang Pengolahan Sampah, Limbah B3 & Pengendalian Pencemaran
	2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1. T erlaksananya pemantauan kualitas air dan Kerusakan situ/danau/laut sesuai Baku Mutu Air dan kriteria kerusakan situ/danau/laut. 2. T erlaksananya Pemantauan pencemaran lingkungan pada media tanah, air, udara dan laut sesuai dengan baku mutu, kriteria kerusakan badan air, sungai, situ, laut. 3. T erlaksananya pemantauan kualitas udara ambien sesuai baku mutu udara ambien	Prov. Banten	3 Dokumen	150.000.000	APBD		3 Dokumen	157.500.000	
	2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	T erlaksananya Pembinaan Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sesuai pedoman T erlaksananya Laporan pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi GRK Sektor Limbah sesuai pedoman	Prov. Banten	2 dokumen	150.000.000	APBD		2 dokumen	157.500.000	
30	2.11.03.1.02	Penganggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Prov. Banten		80.000.000	APBD			84.000.000	Bidang Pengolahan Sampah, Limbah B3 & Pengendalian Pencemaran
	2.11.03.1.02.02	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	terlaksananya upaya isolasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Prov. Banten	1 dokumen	30.000.000	APBD		1 dokumen	31.500.000	

	2.11.03.1.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Tersusunnya dokumen perencanaan pengendalian pencemaran lingkungan sesuai dengan tata laksana pengendalian pencemaran air 2. Tersampainya informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan pada masyarakat sesuai SDP	Prov. Banten	2 Dokumen	50.000.000	APBD		2 Dokumen	52.500.000	
31	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				100.000.000				105.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 & Pengendalian Pencemaran
	2.11.03.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	terlaksananya Evaluasi Kinerja Industri Pengumpul, Pengolah, Pemertasaan Limbah B3	Prov. Banten	1 dokumen	50.000.000	APBD		1 dokumen	52.500.000	
	2.11.03.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembatasan Unsur Pencemar	Terlaksananya Pembatasan pengendalian pencemaran dan kerusakan terhadap pelaku usaha kegiatan sesuai tata laksana pengendalian pencemaran	Prov. Banten	1 dokumen	50.000.000	APBD		1 dokumen	52.500.000	
32	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Prov. Banten		300.000.000				315.000.000	UPT D Lab
	2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Prov. Banten	1 Dokumen	300.000.000	APBD		1 Dokumen	315.000.000	
33	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Prov. Banten		250.000.000				262.500.000	UPT D Lab
	2.11.03.1.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Prov. Banten	1 Dokumen	250.000.000	APBD		1 Dokumen	262.500.000	
III	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indek Kualitas Udara (IKU)		68,8 Nilai	70.000.000			70,8 nilai	73.500.000	
34	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi				70.000.000				73.500.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 & Pengendalian Pencemaran
	2.11.04.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pembentukan Taman Kehati Banten	Prov. Banten	1 Dokumen	35.000.000	APBD		1 Dokumen	36.750.000	
	2.11.04.1.01.06	Pengembangan Kapasitas Keltabagan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	terlaksananya pengembangan keltabagan dalam pengelolaan Kehati	Prov. Banten	1 Dokumen	35.000.000	APBD		1 Dokumen	36.750.000	
IV	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup		98%	550.000.000			100%	577.500.000	
35	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				550.000.000				577.500.000	Bidang Perataan dan Peningkatan Kapasitas

	2.11.05.1.01.01	Fasilitasi Penentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Terkait sarana pembinaan tata laksana penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan sesuai kompetensi	Prov. Banten	8 dokumen	200.000.000	APBD		8 dokumen	210.000.000	
	2.11.05.1.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Terkait sarana pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup yang kompeten	Prov. Banten	1 Dokumen	30.000.000	APBD		1 Dokumen	31.500.000	
	2.11.05.1.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terkait sarana pemantauan implementasi izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Provinsi Banten	Prov. Banten	1 Dokumen	270.000.000	APBD		1 Dokumen	283.500.000	
	2.11.05.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	terkait sarana koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi sesuai dengan SOP	Prov. Banten	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	52.500.000	
V	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		76 klpk/lembaga	280.000.000			78 klpk/lembaga	294.000.000	
36	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi				280.000.000				294.000.000	Bidang Perataan dan Peningkatan Kapasitas
	2.11.09.1.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Rilantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikator Anggaran Kegiatan terkait sarana pembinaan dan Penilaian kepada lembaga/masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Prov. Banten	25 Lembaga	280.000.000	APBD		25 Lembaga	294.000.000	
VI	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kualitas Air (IKA)		53 (nilai)	920.000.000			53,5 (nilai)	966.000.000	
37	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				920.000.000				966.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 & Pengendalian Pencemaran
	2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	tersusunya dokumen penetapan kebijakan dan strategis provinsi dalam pengelolaan sampah	Prov. Banten	1 Dokumen	63.000.000	APBD		1 Dokumen	63.000.000	
	2.11.11.1.01.02	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	tersusunya MOU kerjasama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah	Prov. Banten	1 Dokumen	860.000.000	APBD		1 Dokumen	903.000.000	

	3	Urusan Pemerintahan Pilihan									
	3. 28	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan				4.669.920.000				4.903.416.000	
VII	3.28.03	PROGRAM PENGOLAHAN HUTAN	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat		10%	3.059.920.000			10%	3.212.916.000	
			Luas Lahan kritis yang terhabilitasi wilayah pandeglang Serang cilegon		2.500 Ha				2.500 Ha		
			Luas Lahan kritis yang terhabilitasi wilayah Lebak dan Tangerang		2.500 Ha				2.500 Ha		
			Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat		180.000 btg				180.000 btg		
38	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung				300.000.000				315.000.000	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
	3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Tersusunnya data dan informasi sumberdaya hutan produksi di wilayah Provinsi Banten	Prov. Banten	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	52.500.000	
	3.28.03.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Tersusunnya data dan informasi sumberdaya hutan Lindung di wilayah Provinsi Banten	Prov. Banten	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	52.500.000	
	3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Tertakutnya pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan hutan untuk kegiatan non kehutanan di kawasan hutan produksi	Prov. Banten	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	52.500.000	
	3.28.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Tertakutnya pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan hutan untuk kegiatan non kehutanan di kawasan hutan Lindung	Prov. Banten	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	52.500.000	
	3.28.03.1.03.06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Tertakutnya penilaian rencana pengelolaan kawasan hutan produksi	Prov. Banten	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	52.500.000	
	3.28.03.1.03.07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Tertakutnya penilaian rencana pengelolaan kawasan hutan Lindung	Prov. Banten	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	52.500.000	
39	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				200.000.000				210.000.000	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
	3.28.03.1.06.01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Pengolahan hasil budidaya jamur tiram, lebah madu, Aren bambu dan Nilon	Prov. Banten	4 Komoditas	50.000.000	APBD		4 Komoditas	52.500.000	
	3.28.03.1.06.02	fasilitas Penruhan Komitmen Penertiban Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tertakutnya fasilitas rekomendasi IUPHHBK sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku	Prov. Banten	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	26.250.000	

	3 28 03 1.06 03	Pembudayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Pengembangan budaya janur tiram, lebah madu, Aren dan tanaman dibawah tegakan	Prov. Banten	4 Komoditas	100.000.000	APBD		4 Komoditas	100.000.000	
	3 28 03 1.06 04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Tertaksananya Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Non Kayu sesuai SDP	Prov. Banten	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	25.250.000	
40	3 28 03 1.07	Pelaksanaan Pengelahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/tahun				200.000.000				210.000.000	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
	3 28 03 1.07 01	Rencana Pengelahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Tersusunnya dokumen rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBD) secara manual dan online serta dokumen rencana pengolahan hasil hutan	Prov. Banten	1 Dokumen	75.000.000	APBD		1 Dokumen	78.750.000	
	3 28 03 1.07 02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengelahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Tertaksananya bimbingan teknis Pengelahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi	Prov. Banten	1 kegiatan	50.000.000	APBD		1 kegiatan	52.500.000	
	3 28 03 1.07 03	fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dengan Kapasitas Produksi	Tertaksananya fasilitasi rekomendasi IUPHHK sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku	Prov. Banten	1 Dokumen	75.000.000	APBD		1 Dokumen	78.750.000	
41	3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				1.185.770.000				1.245.058.500	CDLHK LT
	3 28 03 1.04 01	Penyusunan Rencana Tahapan Rehabilitasi Lahan (RT nRL)	tersusunnya dokumen rencana tahapan rehabilitasi hutan dan lahan (RT n-RL) dan rencana pengalasan rehabilitasi hutan dan lahan (RPRHL)	Prov. Banten	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	52.500.000	
	3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Terbangunnya Hutan rakyat diluar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi Banten	Prov. Banten	2500 Ha	837.000.000	APBD		2500 Ha	878.850.000	
	3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Tertaksananya Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Prov. Banten	400 batang	100.000.000	APBD		400 batang	105.000.000	
	3 28 03 1.04 05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Tertaksananya Penerapan teknik konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Prov. Banten	1 unit	73.770.000	APBD		1 unit	77.458.500	
	3 28 03 1.04 07	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Terbangunnya unit percantohan pengembangan teknologi rehabilitasi hutan dan lahan diwilayah provinsi banten	Prov. Banten	1 Unit	100.000.000	APBD		1 Unit	105.000.000	
	3 28 03 1.04 08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	bertaksananya pembinaan dan pengawasan rehabilitasi lahan diwilayah provinsi banten	Prov. Banten	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	26.250.000	
42	3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				544.150.000				571.357.500	CDLHK PSC
	3 28 03 1.04 01	Penyusunan Rencana Tahapan Rehabilitasi Lahan (RT nRL)	tersusunnya dokumen rencana tahapan rehabilitasi hutan dan lahan (RT n-RL) dan rencana pengalasan rehabilitasi hutan dan lahan (RPRHL)	Prov. Banten	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	52.500.000	
	3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Terbangunnya Hutan rakyat diluar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi Banten	Prov. Banten	2500 Ha	281.650.000	APBD		2500 Ha	295.732.500	
	3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Tertaksananya Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Prov. Banten	350 batang	87.500.000	APBD		350 batang	91.875.000	
	3 28 03 1.04 05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Tertaksananya Penerapan teknik konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Prov. Banten	1 unit	50.000.000	APBD		1 unit	52.500.000	

	3 28 03 1.04 07	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Terkasanya pengembangan teknologi rehabilitasi hutan dan lahan	Prov. Banten	1 Unit	50.000.000	APBD		1 Unit	52.500.000	
	3 28 03 1.04 08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	terkasanya pembinaan dan pengawasan rehabilitasi lahan di wilayah provinsi banten	Prov. Banten	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	26.250.000	
43	3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				340.000.000				357.000.000	UPT D SPT H
	3 28 03 1.04 06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman hutan dan MPT S sesuai standar	Prov. Banten	180.000 batang	340.000.000	APBD		180.000 batang	357.000.000	
44	3 28 03 1.09	Perbenihan Tanaman Hutan				290.000.000				304.500.000	UPT D SPT H
	3 28 03 1.09 01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	ditetapkannya pengada, pengedar benih/bibit tanaman hutan sesuai SOP	Prov. Banten	1 Dokumen	58.000.000	APBD		1 Dokumen	60.900.000	
	3 28 03 1.09 02	Sertifikasi Sumber Benih	Terkasanya Sertifikasi sumber Bibit/Benih Tanaman Kehutanan sesuai SOP	Prov. Banten	1 Dokumen	58.000.000	APBD		1 Dokumen	60.900.000	
	3 28 03 1.09 03	Sertifikasi Mutu Benih	Terkasanya Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Kehutanan sesuai SOP	Prov. Banten	1 Dokumen	58.000.000	APBD		1 Dokumen	60.900.000	
	3 28 03 1.09 04	Sertifikasi Mutu Bibit	Terkasanya Sertifikasi Mutu Bibit Tanaman Kehutanan sesuai SOP	Prov. Banten	1 Dokumen	58.000.000	APBD		1 Dokumen	60.900.000	
	3 28 03 1.09 05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Terkasanya pengawasan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan sesuai SOP	Prov. Banten	1 Dokumen	58.000.000	APBD		1 Dokumen	60.900.000	
VIII	3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Peningkatan fungsi UPTD TAHURA		12,5%	1.010.000.000			12,5%	1.060.500.000	
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang, Cilegon.		3 klpk				3 klpk		
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak dan Tangerang		3 klpk				3 klpk		
45	3 28 04 1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam				200.000.000				210.000.000	Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE
	3 28 04 1.03 01	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	tersusunya perencanaan pemanfaatan ekosistem karst	Prov. Banten	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	52.500.000	
	3 28 04 1.03 03	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Tersusunya perencanaan pemanfaatan ekosistem lahan basah	Prov. Banten	2 Dokumen	50.000.000	APBD		2 Dokumen	52.500.000	
	3 28 04 1.03 05	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Terkasanya Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Prov. Banten	2 Dokumen	100.000.000	APBD		2 Dokumen	105.000.000	

46	3 28 04 1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kawasan Daerah Provinsi				40.000.000				42.000.000	COLHK LT
	3 28 04 1.02 01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	terlaksananya pengawasan dan pengendalian perdagangan, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi sesuai dengan sop	Labak Tangerang	1 Dokumen	40.000.000	APBD		1 Dokumen	42.000.000	
47	3 28 04 1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam				120.000.000				126.000.000	COLHK LT
	3 28 04 1.03 02	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	Terlaksananya Pengendalian Kerusakan dan pemeliharaan ekosistem Karst	Labak Tangerang	1 Dokumen	30.000.000	APBD		1 Dokumen	30.500.000	
	3 28 04 1.03 04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Terlaksananya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Labak Tangerang	1 Dokumen	30.000.000	APBD		1 Dokumen	30.500.000	
	3 28 04 1.03 05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kawasan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kawasan Daerah Provinsi	Labak Tangerang	1 Dokumen	60.000.000	APBD		1 Dokumen	63.000.000	
48	3 28 04 1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kawasan Daerah Provinsi				40.000.000				42.000.000	COLHK PSC
	3 28 04 1.02 01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Pemanfaatan Tumbuhan dan satwa liar yang Tidak Dilindungi dan / atau tidak masuk dalam lampiran CITES	Pandeglang Serang, Cilegon	1 Dokumen	40.000.000	APBD		1 Dokumen	42.000.000	
49	3 28 04 1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam				120.000.000				126.000.000	COLHK PSC
	3 28 04 1.03 02	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	Terlaksananya Pengendalian Kerusakan dan pemeliharaan ekosistem Karst	Pandeglang Serang, Cilegon	1 Dokumen	30.000.000	APBD		1 Dokumen	30.500.000	
	3 28 04 1.03 04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Terlaksananya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Pandeglang Serang, Cilegon	1 Dokumen	30.000.000	APBD		1 Dokumen	30.500.000	
	3 28 04 1.03 05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kawasan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kawasan Daerah Provinsi	Pandeglang Serang, Cilegon	1 Dokumen	60.000.000	APBD		1 Dokumen	63.000.000	
50	3 28 04 1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi				490.000.000				514.500.000	UPTD Tahura
	3 28 04 1.01 01	Pencegahan, Perenggulan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Terlaksananya Pencegahan, Perenggulan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Tahura Banten	1 dokumen	20.000.000	APBD		1 dokumen	20.000.000	
	3 28 04 1.01 02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Tahura Banten	1595,9 Ha	100.000.000	APBD		1595,9 Ha	105.000.000	

	3 28 04 1.01 03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat T AHURA Provinsi	Terlak saranya Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat T AHURA Provis	Tahura Banten	1 Dokumen	10.000.000	APBD		1 Dokumen	10.500.000	
	3 28 04 1.01 04	Pengawetan Koridor Hidupan Liar	Terlak saranya pengawetan Koridor Hidupan liar sesuai target	Tahura Banten	1 Dokumen	10.000.000	APBD		1 Dokumen	10.500.000	
	3 28 04 1.01 05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan T AHURA Provinsi	Terlak saranya Pemulihan ekosistem T AHURA Rencana Pengelolaan T AHURA Provinsi	Tahura Banten	12.5 Ha	50.000.000	APBD		12.5 Ha	52.500.000	
	3 28 04 1.01 06	Penerfaatan Jasa Lingkungan T AHURA Provinsi	Terlak saranya Penerfaatan jasa lingkungan T AHURA Provinsi	Tahura Banten	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	26.250.000	
	3 28 04 1.01 07	Kerja Sama Penyelenggaraan T AHURA Provinsi	terlak saranya Kerja Sama Penyelenggaraan T AHURA Provinsi	Tahura Banten	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	26.250.000	
	3 28 04 1.01 08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar T AHURA Provinsi	Terlak saranya pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan T AHURA dan peningkatan peran serta masyarakat sebagai mitra penganan kawasan T AHURA	Tahura Banten	12.5 Ha	75.000.000	APBD		12.5 Ha	78.750.000	
	3 28 04 1.01 09	Pengelolaan Daerah Penyangga T AHURA Provinsi	Terlak saranya Pengelolaan Daerah Penyangga T AHURA Provinsi	Tahura Banten	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	105.000.000	
	3 28 04 1.01 10	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok T AHURA	Tersusunnya Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok T AHURA	Tahura Banten	1 Dokumen	35.000.000	APBD		1 Dokumen	36.750.000	
	3 28 04 1.01 11	Perencanaan Pengelolaan T AHURA	Tersusunnya Rencana Pengelolaan T AHURA	Tahura Banten	1 Dokumen	40.000.000	APBD		1 Dokumen	42.000.000	
IX	3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan		10 Klpk	300.000.000			10 Klpk	315.000.000	
51	3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				300.000.000				315.000.000	Bidang Pengelolaan DAS, KSDA E
	3 28 05 1.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Terlak saranya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Prov. Banten	2 Kelompok	100.000.000	APBD		2 Kelompok	105.000.000	
	3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlak saranya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Prov. Banten	60 kelompok	100.000.000	APBD		60 kelompok	105.000.000	
	3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terlak saranya Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Prov. Banten	2 Kelompok	100.000.000	APBD		2 Kelompok	105.000.000	

X	3 28 06	PROGRAM PENGLOLAAN DAERAH AJURAN SUNGAI (DAS)	Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)		20%	300.000.000			20%	315.000.000	
52	3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				300.000.000				315.000.000	Bidang Pengelolan DAS, KSDAE
	3 28 06 1.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Tersusunnya penyusunan dan penetapan rencanan pengelolan DAS	Prov. Banten	1 Dokumen	75.000.000	APBD		1 Dokumen	78.750.000	
	3 28 06 1.01 02	Optimisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	terlak sananya optimisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Prov. Banten	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	52.500.000	
	3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Terlak sananya Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Prov. Banten	1 kegiatan	50.000.000	APBD		1 kegiatan	52.500.000	
	3 28 06 1.01 04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Terlak sananya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Prov. Banten	1 kegiatan	75.000.000	APBD		1 kegiatan	78.750.000	
	3 28 06 1.01 05	Pengembangan Kalantagaan Pengelolaan DAS	Terlak sananya Pembinaan forum DAS	Prov. Banten	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	26.250.000	
	3 28 06 1.01 06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Terlak sananya Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Prov. Banten	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	26.250.000	
		T O T A L				49.204.000.000				51.664.200.000	

BAB IV

PENUTUP

Naskah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini merupakan bagian penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang dilaksanakan setiap tahun.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai perangkat Pemerintah Provinsi Banten, bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara program yang tercantum di dalam arah dan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi Banten ataupun strategi dan prioritas program pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat tercapai.

Berbagai kendala akan dipandang sebagai tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan dengan arif dan penuh pertimbangan untuk kebaikan semua pihak, menuju terwujudnya Pembangunan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara lestari dan berkesinambungan.

LAMPIRAN

TABEL KERJA
PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN
				Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	Bidang Lingkungan Hidup								Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
						Program Tata Kelola Pemerintahan	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	
							Capaian Kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah					Capaian Kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	
							Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi admisnitrasi perangkat daerah					Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi admisnitrasi perangkat daerah	
							Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	
						Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan tepat waktu	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan tepat waktu			
							Penyusunan Renja Tahun N dan N+1 (2 dok), fasilitasi penyusunan RKAP dan DPPA Tahun N (2 dok), Fasilitasi penyusunan RKA dan DPA Tahun N+1 (2 dok), Penyusunan Perkin dan IKU DLHK N dan N+1 (2 dok), forum Renja (1 dok), dan penyusunan RUP (1 dok)						

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	
						Penyusunan Renja Tahun N dan N+1 (2 dok), fasilitasi penyusunan RKAP dan DPPA Tahun N (2 dok), Fasilitasi penyusunan RKA dan DPA Tahun N+1 (2 dok), Penyusunan Perkin dan IKU DLHK N dan N+1 (2 dok), forum Renja (1 dok), dan penyusunan RUP (1 dok)	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Data Statistik Sektoral tahun 2021 Tersusunnya Dokumen Analisa Resiko Tahun 2021 Tersusunnya Dokumen RKA/ DPA Tahun 2022 Tersusunnya Dokumen ROK 2021 Tersusunnya Dokumen RUP Tersusunnya Perkin Murni dan Perubahan Tahun 2021 Tersusunnya RKA-P/DPA-P 2021						
					Penyusunan LKIP DLHK (1 dok), penyusunan LKPJ DLHK (1 dok), Penyusunan LPPD DLHK (1 dok)	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen LAKIP Tersusunnya Dokumen LKPJ Tersusunnya Dokumen LPPD							
					Penyusunan Laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Forum Perangkat Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang LHK							
					Penyusunan Laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Barang dan Jasa Evaluasi Kinerja Fisik an Keuangan Evaluasi Kinerja Triwulanan Monitoring dan Evaluasi Program kegiatan Bidang LHK Pengelolaan Website Survei Kepuasan Masyarakat							
					Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Asset	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset yang akuntabel				Administrasi Keuangan	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset yang akuntabel			
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN						
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN						
							Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Tersusunnya Bahan Pelaksanaan Verifikasi						

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN
						Dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun Anggaran (1 dok), Laporan SPIP (1 dok),penyusunan laporan keuangan semester I (1 dok), penyusunan laporan realisasi semster dan prognosis 6 bln (1 dok), penyusunan dokumen SPP, SPM,SP2D dan SPJ kegiatan (4 dok)	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	terlaksananya penyusunan dan pelaporan keuangan					
						Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) untuk semester 1 dan 2	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) untuk semester 1 dan 2					
						Dokumen Pelaporan pajak PPh Ps 21 DLHK prov Banten TA.N (1 dok), Pelaporan pajak PPn, PPh Ps 22 dan PPh ps 23 Keg.DLHK Prov Banten TA.N (1 dok), Pelaporan SPT Pajak tahunan DLHK TA.N (1 dok)	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Keuangan Akhir tahun Anggaran (1 dok)- Laporan SPIP (1 dok)- penyusunan laporan keuangan semester I (1 dok)- penyusunan laporan realisasi semster dan prognosis 6 bln (1 dok)-penyusunan dokumen SPP, SPM,SP2D dan SPJ kegiatan (4 dok)					
							Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	tersusunya laporan keuangan bulanan/semesteran					
							Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	tersusunya laporan prognosis realisasi anggaran					
							Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	tersusunya laporan akhir tahun					
					Penyediaan Barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Tersedianya barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran yang berkualitas dan berdaya guna			Administrasi Umum	Tersedianya barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran yang berkualitas dan berdaya guna			
						1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor, 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, 3. Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik					
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya jasa peralatan dsan perlengkapan kantor					
							Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	tersedianya jasa jaminan barang milik daerah					

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019						
					SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional					
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan					
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor					
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor					
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan					
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik					
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor					
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga					
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					
					Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makanan dan minuman					
					Perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah dan kedalam daerah				
					1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor, 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, 3. Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantotr				
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor				
					Peningkatan Kapasitas Aparatu	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Aparatur yang berkompeten	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya Peningkatan disiplin dan Kapasitas sumberdaya Aparatur yang berkompeten			

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	
					Peningkatan Kompetensi Aparatu	Fasilitasi kursus, Pelatihan, Bimtek	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Fasilitasi kursus, Pelatihan, Bimtek						
												Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	
					Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Lingkungan	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna				Administrasi Umum	Tersedianya barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran yang berkualitas dan berdaya guna			
						1. Operasional kantor tdk tetatp, 2.Penyediaan barang habis pakai, 3.Penyediaan makan dan minum kantor, 4.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Penyediaan operasional jasa kantor, 5.Penyediaan BBM	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	tersedianya Alat Tulis Kantor						
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan						
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Operasional kantor tdk tetatp, 2.Penyediaan barang habis pakai, 3.Penyediaan makan dan minum kantor, 4. Penyediaan operasional jasa kantor, 5.Penyediaan BBM 1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor, 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, 3. Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK Indikator Anggaran Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah (keg) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor						
							Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman						
						Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerahluar						
						. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor, 2. Pemeliharaan Kendaraan	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur						

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN
						Dinas Operasional, 3. Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional					
					Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna			Administrasi Umum	Tersedianya barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran yang berkualitas dan berdaya guna			
						1. Operasional kantor tdk tetatp, 2.Penyediaan barang habis pakai, 3.Penyediaan makan dan minum kantor, 4. Penyediaan operasional jasa kantor, 5.Penyediaan BBM	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya fasilitas jasa komunikasi air dan listrik					
							Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor					
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan					
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persedinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga					
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
							Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman					
							Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerahluar				
							. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor, 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, 3. Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor				
						Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor					
						Pengadaan Mebeleur		Terlaksananya pengadaan mebeleur					
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala gedung gedung kantor					
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional					

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor					
						Pelayanan Tata Usaha pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna			Administrasi Umum	Tersedianya barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran yang berkualitas dan berdaya guna			
							1. Operasional kantor tdk tetatp, 2.Penyediaan barang habis pakai, 3.Penyediaan makan dan minum kantor, 4. Penyediaan operasional jasa kantor, 5.Penyediaan BBM	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya fasilitas jasa komunikasi air dan listrik					
						Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor						
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		tersedianya barang cetakan dan penggandaan						
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Operasional kantor tdk tetatp, 2.Penyediaan jasa kebersihan gedung dan halaman (outsourcing), 3.Penyediaan barang habis pakai, 4.Penyediaan makan dan minum kantor, 5. Penyediaan operasional jasa kantor, 6.Penyediaan BBM 1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor, 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, 3. Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK Indikator Anggaran Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon Pengadaaan Sarana Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon					
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	
								Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman						
							Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerahluar						
						. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor, 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, 3. Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor						
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional						
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional						
						Pelayanan Tata Usaha pada CDLHK Wilayah Lebak Tangerang	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna			Administrasi Umum	Tersedianya barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran yang berkualitas dan berdaya guna				
						1. Operasional kantor tdk tetatp, 2.Penyediaan barang habis pakai, 3.Penyediaan makan dan minum kantor, 4. Penyediaan operasional jasa kantor, 5.Penyediaan BBM		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya fasilitas jasa komunikasi air dan listrik						
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan						
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Operasional kantor tdk tetatp, 2. Penyediaan jasa kebersihan gedung dan halaman (outsourcing), 3. Penyediaan barang habis pakai 4. Penyediaan makan	Terlaksananya Penyediaan					
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
								Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman						

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN
						Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerahluar					
						. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor, 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, 3. Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor					
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional					
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional					
					Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna			Administrasi Umum	Tersedianya barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran yang berkualitas dan berdaya guna			
						1. Operasional kantor tdk tetatp, 2.Penyediaan barang habis pakai, 3.Penyediaan makan dan minum kantor, 4. Penyediaan operasional jasa kantor, 5.Penyediaan BBM	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya fasilitas jasa komunikasi air dan listrik					
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja					
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan					
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Operasional kantor tdk tetatp, 2.Penyediaan jasa kebersihan gedung dan halaman (outsourcing), 3.Penyediaan barang habis pakai, 4.Penyediaan makan dan minum kantor, 5. Penyediaan operasional jasa kantor, 6.Penyediaan BBM 1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor, 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, 3. Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK Indikator Anggaran Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah Tersedianya Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten yang efektif, efisien dan berdaya guna					
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
							Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman					
						Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerahluar					
						. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor, 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, 3. Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor					
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala gedung gedung kantor					
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala kendaraaan dinas/operasional					

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor						
					Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan	1. Indeks Kualitas Air (IKA) 2. IndeK Kualitas Udara (IKU) 3. Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup	Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan		
					1. Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara serta tersusunnya kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan sesuai standar baku mutu dan kriteria kerusakan			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara serta tersusunnya kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan sesuai standar baku mutu dan kriteria kerusakan				
						Dokumen pematauaan kualitas air dan kerusakan situ/danau dan Dokumen pemantauan kualitas udara ambien	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah. Air. Udara dan Laut	1. Terlaksananya pemantauan kualitas air dan Kerusakan situ/danau/laut sesuai Baku Mutu Air dan kriteria kerusakan situ/danau/laut 2. Terlaksananya Pemantauan pencemaran lingkungan pada media tanah, air, udara dan laut sesuai dengan baku mutu, kriteria kerusakan badan air, sungai situ, laut. 3. Terlaksananya pemantauan kualitas udara ambien sesuai baku mutu udara ambien						
					2. Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan	Jumlah parameter akreditasi/Survailan dalam peningkatan kompetensi laboratorium lingkungan sesuai dengan ISO 17025.2 Tahun 2017								

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019						
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN
			Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pembinaan proklam, pemantauan dan pengawasan konservasi kehati dan pemanfaatan SDA, penyusunan data dan informasi kehati serta evaluasi dan pelaporan emisi GRK sektor limbah sesuai dengan pedoman dan SOP	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1. Terlaksananya Pembinaan Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sesuai pedoman					
						2. Tersusunnya Laporan pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi GRK Sektor Limbah sesuai pedoman					
			Kegiatan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara serta tersusunnya kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan sesuai standar baku mutu dan kriteria kerusakan		1. Tersusunnya dokumen perencanaan pengendalian pencemaran lingkungan sesuai dengan tatalaksana pengendalian pencemaran air 2. Tersampainya informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan pada masyarakat sesuai SOP	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara serta tersusunnya kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan sesuai standar baku mutu dan kriteria kerusakan			
				dokumen perencanaan pengendalian pencemaran lingkungan							
				Dokumen pemantauan kualitas air dan kerusakan situ/danau dan Dokumen pemantauan kualitas udara ambien							
			3. Pengujian dan analisa laboratorium lingkungan	Terlaksananya pemantauan parameter kualitas air dan udara sesuai dengan baku mutu							

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019						
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN
			Kegiatan pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Terlaksananya Pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3 sesuai dengan pedoman pengelolaan sampah dan limbah B3	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya upaya isolasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup					
			Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas LingkunganHidup / Kegiatan Pelayanan Pengaduan dan penegakan Hukum	Laporan penanganan kasus-kasus akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan kehutanan	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanganan kasus-kasus akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup					
							Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara serta tersusunnya kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan sesuai standar baku mutu dan kriteria kerusakan			
			Kegiatan pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Laporan industri pengelola limbah B3 yang dipantau dan dievaluasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	terlaksananya Evaluasi Kinerja Industri Pengumpul, Pengolah, Pemanfaatan LimbahB3					
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Terlaksananya Pembinaan pengendalian pencemaran dan perusakan terhadap pelaku usaha kegiatan sesuai tata laksana pengendalian pencemaran					
			Program Pengendalian Pencemaran lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air (IKA) 2. Indek Kualitas Udara (IKU)					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Indek Kualitas Udara (IKU)	
			Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pembinaan proklam, pemantauan dan pengawasan konservasi kehati dan pemanfaatan SDA, penyusunan data dan informasi kehati serta evaluasi dan pelaporan emisi GRK sektor limbah sesuai dengan pedoman dan SOP			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Banten			

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019						
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN
					Laporan Pemantauan dan pengawasan Pelaksanaan konservasi dan pengawasan pemanfaatan SDA secara lestari	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pembentukan Taman Kehati Banten					
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Terlaksananya Pengembangan kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati.					
				Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup					Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup	
					2. Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup							
				Kegiatan Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Tersusunnya perencanaan penilaian pengkajian dampak lingkungan hidup sesuai SOP			Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Tersusunnya perencanaan penilaian pengkajian dampak lingkungan hidup sesuai SOP			
					Dokumen perencanaan, pemanfaatan dan kinerja pengelolaan lingkungan	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Terlaksananya Pembinaan tata laksana penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan sesuai kompetensi					
					Dokumen perencanaan, pemanfaatan dan kinerja pengelolaan lingkungan	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup yang kompeten					

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019						
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN
				Dokumen penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup. Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemantauan implementasi izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Provinsi Banten					
			Kegiatan Pelayanan Pengaduan dan penegakan Hukum	Laporan Pengawasan dan pengendalian terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi sesuai dengan SOP					
			Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup					Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	
			Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat, kelompok, dan sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelola Lingkungan Hidup Sesuai SOP			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	terlaksananya fasilitasi penilaian penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi banten			
				lembaga/Kota berwawasan lingkungan di Provinsi Banten yang dibina dan dinilai	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian kepada lembaga/masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup					
			Program Pengendalian Pencemaran lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air (IKA) 2. Indek Kualitas Udara (IKU)					Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	
			Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Terlaksananya Pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3 sesuai dengan pedoman pengelolaan sampah dan limbah B3			Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya Pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan sampah, sesuai dengan pedoman pengelolaan sampah			

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019						
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN
				dokumen perencanaan penanganan sampah dan limbah B3	Penyusunan Rencana. Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Tersusunnya dokumen Penetapan Kebijakan dan Strategis Provinsi Dalam Pengelolaan Sampah					
				Laporan Pembinaan dan pengelolaan sampah	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Tersusunnya MOU kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah					
	Urusan Pilihan	Bidang Kehutanan									Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
			1. Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat	
			2. Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon						Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah pandeglang Serang cilegon	
				Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak dan Tangerang						Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah Lebak dan Tangerang	
				Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)						Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat	
				Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan							
				Peningkatan fungsi UPTD TAHURA							
				Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah pandeglang Serang cilegon							

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN
						Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah Lebak dan Tangerang							
						Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat							
					1. Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan/ Kegiatan Perencanaan dan Penatagunaan Hutan	Terwujudnya perencanaan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan tata guna hutan dan perencanaan hutan			Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi rencana pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan ,pengelolaan hutan dan hasil hutan produksi dan hutan lindung secara lestari sesuai dengan rencana tata kelola hutan			
						Terdapatnya dokumen perencanaan hutan	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Tersusunnya datadan informasi sumberdaya hutan produksi diwilayah Provinsi Banten					
							Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Tersusunnya data dan informasi sumberdaya hutan Lindung diwilayah Provinsi Banten					
							Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Terlaksananya penilaian rencana pengelolaan kawasan hutan produksi					
							Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Terlaksananya penilaian rencana pengelolaan kawasan hutan Lindung					
						Dokumen Laporan Pemantapan Kawasan Hutan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Terlaksananya pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan hutan untuk kegiatan non kehutanan dikawasan hutan produksi					

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Terlaksananya pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan hutan untuk kegiatan non kehutanan dikawasan hutan lindung					
					Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	1. Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah pandeglang Serang cilegon 2. Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah Lebak dan Tangerang 3. Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)			Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan diluar kawasan hutan negara			
					Kegiatan Pengelolaan DAS	Dokumen Perencanaan pengelolaan rehabilitasi hutan lahan dan Monev RHL	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Terususunnya Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan(RTn-RHL) dan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL)					
							Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Rehabilitasi lahan diwilayah provinsi banten					
						Luas Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Terbangunnya Hutan rakyat diluar kawasan hutan negara di wilayah Provisni Banten					
							Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara					

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019						
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN
			1. Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada cabang dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon 2. Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada cabang dinas LHK Wilayah Lebak Tangerang		Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pembangunan Sumur Resapan, Gully plug, Biopori, Embung, terasering, vertiper, perlindungan mata air, di wilayah Provinsi Banten					
					Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Terbangunnya unit percontohan pengembnagan teknologi rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah provinsi banten					
			Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Hutan	Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan sesuai standar	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan kebun sumber benih tanaman hutan unggul sesuai standar					
			Kegiatan Konservasi SDA dan Ekosistem	Jumlah Dokumen Perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya perencanaan, koordinasi sinkronisasi data dan informasi kebakaran hutan dan lahan serta pelaksanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan sesuai SOP					

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019						
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN
			Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan / 1. Pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan 2. Pemanfaatan hutan dan penatausahaan hasil hutan 3. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang 4. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang Serang dan Cilegon Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan 5. Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon 6. Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	1. Terlaksananya pengembangan dan promosi aneka usaha kehutanan komoditas unggulan hasil hutan bukan kayu 2. Meningkatnya pengelolaan hutan dan hasil hutan secara lestari sesuai dengan rencana tata kelola hutan			Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Terlaksananya pengolahan dan pengembangan aneka usaha kehutanan komoditas unggulan hasil hutan bukan kayu			
			1. Pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan	Terlaksananya pengembangan dan promosi aneka usaha kehutanan	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Pengolahan hasil budidaya jamur tiram, lebah madu, Aren bambu dan Nilam					
			2. Kegiatan Pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan	Laporan Penatausahaan industri hasil hutan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya fasilitasi rekomendasi IUIPHHBK sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku					
			5. Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon 6. Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Luas Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Pengembangan budidaya jamur tiram, lebah madu, Aren dan tanaman dibawah tegakan					
			3. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang 4. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang Serang dan Cilegon	Jumlah Laporan pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan bukan Kayu	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Non Kayu sesuai SOP					

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN
					Kegiatan Pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan	Meningkatnya pengelolaan hutan dan hasil hutan secara lestari sesuai dengan rencana tata kelola hutan			Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Meningkatnya pengelolaan hutan dan hasil hutan secara lestari sesuai dengan rencana tata kelola hutan			
						Laporan pengelolaan usaha hutan rakyat berbasis industri	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun	Tersusunnya dokumen rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI) secara manual dan online serta dokumen rencana pengolahan hasil hutan					
						Laporan pengelolaan usaha hutan rakyat berbasis industri	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya bimbingan teknis Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					
						Laporan Penatausahaan industri hasil hutan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya fasilitasi rekomendasi IUIPHHK sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku					
					Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih Tanaman Hutan	Terlaksananya Sertifikasi dan pengawasan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan sesuai SOP			Perbenihan Tanaman Hutan	Terlaksananya Sertifikasi dan pengawasan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan sesuai SOP			
						Jumlah peserta pembinaan pengada, pengedar benih/bibit tanaman hutan dan Tersedianya bibit tanaman hutan dan MPTS sesuai standar	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	ditetapkannya pengada, pengedar benih/bibit tanaman hutan sesuai SOP					
						Jumlah Batang yang disertifikasi bibit atau benih tanaman hutan dan MPTS	Sertifikasi Sumber Benih	Terlaksananya Sertifikasi sumber Bibit/Benih Tanaman Kehutanan sesuai SOP					
						Jumlah Batang yang disertifikasi bibit atau benih tanaman hutan dan MPTS	Sertifikasi Mutu Benih	Terlaksananya Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Kehutanan sesuai SOP					

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN
						Jumlah Batang yang disertifikasi bibit atau benih tanaman hutan dan MPTS	Sertifikasi Mutu Bibit	Terlaksananya Sertifikasi Mutu Bibit Tanaman Kehutanan sesuai SOP					
						Laporan Pengawasan benih tanaman hutan	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Terlaksananya pengawasan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan sesuai SOP					
					1. Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan 2. Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Peningkatan fungsi UPTD TAHURA					PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Peningkatan fungsi UPTD TAHURA	
						Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan						Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang, Cilegon.	
						Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang, Cilegon, Lebak dan Tangerang						Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	
					1. Kegiatan . Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan Taman Hutan Raya Banten 2. Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya Banten	1. Terlaksananya perlindungan kawasan TAHURA dan Rehabilitasi kawasan TAHURA sesuai dengan peraturan pengelolaan taman hutan raya 2. Terbangunnya sarana dan prasarana fasilitas pemanfaatan wisata sesuai RPJP			Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	1. Terlaksananya perlindungan kawasan TAHURA dan Rehabilitasi kawasan TAHURA sesuai dengan peraturan pengelolaan taman hutan raya sesuai dengan peraturan pengelolaan taman hutan raya 2. Terbangunnya sarana dan prasarana fasilitas pemanfaatan wisata sesuai RPJP			
					Kegiatan . Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan Taman Hutan Raya Banten	Luasan reboisasi dan rehabilitasi serta pengawetan keanekaragaman hayati	Pencegahan. Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Terlaksananya Reboisasi dan Rehabilitasi lahan serta perlindungan kawasan TAHURA sesuai target					
					Kegiatan . Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan Taman Hutan Raya Banten	Luas Perlindungan dan pengamanan kawasan TAHURA	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Terlaksananya pengamanan kawasan TAHURA sesuai dengan peraturan pengelolaan taman hutan raya					

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN
					Kegiatan . Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan Taman Hutan Raya Banten	Luasan reboisasi dan rehabilitasi serta pengawetan keanekaragaman hayati	Pengawetan Tumbuhan. Satwa. serta Habitat TAHURA Provinsi	Terlaksananya pengawetan keanekaragaman hayati, koleksi species lokal/endemik/langka/terancam punahsesuai target					
					Kegiatan . Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan Taman Hutan Raya Banten	Luasan reboisasi dan rehabilitasi serta pengawetan keanekaragaman hayati	Pengawetan Koridor Hidupan Liar	Terlaksananya pengawetan Koridor Hidupan liar sesuai target					
					Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya Banten	Pengembangan kawasan tahura	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pemulihan ekosistem TAHURA Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi					
					Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya Banten	Pemanfaatan Kawasan Tahura Banten	Pemanfaatan Jasa lingkungan TAHURA Provinsi	terlaksananya Pemanfaatan jasa lingkungan TAHURA Provinsi					
					Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya Banten	Pengembangan kawasan tahura	Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi	terlaksananya Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi					
					Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya Banten	Pengembangan kawasan tahura	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Provinsi	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan TAHURA dan peningkatan peranserta masyarakat sebagai mitra pengamanan kawasan TAHURA					
					Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya Banten	Pengembangan kawasan tahura	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi	Terbinanya masyarakat daerah penyangga kawasan TAHURA					
					1. Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang 2. Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Pandeglang, Serang dan Cilegon	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan di Wilayah Pandeglang, Serang, Cilegon, Lebak dan Tangerang sesuai SOP			Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Pemanfaatan Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi sesuai SOP			

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN
						Laporan pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Pemanfaatan Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan / atau tidak masuk dalam lampiran CITES					
					1. Konservasi SDA dan Ekosistem 2. Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang 3. Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Pandeglang, Serang dan Cilegon	1. Terbinanya daerah penyangga, sumberdaya alam hayati dan ekosistem kawasan konservasi yang lestari 2.Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan di Wilayah Pandeglang,Serang, Cilegon, Lebak dan Tangerang sesuai SOP			Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, kawasan penyangga dan kawasan pelestarian alam			
					Konservasi SDA dan Ekosistem	Tersusunnya Dokumen perencanaan Pengolahan data dan Infomasi kebakaran hutan lahan, Kawasan Konservasi dan ekosistem esensial	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Tersusunya perencanaan pemanfaatan ekosistem Karst					
					1. Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang 2. Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Pandeglang, Serang dan Cilegon	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	Terlaksananya Kerusakan dan pemeliharaan ekosistem Karst					
					Konservasi SDA dan Ekosistem	Tersusunnya Dokumen perencanaan Pengolahan data dan Infomasi kebakaran hutan lahan, Kawasan Konservasi dan ekosistem esensial	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Tersusunya perencanaan pemanfaatan ekosisten lahan basah					
					1. Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang 2. Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Pandeglang, Serang dan Cilegon	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Terlaksananya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah					

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN
					1. Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang 2. Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Pandeglang, Serang dan Cilegon	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi					
					Konservasi SDA dan Ekosistem	Tersusunnya Dokumen perencanaan Pengolahan data dan Infomasi kebakaran hutan lahan, Kawasan Konservasi dan ekosistem esensial	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi					
					Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan					PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN. PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan	
					Kegiatan Penyuluhan Kehutanan	Terwujudnya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan, sdm penyuluh kehutanan,dan Kelembagaan Kehutanan sesuai kompetensi			Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Meningkatnya kapasitas kelompok tani hutan, SDM penyuluh kehutanan, Kelembagaan Kehutanan, dan pengembangan perhutanan sosial			
					Kegiatan Penyuluhan Kehutanan	Jumlah Kelompok peserta Peningkatan kapasitas SDM penyuluh kehutanan (PNS dan Swadaya)	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan					
						Jumlah Kelompok Kelembagaan data dan informasi dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH)	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan					
						jumlah kelompok Penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terlaksananya Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial					

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019						
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN
			1. Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	1. Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS) 2. Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah pandeglang Serang cilegon Lebak dan Tangerang					PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)	
			1. Pengelolaan DAS	Terlaksananya pengelolaan DAS terpadu sesuai dengan pedoma teknis			Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya pengelolaan DAS terpadu sesuai dengan pedoma teknis			
			1. Pengelolaan DAS	Dokumen Perencanaan pengelolaan rehabilitasi hutan lahan dan Monev RHL	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Tersusunnya Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS					
				Laporan Pengembangan kelembagaan dan peningkatan fungsi DAS	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Terlaksananya Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS					
					Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Terlaksananya Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS					
					Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS					
					Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Terlaksananya Pembinaan Forum DAS					
					Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS					

Serang, Juli 2020
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehut.
Provinsi Banten

Ir. H. M. Husni Hasan, CES
NIP. 19621222 199003 1 004

URUSAN	KODE				
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2	11			
	2	11	01		
	2	11	01	1.01	
	2	11	01	1.01	01

URUSAN		KODE			
	2	11	01	1.01	02
	2	11	01	1.01	03
	2	11	01	1.01	04
	2	11	01	1.01	05
	2	11	01	1.02	
	2	11	01	1.02	01
	2	11	01	1.02	02
	2	11	01	1.02	03

URUSAN	KODE				
	2	11	01	1.02	04
	2	11	01	1.02	05
	2	11	01	1.02	06
	2	11	01	1.02	07
	2	11	01	1.02	08
	2	11	01	1.02	09
	2	11	01	1.03	
	2	11	01	1.03	02
	2	11	01	1.03	03
	2	11	01	1.03	05

URUSAN		KODE			
	2	11	01	1.03	06
	2	11	01	1.03	07
	2	11	01	1.03	08
	2	11	01	1.03	10
	2	11	01	1.03	11
	2	11	01	1.03	12
	2	11	01	1.03	13
	2	11	01	1.03	14
	2	11	01	1.03	15
	2	11	01	1.03	17
	2	11	01	1.03	18
	2	11	01	1.03	23
	2	11	01	1.03	29
	2	11	01	1.03	31
	2	11	01	1.03	35
	2	11	01	1.04	

URUSAN		KODE				
	2	11	01	1.04	09	
	2	11	01			
	2	11	01	1.01		
	2	11	01	1.01	03	
	2	11	01	1.01	09	
	2	11	01	1.01	11	
	2	11	01	1.01	13	
	2	11	01	1.01	17	
	2	11	01	1.01	18	
	2	11	01	1.01	26	

URUSAN	KODE				
	2	11	01	1.01	31
	2	11	01	1.01	
	2	11	01	1.01	02
	2	11	01	1.01	10
	2	11	01	1.01	11
	2	11	01	1.01	12
	2	11	01	1.01	13
	2	11	01	1.01	14
	2	11	01	1.01	15
	2	11	01	1.01	17
	2	11	01	1.01	18
	2	11	01	1.01	23
	2	11	01	1.01	25
	2	11	01	1.01	26
	2	11	01	1.01	29
	2	11	01	1.01	31

URUSAN	KODE				
	2	11	01	1.01	35
	2	11	01	1.01	
	2	11	01	1.01	02
	2	11	01	1.01	10
	2	11	01	1.01	11
	2	11	01	1.01	13
	2	11	01	1.01	15

URUSAN	KODE				
	2	11	01	1.01	17
	2	11	01	1.01	18
	2	11	01	1.01	23
	2	11	01	1.01	31
	2	11	01	1.01	35
	2	11	01	1.01	
	2	11	01	1.01	02
	2	11	01	1.01	11
	2	11	01	1.01	13
	2	11	01	1.01	15
	2	11	01	1.01	17

URUSAN		KODE			
	2	11	01	1.01	18
	2	11	01	1.01	23
	2	11	01	1.01	31
	2	11	01	1.01	35
	2	11	01	1.01	
	2	11	01	1.01	02
	2	11	01	1.01	03
	2	11	01	1.01	09
	2	11	01	1.01	11
	2	11	01	1.01	12

URUSAN	KODE				
	2	11	01	1.01	13
	2	11	01	1.01	15
	2	11	01	1.01	17
	2	11	01	1.01	18
	2	11	01	1.01	23
	2	11	01	1.01	29
	2	11	01	1.01	31

URUSAN	KODE				
	2	11	01	1.01	33
	2	11	03		
	2	11	03	1.01	
	2	11	03	1.01	01

URUSAN	KODE				
	2	11	03	1.01	02
	2	11	03	1.02	
	2	11	03	1.02	01

URUSAN	KODE				
	2	11	03	1.02	02
	2	11	03	1.02	02
	2	11	03	1.02	03
	2	11	03	1.03	
	2	11	03	1.03	01
	2	11	03	1.03	02
	2	11	04		
	2	11	04	1.01	

URUSAN		KODE			
	2	11	04	1.01	01
	2	11	04	1.01	06
	2	11	06		
	2	11	06	1.01	
	2	11	06	1.01	01
	2	11	06	1.01	02

URUSAN		KODE			
	2	11	06	1.01	03
	2	11	06	1.01	04
	2	11	09		
	2	11	09	1.01	
	2	11	09	1.01	01
	2	11	11		
	2	11	11	1.01	

[illegible]

URUSAN		KODE			
	3	28	03	1.03	
	3	28	03	1.03	01
	3	28	03	1.03	02
	3	28	03	1.03	06
	3	28	03	1.03	07
	3	28	03	1.03	04

URUSAN		KODE			
	3	28	03	1.03	05
	3	28	03	1.04	
	3	28	03	1.04	01
	3	28	03	1.04	09
	3	28	03	1.04	02
	3	28	03	1.04	04

URUSAN		KODE			
	3	28	03	1.04	05
	3	28	03	1.04	07
	3	28	03	1.04	06
	3	28	03	1.04	08

URUSAN		KODE			
	3	28	03	1.06	
	3	28	03	1.06	01
	3	28	03	1.06	02
	3	28	03	1.06	03
	3	28	03	1.06	04

URUSAN		KODE			
	3	28	03	1.07	
	3	28	03	1.07	01
	3	28	03	1.07	02
	3	28	03	1.07	03
	3	28	03	1.09	
	3	28	03	1.09	01
	3	28	03	1.09	02
	3	28	03	1.09	03

URUSAN		KODE			
	3	28	03	1.09	04
	3	28	03	1.09	05
	3	28	04		
	3	28	04	1.01	
	3	28	04	1.01	01
	3	28	04	1.01	02

URUSAN		KODE			
	3	28	04	1.01	03
	3	28	04	1.01	04
	3	28	04	1.01	05
	3	28	04	1.01	06
	3	28	04	1.01	07
	3	28	04	1.01	08
	3	28	04	1.01	09
	3	28	04	1.02	

URUSAN		KODE			
	3	28	04	1.02	01
	3	28	04	1.03	
	3	28	04	1.03	01
	3	28	04	1.03	02
	3	28	04	1.03	03
	3	28	04	1.03	04

URUSAN		KODE			
	3	28	04	1.03	05
	3	28	04	1.03	06
	3	28	05		
	3	28	05	1.01	
	3	28	05	1.01	01
	3	28	05	1.01	02
	3	28	05	1.01	03

URUSAN		KODE			
	3	28	06		
	3	28	06	1.01	
	3	28	06	1.01	01
	3	28	06	1.01	02
	3	28	06	1.01	03
	3	28	06	1.01	04
	3	28	06	1.01	05
	3	28	06	1.01	06

anan